



KAJIAN

ANALISIS SEBARAN DAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN

**KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021**



Pangkalpinang
kota beribu
senyuman



PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya, atas tersusunnya Kajian Analisis Sebaran dan Karakteristik Kemiskinan di Kota Pangkalpinang. Penyusunan kajian ini merupakan kegiatan kemitraan antara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA&LITBANG) Kota Pangkalpinang dengan Universitas Bangka Belitung.

Kajian Analisis Sebaran dan Karakteristik Kemiskinan di Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi karakteristik kemiskinan yang berada di Kota Pangkalpinang sehingga dapat memberikan kebermanfaatan bagi ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu indikator dalam pengambilan kebijakan bagi penanganan kemiskinan di Kota Pangkalpinang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setingginya diucapkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA&LITBANG) Kota Pangkalpinang atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyelesaian penyusunan kajian ini. Harapannya kajian bisa memberikan gambaran dan wawasan secara luas sehingga peran data dapat menunjang pembangunan daerah secara komprehensif.

Kami menyadari bahwa muatan isi dalam kajian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dalam pengembangan selanjutnya.

Pangkalpinang, November 2021

Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas berkat dan rahmat Nyayang telah memberikan kekuatan kepada Tim Penyusunan Dokumen Kajian Analisis Sebaran dan Karakteristik Kemiskinan di Kota Pangkalpinang sehinggadapat menyelesaikan dokumen tepat waktu. Penyusunan dokumen ini sangat penting bagi para stakeholder Pemerintah Kota Pangkalpinang, dalam bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kota Pangkalpinang dan membuat intervensi kebijakan yang tepat. Dalam buku ini dianalisis karakteristik kemiskinan di setiap kecamatan baik dari usia, tingkat pendidikan, penghasilan, pekerjaan, jumlah tanggungan, kesehatan, tempat tinggal, bantuan sosial dan lain-lain. Sedangkan untuk sebaran kemiskinan dibuat peta hingga kelurahan. Untuk penanggulangan kemiskinan, dokumen disempurnakan setelah mendapatkan koreksi dan masukan dari hasil FGD berbagai pihak yang menjadi stakeholder di Kota Pangkalpinang.

Semua analisis yang disampaikan adalah dalam rangkamempermudah Pemerintah Daerah dalam menganalisa dan menetapkan keputusan intervensi kebijakan apa yang akan dilakukan.Oleh karena itu Tim Penyusunberupaya semaksimal mungkin dalam pengumpulan data sehinggga dapat menganalisis permasalahan yang ada dalam menganalisis semua pembahasan, kesimpulan maupun saran serta rekomendasi yang diberikan.

Buku ini tentunya tak akan lepas dari kekurangan, oleh karena itu kami sangat terbuka apabila terdapat masukan dan saran, demi kesempurnaan dokumen ini kedepan.

Pangkalpinang, 26 November 2021

KEPALA BAPPEDA & LITBANG



M.BELLY JAWARI S.T.,M.Si

NIP.197907252005011008

RINGKASAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi pemerintahnya tidak terlepas dari upaya untuk mengatasi tingkat kemiskinan, walaupun provinsi ini berada pada peringkat ke-5 kemiskinan terendah dan memiliki tingkat ketimpangan pendapatan terendah se-Indonesia. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada pada tahun 2016 yaitu sebanyak 10,12 ribu jiwa atau sebesar 5,02 persen dari jumlah penduduk Kota Pangkalpinang, sedangkan posisi jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 9 ribu jiwa atau sebesar 4,25 persen dari jumlah penduduk Kota Pangkalpinang. Namun jika dilihat pada tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang semula sebanyak 9 ribu jiwa menjadi 9,4 ribu jiwa di tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran dan karakteristik kemiskinan di Kota Pangkalpinang. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah survei lapangan, dilakukan wawancara dan pengisian kuisioner kepada responden, kemudian untuk menambah analisis dilakukan studi pustaka dan dokumentasi. Teknik studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan penelitian terdahulu dan teori-teori terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data dan informasi dari laporan tertulis dan data yang telah di publish. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan yaitu range usia responden di Kota Pangkalpinang terbanyak berada pada usia 46-53 dengan pendidikan terbanyak adalah tamatan Sekolah Dasar (SD). Pendapatan responden bervariasi, mulai dari yang terendah sebesar Rp500.000,- sampai dengan yang tertinggi sebesar Rp. 3.500.000,-. Range pendapatan terbanyak berada di antara Rp 1.100.000 –Rp 2.000.000. Responden terbanyak memiliki anak sejumlah 3 orang yaitu 37 responden, terbesar berikutnya memiliki anak sebanyak 2 dan 3 anak. Jumlah anak terbanyak yang dimiliki responden yaitu sebanyak 8 orang. Untuk jumlah RT yang tidak bekerja terbanyak di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 2 orang, Sedangkan jumlah anggota RT yang tidak bekerja terbanyak yaitu 6 orang/keluarga. Sebanyak 23 orang masih belum memiliki fasilitas kesehatan KIS. Sebanyak 69 responden memiliki tempat tinggal dengan status rumah sendiri. Selain itu rumah responden didominasi oleh bangunan permanen beratap seng dan lantai semen. Dengan luas rumah paling kecil yaitu 15 m² dan terbesar 300m², sebagian besar responden memiliki rumah berukuran 42m². Responden sebagian besar memiliki kendaraan pribadi berupa motor. Semua responden di Kota Pangkalpinang memperoleh bantuan sosial yang disalurkan pemerintah. Bantuan sosial terbanyak yang diterima oleh responden adalah PKH.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Prakata.....	ii
Kata Sambutan	iii
Ringkasan	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
 Bab I Pendahuluan.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat.....	6
1.5 Target dan Luaran.....	7
 Bab II. Tinjauan Pustaka.....	 8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Kemiskinan.....	8
2.1.1.1. Konsep Kemiskinan.....	9
2.1.1.2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	10
2.1.1.3. Sisi Penawaran	10
2.1.1.4. Sisi Permintaan.....	11
2.1.1.5. Jenis-jenis Kemiskinan.....	11
2.1.1.6. Penyebab Kemiskinan.....	12
2.1.2. Pendapatan.....	12
2.1.3. Jenis Pekerjaan	13
2.1.4. Usia	13
2.1.5. Pendidikan	14
2.1.6. Kesehatan	15
2.1.7. Jumlah Tanggungan	15
2.2. Penelitian Terdahulu.....	16
 Bab III. Metode Penelitian	 18
3.1. Waktu dan Lokasi.....	18
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	18

3.3. Jenis dan Sumber Data.....	18
3.4. Populasi dan Sampel	18
3.5. Teknis Analisis Data	20
Bab IV. Pembahasan	22
1. Karakteristik Kemiskinan di setiap Kecamatan pada Kota Pangkalpiang	23
4.1. Kecamatan Bukit Intan.....	23
4.2. Kecamatan Gabek.....	29
4.3. Kecamatan Gerunggang	35
4.4. Kecamatan Girimaya.....	41
4.5. Kecamatan Pangkalbalam	47
4.6. Kecamatan Rangkui	53
4.7. Kecamatan Taman Sari.....	59
2. Karakteristik Kemiskinan Kota Pangkalpiang.....	65
3. Peta Karakteristik Kemiskinan Kota Pangkalpinang.....	70
4. Analisis Sebaran Kemiskinan Kota Pangkalpinang	70
Bab V. Kesimpulan dan Saran	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran.....	79
5.3. Rekomendasi.....	79
Daftar Pustaka	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1. Jumlah Sampel.....	19
Tabel 3.2. Operasional Variabel	20
Tabel 4.1. Klasifikasi Penduduk di kota Pangkalpinang	22
Tabel 4.2. Usia Responden di Kecamatan Bukit Intan	23
Tabel 4.3. Pendidikan Responden di Kecamatan Bukit Intan	24
Tabel 4.4. Pekerjaan Responden di Kecamatan Bukit Intan	24
Tabel 4.5. Pedapatan Responden di Kecamatan Bukit Intan	25
Tabel 4.6. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Bukit Intan	27
Tabel 4.7. Usia Responden di Kecamatan Gabek	29
Tabel 4.8. Pendidikan Responden di Kecamatan Gabek.....	30
Tabel 4.9. Pekerjaan Responden di Kecamatan Gabek	30
Tabel 4.10. Pedapatan Responden di Kecamatan Gabek	31
Tabel 4.11. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Gabek.....	33
Tabel 4.12. Usia Responden di Kecamatan Gerunggang	35
Tabel 4.13. Pendidikan Responden di Kecamatan Gerunggang.....	36
Tabel 4.14. Pekerjaan Responden di Kecamatan Gerunggang	37
Tabel 4.15. Pedapatan Responden di Kecamatan Gerunggang.....	38
Tabel 4.16. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Gerunggang	39
Tabel 4.17. Usia Responden di Kecamatan Girimaya	41
Tabel 4.18. Pendidikan Responden di Kecamatan Girimaya	42
Tabel 4.19. Pekerjaan Responden di Kecamatan Girimaya	42
Tabel 4.20. Pedapatan Responden di Kecamatan Girimaya.....	43
Tabel 4.21. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Girimaya	45
Tabel 4.22. Usia Responden di Kecamatan Pangkalbalam	47
Tabel 4.23. Pendidikan Responden di Kecamatan Pangkalbalam.....	47
Tabel 4.24. Pekerjaan Responden di Kecamatan Pangkalbalam	49
Tabel 4.25. Pedapatan Responden di Kecamatan Pangkalbalam	50
Tabel 4.26. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Pangkalbalam.....	51
Tabel 4.27. Usia Responden di Kecamatan Rangkui.....	53
Tabel 4.28. Pendidikan Responden di Kecamatan Rangkui	54
Tabel 4.29. Pekerjaan Responden di Kecamatan Rangkui	54
Tabel 4.30. Pedapatan Responden di Kecamatan Rangkui.....	55
Tabel 4.31. Kesehatan Responden di Kecamatan Rangkui	57
Tabel 4.32. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Rangkui.....	58

Tabel 4.33. Usia Responden di Kecamatan Taman Sari.....	59
Tabel 4.34. Pendidikan Responden di Kecamatan Taman Sari	60
Tabel 4.35. Pekerjaan Responden di Kecamatan Taman Sari	61
Tabel 4.36. Pendapatan Responden di Kecamatan Taman Sari	62
Tabel 4.37. Kesehatan Responden di Kecamatan Taman Sari	63
Tabel 4.38. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Taman Sari	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kemiskinan Indonesia	1
Gambar 1.2. Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2020	3
Gambar 1.3. Persentase Penduduk Miskin Kota PangkalpinangTahun 2015-2020.....	3
Gambar 1.4. Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2020	4
Gambar 1.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2020	5
Gambar 2.1. Lingkaran Kemiskinan dari Segi Penawaran	10
Gambar 2.2. Lingkaran Kemiskinan dari Segi Permintaan	11
Gambar 4.1. Klasifikasi Penduduk di kota Pangkalpinang	22
Gambar 4.2. Usia Responden di Kecamatan Bukit Intan	23
Gambar 4.3. Pendidikan Responden di Kecamatan Bukit Intan	24
Gambar 4.4. Pekerjaan Responden di Kecamatan Bukit Intan	25
Gambar 4.5. Pedapatan Responden di Kecamatan Bukit Intan	26
Gambar 4.6. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Bukit Intan	27
Gambar 4.7. Peta Karakteristik Kecamatan Bukit Intan	28
Gambar 4.8.Usia Responden di Kecamatan Gabek	29
Gambar 4.9. Pendidikan Responden di Kecamatan Gabek	30
Gambar 4.10. Pekerjaan Responden di Kecamatan Gabek	31
Gambar 4.11. Pedapatan Responden di Kecamatan Gabek	32
Gambar 4.12. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Gabek.....	34
Gambar 4.13. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Gabek	34
Gambar 4.14.Usia Responden di Kecamatan Gerunggang	35
Gambar 4.15. Pendidikan Responden di Kecamatan Gerunggang.....	36
Gambar 4.16. Pekerjaan Responden di Kecamatan Gerunggang	37
Gambar 4.17. Pedapatan Responden di Kecamatan Gerunggang	38
Gambar 4.18. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Gerunggang.....	40
Gambar 4.19. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Gerunggang.....	40
Gambar 4.20. Usia Responden di Kecamatan Girimaya	41
Gambar 4.21. Pendidikan Responden di Kecamatan Girimaya	42
Gambar 4.22. Pekerjaan Responden di Kecamatan Girimaya	43
Gambar 4.23. Pedapatan Responden di Kecamatan Girimaya.....	44
Gambar 4.24. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Girimaya.....	45

Gambar 4.25. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Girimaya.....	46
Gambar 4.26. Usia Responden di Kecamatan Pangkalbalam.....	47
Gambar 4.27. Pendidikan Responden di Kecamatan Pangkalbalam.....	48
Gambar 4.28. Pekerjaan Responden di Kecamatan Pangkalbalam.....	49
Gambar 4.29. Pendapatan Responden di Kecamatan Pangkalbalam	50
Gambar 4.30. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Pangkalbalam.....	52
Gambar 4.31. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Pangkalbalam	52
Gambar 4.32.Usia Responden di Kecamatan Rangkui	53
Gambar 4.33. Pendidikan Responden di Kecamatan Rangkui.....	54
Gambar 4.34. Pekerjaan Responden di Kecamatan Rangkui.....	55
Gambar 4.35. Pendapatan Responden di Kecamatan Rangkui	56
Gambar 4.36. Kesehatan Responden di Kecamatan Rangkui.....	57
Gambar 4.37. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Rangkui.....	58
Gambar 4.38. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Rangkui	59
Gambar 4.39. Usia Responden di Kecamatan Taman Sari	60
Gambar 4.40. Pendidikan Responden di Kecamatan Taman Sari.....	60
Gambar 4.41. Pekerjaan Responden di Kecamatan Taman Sari	61
Gambar 4.42. Pendapatan Responden di Kecamatan Taman Sari.....	62
Gambar 4.43. Kesehatan Responden di Kecamatan Taman Sari.....	63
Gambar 4.44. Bantuan Sosial di Kecamatan taman sari	64
Gambar 4.45. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Taman Sari	65
Gambar 4.46. Usia Responden Kota Pangkalpinang	66
Gambat 4.47. Pendidikan Responden Kota Pangkalpinang	66
Gambar 4.48. Pekerjaan Responden Kota Pangkalpinang.....	67
Gambar 4.49. Pendapatan Responden Kota Pangkalpinang	67
Gambar 4.50. Jumlah KIS Responden Kota Pangkalpinang	68
Gambar 4.51. Bantuan Sosial Responden Kota Pangkalpinang.....	69
Gambar 4.52. Peta Klasifikasi Penduduk Miskon Kota Pangkalpinang	70
Gambar 4.53. Peta Sebaran Tingkat Kesejahteraan Sangat Miskin	71
Gambar 4.54. Peta Sebaran Tingkat Kesejahteraan Miskin.....	72
Gambar 4.55. Peta Sebaran Tingkat Kesejahteraan Rentan Miskin.....	73
Gambar 4.56. Peta Sebaran Tingkat Kesejahteraan Hampir Miskin	74
Gambar 4.57. Peta Sebaran Tingkat Kesejahteraan Kelas Menengah.....	75

BAB I

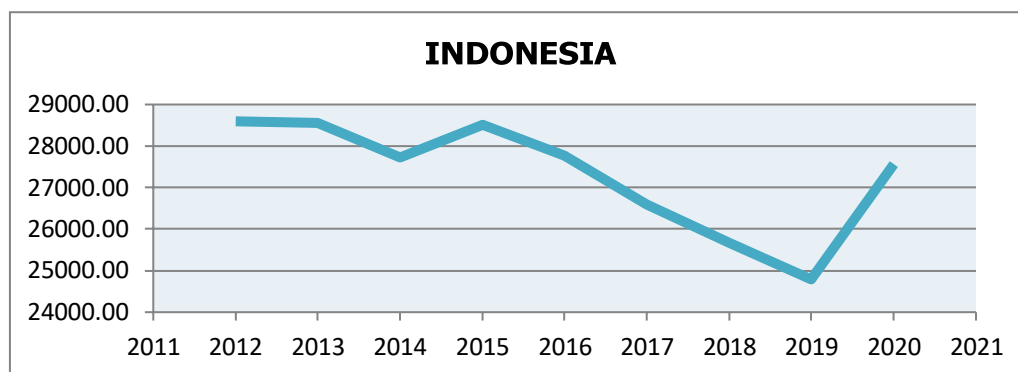
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah multidimensional, tidak hanya masalah ekonomi saja namun juga menyangkut masalah sosial, budaya, dan politik. Karena sifatnya yang multidimensional, maka kemiskinan juga memerlukan solusi yang multidimensional. Berbagai program baik dari pemerintah pusat maupun daerah sudah diusahakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Saenong, 2016).

Kemiskinan bukan hanya menyangkut masalah rendahnya pendapatan, namun juga tidak adanya kesempatan mencapai standar hidup tertentu, seperti kecukupan pangan, kesehatan, keterlibatan dalam lingkungan sosial, penghargaan masyarakat, dan pendidikan yang memadai. Kemiskinan dapat juga berarti kehilangan kesempatan untuk mencapai kualitas kehidupan tertentu, seperti panjang usia, sehat, terbebas dari kelaparan, kepemilikan akses terhadap sarana kesehatan, air bersih, pendidikan, dan sosial. Menurut Amalia (2012) di Indonesia kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sering menjadi topik perbincangan klasik di seluruh kalangan masyarakat dimana telah terjadi sejak masa penjajahan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan di Indonesia periode Tahun 2011-2019 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun pada akhir Tahun 2020 meningkat kembali dengan peningkatan sebesar 11 persen yaitu dari 24.785,87 ribu jiwa menjadi 27.549,69 ribu jiwa.



Gambar 1.1. Kemiskinan Indonesia

Sumber : BPS Bangka Belitung

Kondisi ini tentu memerlukan penanganan karena apabila masalah ini tidak diatasi secara sungguh-sungguh, terpadu, dan berkelanjutan dapat menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial lain yang lebih kompleks.

Penanganan masalah kemiskinan telah menjadi perhatian dunia yang tercermin dari 1) Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bidang pembangunan sosial pada tahun 1995 di Copenhagen, yang

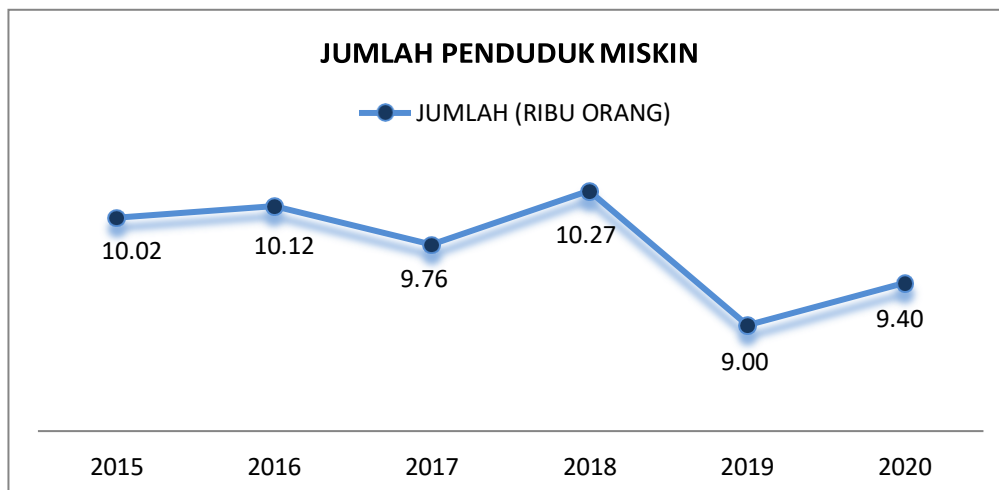
menekankan upaya penanganan kemiskinan, membangun solidaritas, serta menciptakan lapangan kerja (*attaching poverty, building solidarity, creating job*); 2) Deklarasi Milenium MDG's tahun 2000 atas prakarsa PBB dan diikuti 189 negara yang menghasilkan delapan poin kesepakatan, salah satunya pengurangan angka kemiskinan; 3) Konferensi PBB di Washington tahun 2004, yang diikuti oleh 55 negara menghasilkan kesepakatan memerangi kelaparan dan kemiskinan.

Demikian halnya di Indonesia, berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan sudah lama dilakukan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang telah ditetapkan, yaitu: 1) UUD 45, yang mengamanatkan semua Warga Negara berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, bebas dari kemiskinan, dan keterlantaran, 2) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta 3) Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/ 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Sebagai implikasi dari regulasi tersebut, sejak era orde baru, penanganan kemiskinan terus menerus dicantumkan sebagai program prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, demikian halnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia tahun 2005-2009. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) juga memprioritaskan program penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta revitalisasi pertanian, dan perdesaan.

Upaya dalam penanggulangan kemiskinan membutuhkan landasan dan pilar yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan. Landasan atau kondisi dasar dari penanggulangan kemiskinan adalah kondisi makroekonomi yang baik. Tingkat pertumbuhan dan inflasi yang stabil merupakan pondasi utama dari keberlanjutan penurunan kemiskinan. Namun, kondisi makroekonomi saja tidak cukup. Kerangka kelembagaan yang kuat melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas serta lembaga yang saling berkoordinasi, regulasi yang mendukung kelengkapan data dan informasi, serta instrumen pendanaan yang beragam dan inovatif untuk membiayai program-program penanggulangan kemiskinan adalah kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Namun, kondisi makroekonomi saja tidak cukup, diperlukan juga kerangka kelembagaan yang kuat melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas serta lembaga yang saling berkoordinasi, regulasi, kelengkapan data dan informasi, serta instrumen pendanaan yang beragam dan inovatif untuk membiayai program-program penanggulangan kemiskinan. Selain dengan menggunakan pendekatan makro, kemiskinan juga dapat diukur dengan aspek lain seperti akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan informasi publik, kepemilikan barang berharga, kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.

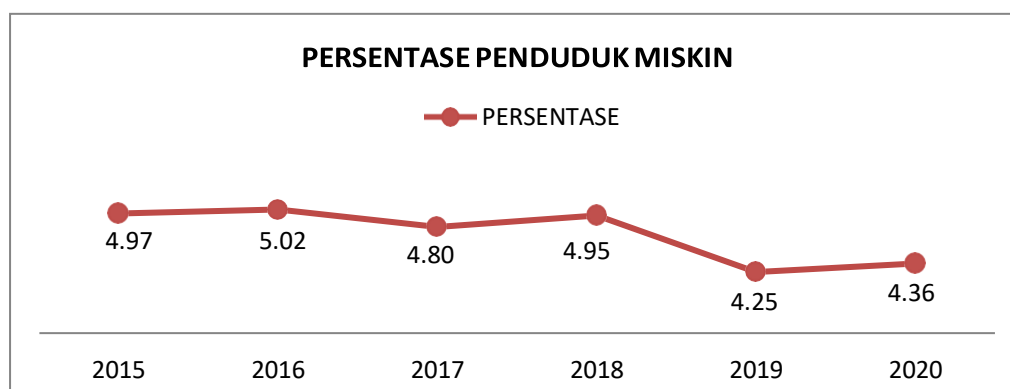
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi pemerintahnya tidak terlepas dari upaya untuk mengatasi tingkat

kemiskinan, walaupun provinsi ini berada pada peringkat ke-5 kemiskinan terendah dan memiliki tingkat ketimpangan pendapatan terendah se-Indonesia. Kota Pangkalpinang yang merupakan kota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami permasalahan kemiskinan yang sama dengan kota lainnya. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah kota Pangkalpinang dalam menekan angka kemiskinan. Namun sayangnya, dampak dari upaya pemerintah tersebut masih belum menghasilkan hasil yang optimal, hal ini terlihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang pada periode 2015 sampai 2020 yang cukup fluktuatif. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada pada tahun 2016 yaitu sebanyak 10,12 ribu jiwa atau sebesar 5,02 persen dari jumlah penduduk Kota Pangkalpinang, sedangkan posisi jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 9 ribu jiwa atau sebesar 4,25 persen dari jumlah penduduk Kota Pangkalpinang. Namun jika dilihat pada tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang semula sebanyak 9 ribu jiwa menjadi 9,4 ribu jiwa di tahun 2020.



Gambar 1.2. Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2020

Sumber : BPS, Pangkalpinang dalam Angka



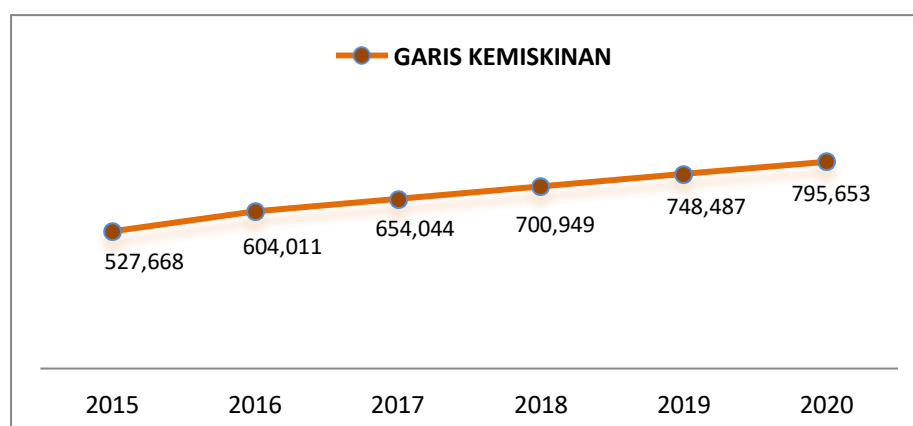
Gambar 1.3. Persentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2020

Sumber : BPS, Pangkalpinang dalam Angka

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur kemiskinan. Indikator yang paling sering dipergunakan adalah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum bukan makanan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin yang bertambah tidak terlepas dari pengaruh tingginya garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Faktor utama penyebab tingginya garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari komponen pada garis kemiskinan komoditi makanan (GKM) yang memberi kontribusi sebesar 72,59 persen. Tingginya rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat untuk membeli komoditas makanan dikarenakan tingginya tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendorong kenaikan garis kemiskinan secara keseluruhan (Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, 2019).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang dapat dilihat garis kemiskinan Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

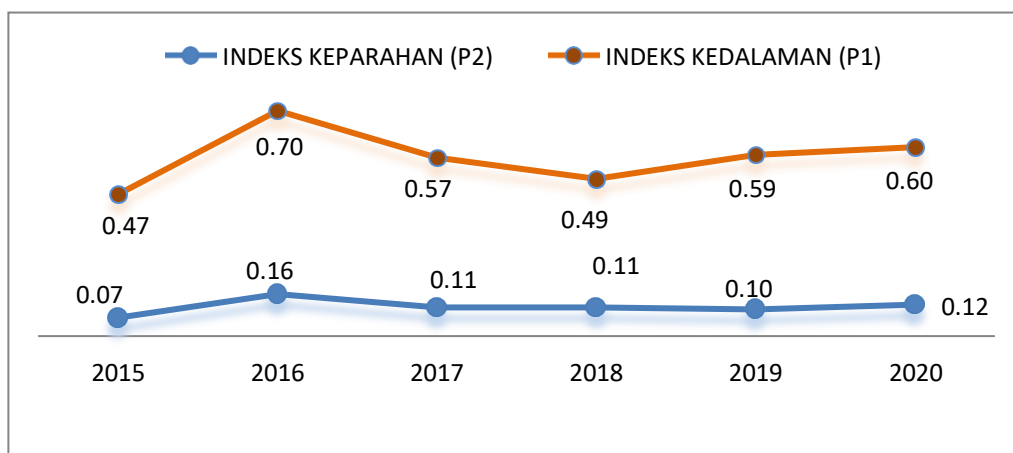


Gambar 1.4. Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2020

Sumber :BPS, Pangkalpinang dalam Angka

Garis kemiskinan Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015, garis kemiskinan Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 527.668,- dan meningkat hingga menjadi Rp. 604.011,- pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 garis kemiskinan meningkat menjadi Rp. 654.044 menjadi Rp. 700.949,- pada tahun 2018 dan Rp. 748.487,- pada tahun 2019. Terakhir pada tahun 2020 garis kemiskinan Kota Pangkalpinang mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar Rp. 795.653. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Selain melalui garis kemiskinan persoalan kemiskinan juga dapat dilihat dari dimensi lain yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Indeks Kedalaman Kemiskinan/ Poverty Gaps Index (P1) merupakan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Terjadinya penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung naik mendekati garis kemiskinan. Kelemahan indeks ini adalah tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2). Indeks Keparahannya Kemiskinan/Poverty Severity Index (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sedangkan penurunan P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.



Gambar 1.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2020

Sumber : Pangkalpinang dalam angka, 2021

Data BPS menunjukkan Indeks kedalaman kemiskinan yang dinyatakan oleh P1 sempat terjadi peningkatan pada tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu 0,07 menjadi 0,16. Kemudian pada tahun

2017 hingga tahun 2019 menunjukkan perubahan ke arah yang cukup baik dikarenakan adanya penurunan. Namun pada tahun 2020 perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Pangkalpinang kembali mengalami peningkatan menjadi 0,12. Selama periode enam tahun terakhir, tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi berada ditahun 2016 dan terendah berada di tahun 2015. Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kota Pangkalpinang mulai meningkat pada tahun 2020 ini, dimana terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari yang semula 0,10 di tahun 2019 menjadi 0,12 di tahun 2020. Keadaan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perlu adanya kajian lebih lanjut tentang kemiskinan. Oleh sebab itu kajian ini merupakan salah satu upaya dalam menganalisis sebaran dan karakteristik kemiskinan, dimana dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi konseptual dan empirik bagi penyusunan dan penyempurnaan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan penanganan kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, perumusan masalah dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana sebaran kemiskinan di Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana karakteristik kemiskinan di Kota Pangkalpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran dan karakteristik kemiskinan di Kota Pangkalpinang

1.4. Manfaat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori, metodologi dan bagi kebijakan praktis

1.4.1. Bagi Pengembangan Teori

Diharapkan kajian ini menjadi salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik penelitian yang sama.

1.4.2. Bagi Pengembangan Metodologi

Instrumen yang digunakan dalam kajian ini dapat dijadikan gambaran tentang kemiskinan di Kota Pangkalpinang.

1.4.3. Bagi KebijakanPraktis

Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan para stakeholders khususnya pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pengembangan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang.

1.5 Target dan Luaran

Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi riil terhadap pembuat kebijakan ekonomi di Kota Pangkalpinang. Selain dari kontribusi terhadap literatur, penelitian ini juga mempunyai luaran berupa publikasi ilmiah jurnal nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standar hidup layak tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah makanan, pakaian, tempat berlindung atau rumah, pendidikan, dan kesehatan (Maipita, 2014).

Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya bargaining (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian tersebut merupakan pengertian kemiskinan secara luas. Telah dikatakan bahwa kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala bidang mereka selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya (Suwandi, 2015).

Menurut Kurniawan, kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Pengertian lainnya yang biasa digunakan adalah menurut European Union bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas (Ali, 2015).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS kota pangkalpinang). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu :

1. Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. (Badan Pusat Statistik)

Menurut Chambers dalam (Ali, 2015) kemiskinan dapat dibagi dalam bentuk yaitu :

- a. Kemiskinan absolut, yakni apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif, yakni kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan kultural, yakni mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak keluar.
- d. Kemiskinan struktural, yakni situasi yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Sharp terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidakseimbangan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal (Kuncoro, 2010).

2.1.1.1 Konsep Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Dalam teori ekonomi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan seseorang maka semakin banyak barang yang dikonsumsi. Tingkat kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggali sumber daya yang tersedia (barang yang dikonsumsi). Kemampuan memperoleh sumber daya yang tersedia dapat diukur dari pendapatan atau pengeluaran seseorang (Widyastuti, 2012).

Dalam melakukan pengukuran terhadap kemiskinan, BPS melakukan analisis dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Terdapat beberapa indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2020) sebagai berikut:

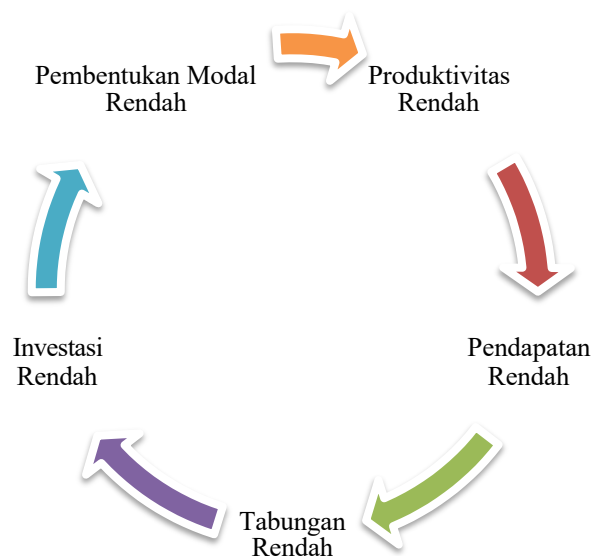
- Ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
- Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- Tidak adanya jaminan masa depan.
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
- Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
- Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

2.1.1.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Kasus kemiskinan di dunia ketiga seperti suatu bencana yang sulit untuk di atasi oleh masyarakat maupun pemerintah secara kelembagaan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi antar generasi. Menurut Nurkse (2000) kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor masa lalu, namun juga menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi dimasa depan. Menurut Nurkse (2000) teori lingkaran setan kemiskinan menjelaskan bahwa keterbatasan masyarakat miskin dalam menjangkau pendidikan dan kesehatan. Lingkaran kemiskinan bisa di lihat dari segi penawaran dan segi permintaan.

2.1.1.3 Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, kemiskinan dialami oleh masyarakat yang memiliki produktivitas rendah sehingga pendapatan hanya sanggup membayar kebutuhan pokok saja. Untuk itu investasi pada usaha maupun investasi pada mausia tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga untuk berangkat dari kemiskinan merupakan hal yang sulit.

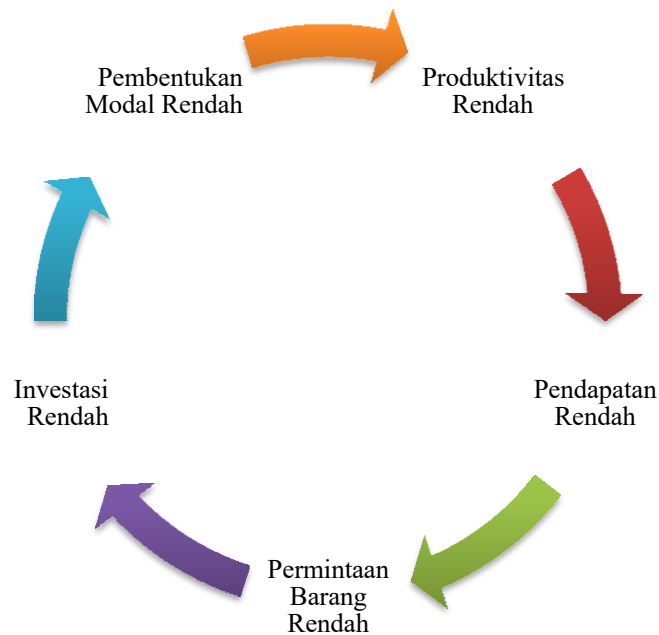


Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan dari Segi Penawaran

Sumber : Nurkse dalam Jhinghan (2000)

2.1.1.4 Sisi Permintaan

Kemiskinan dari segi permintaan, jika pasar untuk berbagai komoditas barang sangat terbatas, maka investasi menjadi sangat rendah. Hal tersebut menyebabkan pendapatan masyarakat semakin rendah. Rendahnya pendapatan masyarakat tersebut disebabkan oleh produktivitas yang rendah akibat terbatasnya pembentukan modal dimasa lalu. Keterbatasan pembentukan modal disebabkan karena kurangnya motivasi terhadap investasi sehingga kemiskinan tidak terputus (Mahendra, 2019).



Gambar 2.2 Lingkaran Kemiskinan dari Segi Permintaan

Sumber : Nurksedalam Jhinghan (2000)

2.1.1.5 Jenis-jenis Kemiskinan

Pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan kronis atau kemiskinan genetik. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola seluruh siklus ekonomi. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman bagi nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan yang menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun (Subianto, 2018). Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan lebih rendah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok untuk hidup secara layak seperti pangan, sandang dan papan agar dapat menjamin kelangsungan hidup.

2. Kemiskinan relatif

Dilihat dari ketimpangan sosial, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat sudah mampu memenuhi

kebutuhan dasar. Semakin besar jarak antara kelas atas dan kelas bawah maka semakin besar jumlah penduduk yang tergolong miskin, sehingga kemiskinan memiliki hubungan yang erat distribusi pendapatan.

2.1.1.6 Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp (dalam Kuncoro, 2006) faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. *Kedua*, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia rendah, sehingga produktifitas dan upah juga rendah. *Ketiga*, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kesempatan untuk memperoleh modal.

Menurut Todaro (2006) faktor kemiskinan dapat berpengaruh terhadap pencapaian laju perekonomian, salah satunya kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, ketiadaan peluang investasi fisik dan moneter, yang menyebabkan pertumbuhan per kapita lebih kecil.

Mankiw (2007) menyatakan pendapatan nasional mengalami kenaikan atau penurunan menurut Teori Keynes tergantung kepada total permintaan *agregat*. Model permintaan *agregat* dibentuk dari variabel-variabel C, I, G, X, M dengan bentuk perekonomian terbuka sebagai berikut: $Y = AD = C + I + G + NX$.

Froyen (2002) mengemukakan bahwa investasi juga merupakan variabel kunci dalam perubahan terhadap pendapatan. Lebih lanjut Froyen menyatakan bahwa sama halnya dengan apa yang dinyatakan oleh Keynes, bahwa investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan dalam jangka waktu yang pendek juga dipengaruhi oleh harapan investasi yang akan datang.

Ada sebahagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa inflasi yang lunak dapat menjadi gawat bila tidak dikendalikan dari pemerintah (sebagai pengendali tunggal perekonomian). Ada pula ahli ekonomi yang berpendapat, yaitu bila terjadi inflasi yang dapat dikendalikan (ukurannya tergantung setiap Negara berapa inflasi yang dapat dikendalikan) atau resesi yang lunak kadang-kadang dapat menguntungkan perekonomian.

Menurut Kuznet (Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

2.1.2. Pendapatan

Penduduk miskin perkotaan memiliki karakteristik keterampilan dan kemampuan yang kurang sehingga mereka cenderung tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan tetap. Sektor formal yang berkembang tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilan

rendah sehingga masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan atas pekerjaan yang layak dan peluang yang terbatas untuk mengembangkan usaha mereka (Baharoglu dan Kessides, 2001). Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang seimbang dan tidak ada kepastian keberlanjutannya (BAPPENAS, 2004). Penduduk miskin di perkotaan cenderung bekerja di sektor informal sehingga tidak ada jaminan pekerjaan. Selain itu, keterbatasan ini juga disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat (Bank Dunia, 2003).

2.1.3. Jenis Pekerjaan

Sektor pekerjaan informal telah dikenal sebagai sebuah fenomena alami di banyak negara berkembang dimana diasosiasikan dengan upah yang lebih rendah, pekerjaan yang lebih sulit dan berbahaya, keamanan dan perlindungan yang lebih rendah serta banyak kerugian lainnya. Dengan kata lain, ekonomi informal mewakili sebuah kerja yang tidak layak tetapi di sisi lain, ekonomi informal adalah sumber mata pencaharian dan perlindungan segera dari kemiskinan. Sektor informal menawarkan solusi cepat terhadap kebutuhan banyak orang untuk mendapatkan penghasilan (Nazara, 2010).

Sektor informal merupakan sektor tidak terorganisir, tidak teratur, tidak terdaftar dan cenderung berusaha dalam skala yang kecil. Selain kepemilikannya adalah oleh individu, sektor informal juga cenderung menggunakan teknologi yang sangat sederhana sehingga memiliki produktivitas tenaga kerja serta tingkat penghasilan yang rendah (Noeraini, 2013). Sektor informal sering dikaitkan dengan rendahnya tingkat penghasilan yang menyebabkan rumah tangga yang bekerja di sektor ini tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi mereka, selain itu mereka juga kemungkinan tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Bertolak belakang dengan sektor informal, sektor formal diasumsikan sebagai sektor dengan tingkat pekerjaan tetap dan menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi sehingga kemungkinan tingkat kesejahteraan lebih baik diperoleh.

2.1.4. Usia

Jumlah penduduk terus bertambah pada tingkat pertumbuhan yang rendah. Struktur Usia berubah sehingga menciptakan sejumlah besar penduduk usia kerja. Perubahan struktur Usia ini dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan salah satunya adalah banyaknya penduduk usia produktif yang tidak bekerja atau dengan kata lain timbulnya pengangguran. Menurut Sukirno efek buruk dari pengangguran yaitu mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan akibat tidak memiliki pendapatan. Dalam jangka panjang, terdapat hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak

mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin(Sukirno, 2004).

Tingginya tingkat pengangguran dalam sebuah perekonomian maka akan mengakibatkan kelesuan ekonomi dan merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat penurunan pendapatan masyarakat. Dampaknya adalah terjadinya penurunan pendapatan per-kapita. Dengan kata lain, bila tingkat pengangguran tinggi maka pendapatan per kapita akan menurun dan sebaliknya bila tingkat pengangguran rendah pendapatan per kapita akan meningkat. Rendahnya pendapatan ini menggambarkan bahwa masyarakat terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

2.1.5. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dapat lebih produktif dalam membangun bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial.

Menurut Simmons (2010) pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan pendidikan juga merupakan tujuan pembangunan mendasar yang memainkan peranan dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan (baik formal maupun nonformal) berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2016).

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Penduduk miskin perkotaan memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung (Bappenas, 2004).

Dampak dari permasalahan tersebut adalah penduduk miskin tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang relatif tetap, kurangnya kegiatan konstruktif khususnya untuk meningkatkan keterampilan anak muda usia sekolah, dan ketidaksetaraan gender yang berkelanjutan (Ravallion, 2007).

Tobing mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi.

2.1.6. Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Peran kesehatan sangat vital dalam menjaga kestabilan perekonomian maksudnya adalah ketika kesehatan dapat terjaga sudah barang tentu aktivitas disektor ekonomi akan berjalan dengan lancar. Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi, sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas. Tingkat taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa sehingga akan mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia dan menjadikan penurunan terhadap pendapatannya.

Kondisi kesehatan yang buruk di negara-negara berkembang berakibat negatif terhadap produktivitas orang dewasa, yang ditunjukkan bahwa orang-orang yang sehat menerima upah yang lebih tinggi (Stephen, 2006). Selanjutnya, Nurkse menambahkan pula bahwa, kesehatan yang semakin buruk akan mengakibatkan lemahnya fisik yang selanjutnya menurunkan kapasitas kerjanya. Akibatnya penghasilan yang diperoleh turut rendah (Jhingan, 1983).

2.1.7. Jumlah Tanggungan

Jumlah tanggungan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga. Jumlah tanggungan dalam rumah tangga ditunjukkan dengan besarnya jumlah anggota rumah tangga yang tidak bekerja berkorelasi negatif dengan konsumsi dan pendapatan perkapita tiap anggota keluarga. Jumlah tanggungan dalam rumah tangga (baik anak-anak, anggota usia produktif yang tidak bekerja dan lansia) kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi kemiskinan rumah tangga (Mok et al., 2007).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menjadi dasar dari penelitian ini terlihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
1	Hermes, Bambang Juanda, Ernan Rustiadi, Baba Barus	Pemetaan Efek Spasial pada Data Kemiskinan Kota Bengkulu	Indeks Moran dan Indeks LISA	Hasil pemetaan cluster memperlihatkan kelurahan yang kemiskinannya tinggi dan dikelilingi oleh wilayah dengan kondisi yang sama (tinggi-tinggi) terjadi di arah selatan kota, wilayah yang rendah-rendah di pusat kota, sedangkan wilayah dengan kemiskinan rendahtinggi berlokasi di bagian timur dan yang tinggi-rendah berada di pusat kota
2	Sarah Nita Hasibuan, Bambang Juanada, Sri Mulatsih	Analisis Sebaran dan Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat	Penelitian ini adalah menganalisis pola sebaran kemiskinan spasial secara umum dengan menggunakan Indeks Moran dan Uji LISA untuk menunjukkan klaster tingkat kemiskinan penduduk	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat autokorelasi spasial positif sebesar 0,464173 yang menunjukkan adanya keterkaitan spasial penduduk miskin disetiap desa dengan pola kemiskinan mengelompok (clustered). Uji LISA menunjukkan tingkat kemiskinan penduduk diklasterkan kedalam empat klaster kemiskinan yakni sebanyak 17 desa yang berada pada kriteria high-high, 31 desa/kelurahan berada pada kriteria low-low, 5 desa pada kriteria low-high dan 1 desa berada pada kriteria high-low. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di

				Kabupaten Bandung Barat adalah jumlah penduduk, tingkat pendidikan, alokasi dana desa (ADD), jumlah toko kelontong dan dana desa, sedangkan indeks desa membangun, jarak desa ke ibukota dan jumlah masyarakat yang menggunakan listrik PLN tidak signifikan menurunkan kemiskinan.
3	Diana Wijayanti	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di DKI Jakarta	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel	Hasil penelitian dapat disimpulkan menyimpulkan bahwa variabel PDRB dan IPM mempengaruhi variabel kemiskinan. Hal itu bisa dilihat dari hasil pengujian yang menunjukkan tingkat signifikansi $f < 0,05$. Sedangkan variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. Dan dari R-square diketahui bahwa variabel independen dapat menjelaskan tingkat kemiskinan sebesar 56,8 persen dan sisanya 43,11 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut.

Sumber : Berbagai sumber jurnal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Ruang Lingkup Pesebaran dan Karakteristik Kemiskinan yang dilaksanakan pada Tahun 2021.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah survei lapangan dengan wawancara dan pengisian kuisioner kepada responden, kemudian untuk menambah analisis dilakukan studi pustaka dan dokumentasi. Teknik studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan penelitian terdahulu dan teori-teori terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data dan informasi dari laporan tertulis dan data yang telah di *publish*.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuisioner kepada responden yang merupakan penduduk miskin di Kota Pangkalpinang. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil publikasi dan diperoleh dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang. Penelitian ini juga menggunakan buku-buku, literatur, artikel, dan jurnal-jurnal ekonomi lainnya yang relevan dan menunjang penelitian.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pangkalpinang dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin berasal dari 7 kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Intan, Gabek, Gerunggang, Girimaya, Pangkal Balam, Rangkui dan Taman Sari dengan total populasi sebanyak 6.304 orang. Kemudian dengan menggunakan rumus slovin diperoleh jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$
$$n = \frac{6.304}{1 + 6.304(0,1)^2}$$
$$n = 98$$

Keterangan:

n = jumlah sampel yang dicari

N = ukuran populasi

e = nilai margin of error (besar kesalahan) dari ukuran populasi

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *stratified sampling*, sehingga diperoleh komposisi sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jumlah Sample

KECAMATAN	KELURAHAN	POPULASI	SAMPEL
BUKIT INTAN	Air Itam	151	2
	Air Mawar	103	2
	Bacang	154	2
	Pasir Putih	155	2
	Semabung Lama	208	3
	Sinar Bulan	139	2
	Temberan	131	2
	TOTAL	1041	16
GABEK	Air Salemba	70	1
	Gabek Dua	211	3
	Gabek Satu	162	3
	Jerambah Gantung	135	2
	Selindung	166	3
	Selindung Baru	74	1
	TOTAL	818	13
GERUNGGANG	Air Kepala Tujuh	158	2
	Bukit Sari	146	2
	Bukit Merapin	181	3
	Kacang Pedang	222	3
	Taman Bunga	108	2
	Tuatunu Indah	392	6
	TOTAL	1207	19
GIRIMAYA	Batu Intan	57	1
	Bukitbesar	94	1
	Pasar Padi	57	1
	Semabung Baru	123	2
	Sriwijaya	145	2

	TOTAL	476	7
PANGKALBALAM	Ampui	174	3
	Ketapang	332	5
	Lontong Pancur	119	2
	Pasir Garam	61	1
	Rejo Sari	120	2
	TOTAL	806	13
RANGKUI	Asam	125	2
	Bintang	28	0
	Gajah Mada	141	2
	Keramat	237	4
	Masjid Jamik	30	0
	Melintang	149	2
	Parit Lalang	342	5
	Pintu Air	195	3
	TOTAL	1247	19
TAMAN SARI	Batin Tikal	73	1
	Gedung Nasional	152	2
	Kejaksaan	233	4
	Opas Indah	217	3
	Rawa Bangun	34	1
	TOTAL	709	11
TOTAL KESELURUHAN		6304	98

Sumber : Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, 2021

3.5. Teknis Analisis Data

Analisis akan dilakukan menggunakan metode tabulasi dalam menentukan karakteristik kemiskinan di Kota Pangkalpinang. Adapun variabel yang diamati yaitu pendapatan, jenis pekerjaan, usia, pendidikan, kesehatan, jumlah tanggungan dengan definisi variabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Operasional Variabel

Variabel	Definisi
Pendapatan	Jumlah seluruh penghasilan atau penerimaan yang diperoleh responden baik berupa gaji atau upah maupun pendapatan dari usaha dan pendapatan lainnya selama satu bulan. Diukur dalam satuan

	rupiah
Jenis Pekerjaan	Merupakan jenis pekerjaan yang dilkaukan yaitu sektor formal dan nonformal
Usia	Menyatakan usia responden yang diukur dalam tahun
Pendidikan	Pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi
Kesehatan	Kesehatan adalah kondisi fisik dan mental yang sehat
Jumlah Tanggungan	Jumlah seluruh anggota keluarga yang harus ditanggung dalam satu keluarga dalam satuan orang

BAB IV

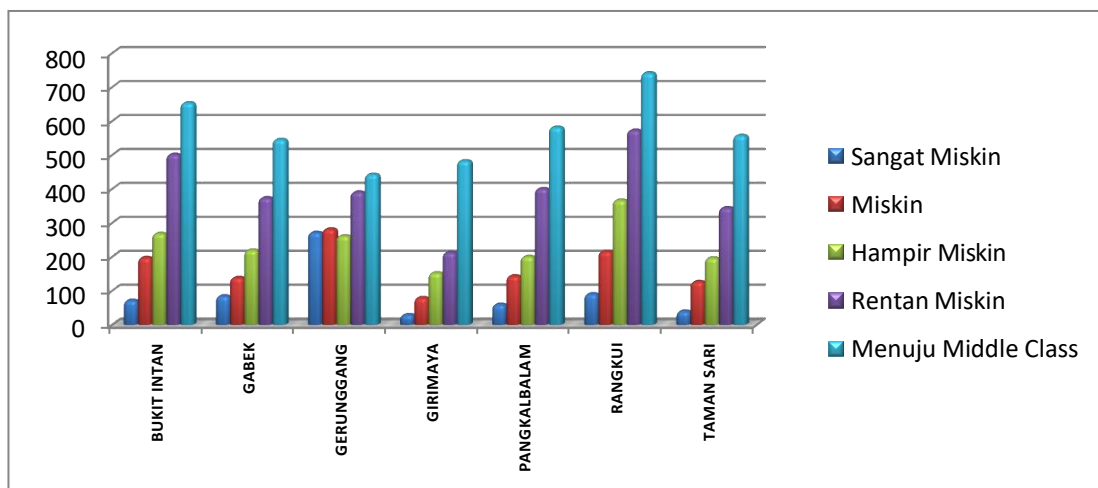
PEMBAHASAN

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dapat dilihat bahwa dari 7 kecamatan yang terdapat di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Bukit Intan, Gabek, Gerunggang, Girimaya, Pangkalbalam, Rangkui dan Taman Sari terdapat 5 klasifikasi penduduk yaitu sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin dan menuju middle class.

Tabel 4.1. Klasifikasi Penduduk di Kota Pangkalpinang

Kecamatan	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Menuju Middle Class
Bukit Intan	72	198	269	502	654
Gabek	85	139	220	374	546
Gerunggang	272	282	262	391	443
Girimaya	30	80	153	213	483
Pangkalbalam	60	144	201	401	582
Rangkui	91	216	367	573	742
Taman Sari	40	127	197	345	558
TOTAL	650	1186	1669	2799	4008

Sumber : Dinas Sosial, 2021



Gambar 4.1. Klasifikasi Penduduk di Kota Pangkalpinang

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dengan klasifikasi sangat miskin hingga rentan miskin terbanyak berada di Kecamatan Rangkui yaitu berjumlah 1.247 jiwa dan terbanyak kedua di

Kecamatan Gerunggang sebanyak 1.207 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Girimaya. Berdasarkan data tersebut maka dilakukan survei dengan pengambilan sample dari jumlah populasi di tiap kecamatan dengan total 98 sample.

1. KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI SETIAP KECAMATAN PADA KOTA PANGKLAPINANG

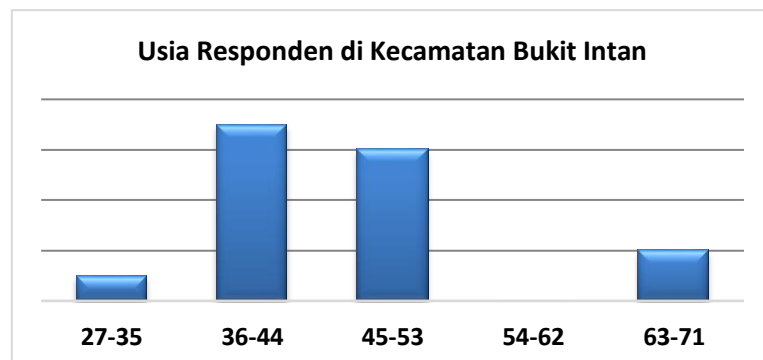
4.1. KECAMATAN BUKIT INTAN

4.1.1. Usia

Tabel 4.2. Usia Responden di Kecamatan Bukit Intan

Range Usia	Jumlah	Persentase
27-35	1	6,25%
36-44	7	43,75%
45-53	6	37,50%
54-62	0	0,00%
63-71	2	12,50%
Total	16	100,00%

Sumber :Survei, 2021



Gambar 4.2. Usia Responden di Kecamatan Bukit Intan

Sumber :Survei, 2021

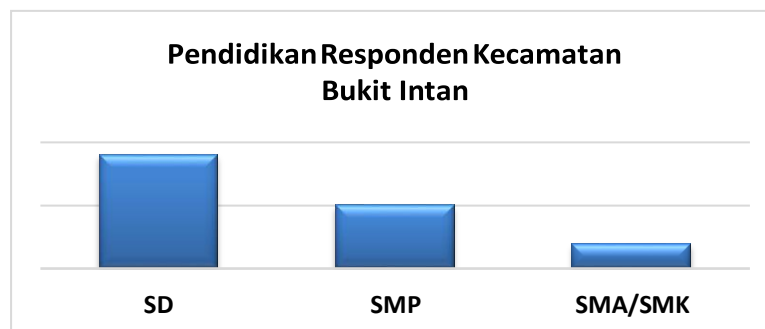
Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwaUsia responden yang berada di Kecamatan Bukit Intan terbanyak berada pada range Usia 36-44 tahun sebesar 43,75 persen atau sebanyak 7 responden.Usia termuda responden yaitu 27 Tahun dan yang paling tua yaitu 68 tahun. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa responden di Kecamatan Bukit Intan didominasi oleh usia produktif.

4.1.2. Pendidikan

Tabel 4.3. Pendidikan Responden di Kecamatan Bukit Intan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
TIDAK SEKOLAH	0	00,00%
SD	9	56,25%
SMP	5	31,25%
SMA/SMK	2	12,50%
Total	16	100,00%

Sumber :Survei, 2021



Gambar 4.3. Pendidikan Responden di Kecamatan Bukit Intan

Sumber : Survei, 2021

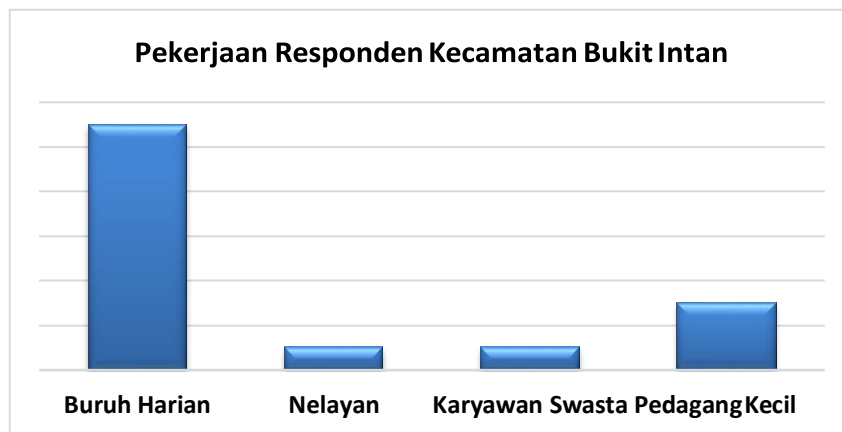
Pendidikan responden di Kecamatan Bukit Intan terbanyak merupakan tamatan Sekolah (SD) yaitu sebesar 56,25 persen atau sebanyak 9 orang. Sisanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 31,25 persen atau sebanyak 5 orang dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 12,5 persen atau sebanyak 2 orang. Dengan tingkat pendidikan yang masih sangat rendah maka hal ini akan berdampak pada produktivitas sumberdaya manusianya sebagai tenaga kerja yang bersaing di pasar tenaga kerja.

4.1.3. Pekerjaan

Tabel 4.4. Pekerjaan Responden di Kecamatan Bukit Intan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Buruh Harian	11	68,75%
Nelayan	1	6,25%
Karyawan Swasta	1	6,25%
Pedagang Kecil	3	18,75%
Total	16	100,00%

Sumber Data : Survei, 2021



Gambar 4.4. Pekerjaan Responden di Kecamatan Bukit Intan

Sumber Data : Survei, 2021

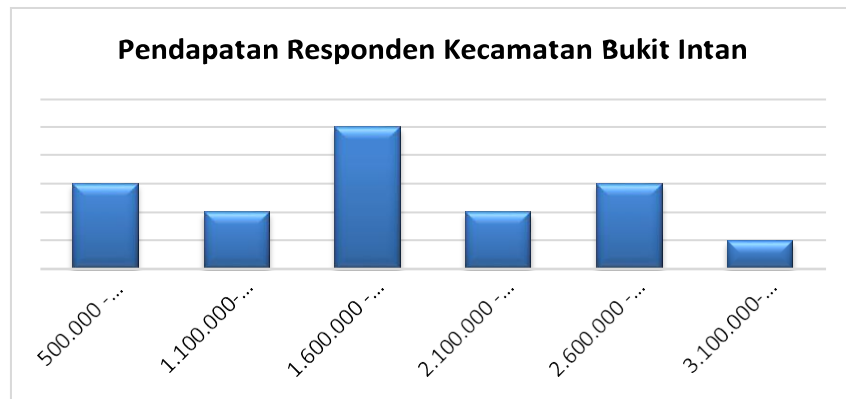
Hasil survei menunjukkan bahwa pekerjaan responden yang berada di Kecamatan Bukit Intan terbanyak sebesar 68,75 persen atau sebanyak 11 bekerja sebagai buruh harian, sebesar 18,75 persen sebagai pedagang kecil dan 6,25 persen sebagai nelayan dan karyawan swasta. Semua responden tidak memiliki penghasilan tambahan dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga mereka hanya mengandalkan dari hasil pekerjaan utama dan jika pun ada adalah dari hasil tambahan pendapatan anggota rumah tangga lainnya yang bekerja.

4.1.4. Pendapatan

Tabel 4.5. Pendapatan Responden di Kecamatan Bukit Intan

Pendapatan	Jumlah	Persentase
Rp. 500.000 - Rp.1.000.000	3	18,75%
Rp.1.100.000 - Rp.1.500.000	2	12,50%
Rp. 1.600.000 - Rp. 2.000.000	5	31,25%
Rp. 2.100.000 - Rp. 2.500.000	2	12,50%
Rp. 2.600.000 - Rp. 3.000.000	3	18,75%
Rp. 3.100.000 - Rp. 3.500.000	1	6,25%
Total	16	100,00%

Sumber Data : Survei, 2021



Gambar 4.5. Pendapatan Responden di Kecamatan Bukit Intan

Sumber Data : Survei, 2021

Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa penghasilan responden di Kecamatan Bukit Intan penghasilan terendah sebesar Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 dan tertinggi sebesar Rp. 3.100.000 – Rp.3.500.000. Sedangkan penghasilan terbanyak adalah berkisar Rp 1.600.000-Rp 2.000.000 dengan jumlah sebanyak 5 responden.

4.1.5. Jumlah Tanggungan

Berdasarkan hasil survei dilapangan, responden terbanyak yang berada di Kecamatan Bukit Intan memiliki 3 anak dengan jumlah sebanyak 6 responden. Kemudian untuk jumlah setiap penghuni rumah terbanyak adalah 4 jiwa dengan jumlah sebanyak 5 responden. Dengan tingkat jumlah penghuni yang tidak bekerja terbanyak hingga 5 orang sehingga tingkat tanggunganya pun tinggi.

4.1.6. Kesehatan

Hasil survei menunjukkan bahwa semua anggota rumah tangga dari responden berada dalam kondisi yang sehat sehingga tidak memerlukan pengeluaran pengobatan perbulannya. Dan hampir semua responden memiliki fasilitas kesehatan berupa KIS/KI, hanya terdapat 1 responden yang memiliki asuransi kesehatan mandiri dengan biaya Rp 150.000 perbulan. Kondisi menunjukkan bahwa responden telah memiliki akses fasilitas kesehatan sehingga mereka tidak akan kesulitan dalam mendapatkan pengobatan apabila jatuh sakit.

4.1.7. Tempat Tinggal

Responden di Kecamatan Bukit Intan paling banyak memiliki rumah dengan status kepemilikan rumah sendiri yaitu sebesar 62, 50 persen atau sebanyak 10 responden, dan

sisanya merupakan rumah dengan status sewa dan menempati rumah orang tua. Dengan lama tinggal hingga 20 tahun, hampir keseluruhan rumah responden yaitu sebanyak 81,25 persen atau sebanyak 13 orang merupakan bangunan permanen dengan atap rumah seng dan lantai rumah berupa semen dan keramik. Luas rumah responden paling kecil berukuran 20m² dan paling luas 273 m², dengan jumlah responden terbanyak memiliki luas rumah sebesar 42 m².

4.1.8. Kendaraan

Responden terbanyak di Kecamatan Bukit Intan memiliki kendaraan pribadi berupa motor yaitu sebesar 81,25 persen atau sebanyak 13 responden. Sedangkan sisanya sebanyak 18,75 persen atau 3 orang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa responden yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 sebanyak 30,7 persen, dengan nilai kisaran harga motor 5-6 juta.

4.1.9. Bantuan Sosial

Tabel 4.6. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Bukit Intan

Jenis Bantuan Sosial	Nominal	Jumlah
BST	Rp. 3.600.000	11
Sembako	Rp. 2.400.000	4
PKH	Rp. 6.800.000	1
Total		16

Sumber Data : Survei, 2021

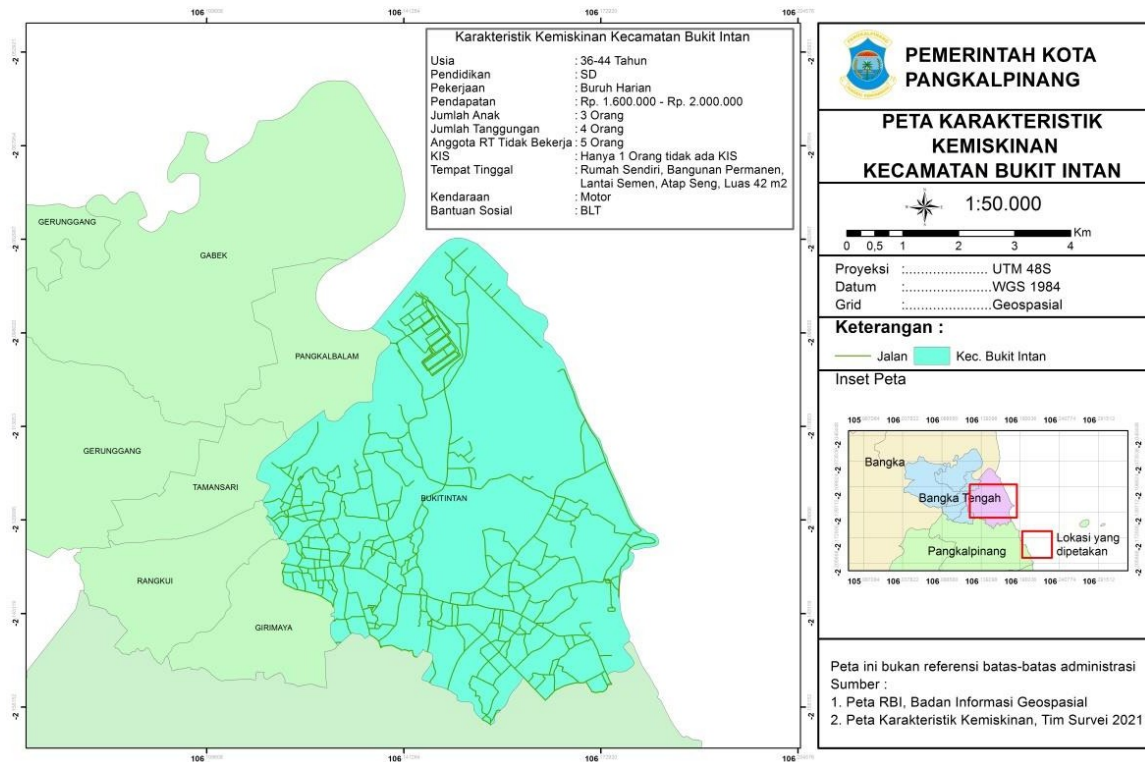


Gambar 4.6. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Bukit Intan

Sumber Data : Survei, 2021

Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai jenis bantuan. Berdasarkan hasil survei, responden yang berada Kecamatan Bukit Intan mendapat dua jenis bantuan yaitu BST dan PKH. Sebanyak 11 responden memperoleh BST dan 5 responden lainnya mendapat Sembako berupa bahan makanan pokok sebanyak 4

orang dan PKH berupa bantuan biaya sekolah sebanyak 1 orang. Responden menyatakan bahwa bantuan yang diperoleh sangat bermanfaat bagi keluarga apalagi ditengah kondisi pandemi yang membuat perekonomian mereka semakin sulit. Diharapkan bantuan ini agar dapat terus diberikan dengan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar membutuhkan. Oleh karena itu mereka mengharapkan pemerintah aktif dalam mendata ulang masyarakat yang berhak untuk memperoleh bantuan.



Gambar 4.7. Peta Karakteristik Kecamatan Bukit Intan

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan Peta Karakteristik Kecamatan Bukit Intan, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berada pada range Usia 36-44 tahun, tingkat pendidikan terbanyak yaitu SD, pekerjaan terbanyak adalah buruh harian, pendapatan terbanyak berkisar Rp 1.600.000- Rp 2.000.000. Dengan jumlah anak per-KK terbanyak yaitu 3 orang dan jumlah tanggungan terbanyak yaitu 4 orang serta Anggota RT tidak bekerja terbanyak yaitu 5 orang, hanya terdapat 1 orang yang tidak memiliki KIS. Para responden juga banyak memiliki rumah sendiri dengan bangunan permanen, lantai semen, atap seng, dan luas 42 m2. Kendaraan yang banyak dimiliki yaitu motor serta bantuan sosial yang banyak didapatkan adalah BST.

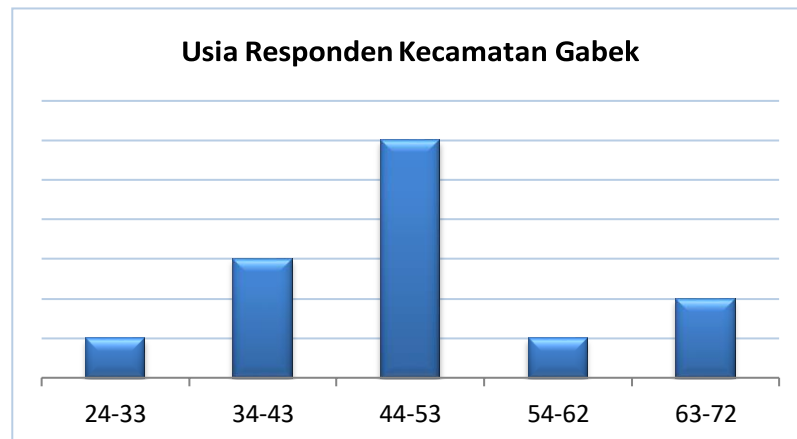
4.2. KECAMATAN GABEK

4.2.1. Usia

Tabel 4.7. Usia Responden di Kecamatan Gabek

Range Usia	Jumlah	Persentase
24-33	1	7,69%
34-43	3	23,08%
44-53	6	46,15%
54-62	1	7,69%
63-72	2	15,38%
Total	13	100,00%

Sumber Data : Survei, 2021



Gambar 4.8. Usia Responden di Kecamatan Gabek

Sumber Data : Survei, 2021

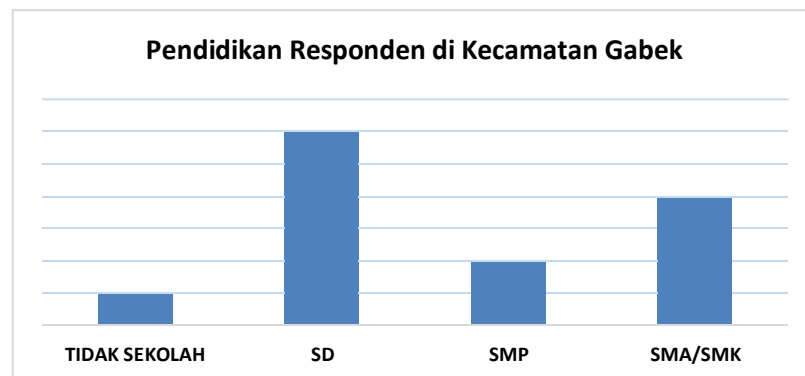
Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa Usia responden yang berada di Kecamatan Gabek terbanyak sebesar 46,15 persen berada pada range 44-53 tahun sebanyak 6 responden.

4.2.2. Pendidikan

Tabel 4.8. Pendidikan Responden di Kecamatan Gabek

Pendidikan	Jumlah	Persentase
TIDAK SEKOLAH	1	7,69%
SD	6	46,15%
SMP	2	15,38%
SMA/SMK	4	30,77%
Total	13	100,00%

Sumber Data : Survei, 2021



Gambar 4.9. Pendidikan Responden di Kecamatan Gabek

Sumber Data : Survei, 2021

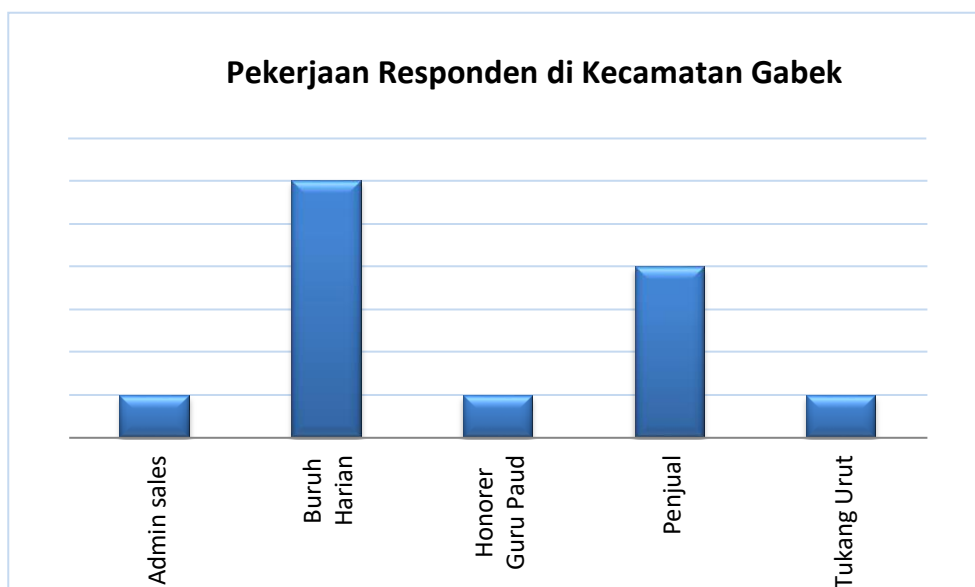
Pendidikan responden di Kecamatan Gabek terbanyak merupakan tamatan Sekolah (SD) yaitu sebesar 46,15 persen atau sebanyak 6 orang. Sisanya berpendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 4 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2 orang, dan terdapat 1 orang yang tidak bersekolah sama sekali.

4.2.3. Pekerjaan

Tabel 4.9. Pekerjaan Responden di Kecamatan Gabek

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Admin sales	1	7,69%
Buruh Harian	6	46,15%
Honoror Guru Paud	1	7,69%
Penjual	4	30,77%
Tukang Urut	1	7,69%
Total	13	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.10. Pekerjaan Responden di Kecamatan Gabek

Sumber: Survei, 2021

Hasil survei menunjukkan bahwa pekerjaan responden yang berada di Kecamatan Gabek terbanyak sebesar 46,15 persen atau sebanyak 6 bekerja sebagai buruh harian, sebesar 30,77 persen sebagai pedagang dan masing-masing 7,69 persen sebagai admin sales, honorer, dan tukang urut. Kondisi ini menunjukkan hampir keseluruhan responden bekerja pada sektor informal. Semua responden tidak memiliki penghasilan tambahan dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga mereka hanya mengandalkan dari hasil pekerjaan utama dan jika pun ada adalah dari hasil tambahan pendapatan anggota rumah tangga lainnya yang bekerja. Selain memiliki pekerjaan utama, sebanyak 6 responden juga memiliki usaha lainnya yang dijalankan oleh responden maupun anggota keluarga lain berupa usaha jualan kue, jualan asinan, warung kecil dan jasa penjahit. Penghasilan dari hasil usaha tambahan tersebut bisa menghasilkan pendapatan dengan kisaran Rp. 600.000 – Rp. 1.200.000.

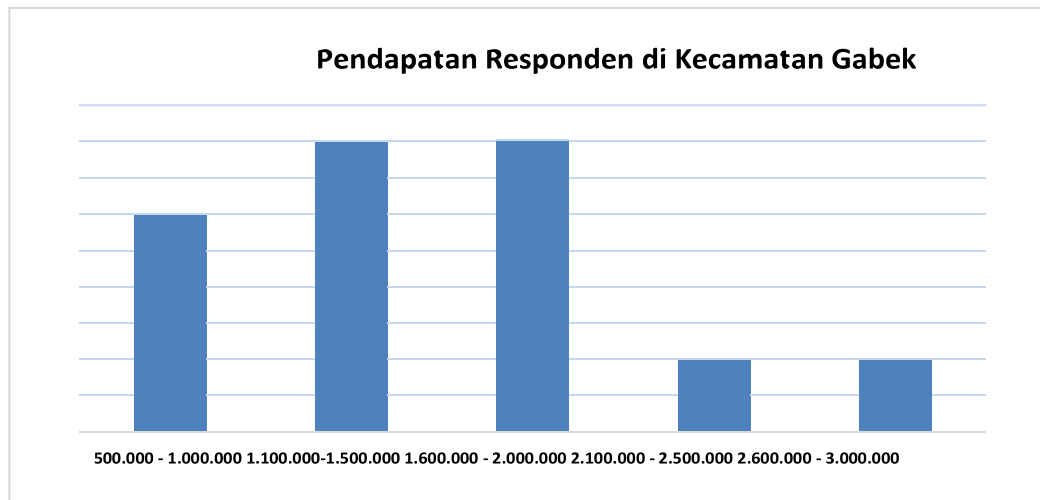
4.2.4. Pendapatan

Tabel 4.10. Pendapatan Responden di Kecamatan Gabek

Penghasilan	Jumlah	Persentase
Rp. 500.000 –Rp. 1.000.000	3	23,08%
Rp. 1.100.000 – Rp. 1.500.000	4	30,77%
Rp. 1.600.000 –Rp. 2.000.000	4	30,77%

Rp. 2.100.000 –Rp. 2.500.000	1	7,69%
Rp. 2.600.000 –Rp. 3.000.000	1	7,69%
Total	13	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.11. Pendapatan Responden di Kecamatan Gabek

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan survei dari 13 responden di Kecamatan Gabek penghasilan responden terbanyak adalah kisaran Rp 1.100.000- Rp.1.500.000 dan Rp.1.600.000- Rp.2.000.000 dengan jumlah responden masing-masing sebanyak 4 responden. Dengan penghasilan terendah sebesar Rp. 500.000 dan tertinggi Rp. 3.000.000.

4.2.5. Jumlah Tanggungan

Berdasarkan hasil survei dilapangan, responden terbanyak yang berada di Kecamatan Gabek memiliki 3 dan 4 anak dengan jumlah masing-masing sebanyak 5 responden. Kemudian untuk jumlah setiap penghuni rumah terbanyak adalah 4 jiwa dengan jumlah sebanyak 4 responden. Dengan tingkat jumlah penghuni terbanyak yang tidak bekerja sejumlah 3 orang dari 6 responden, sehingga tingkat tanggungannya pun tinggi.

4.2.6. Kesehatan

Hasil survei menunjukkan bahwa hampir semua anggota rumah tangga dari responden berada dalam kondisi yang sehat sehingga tidak memerlukan pengeluaran pengobatan perbulannya. Hanya satu responden yang memiliki anggota keluarga yang sakit sehingga harus berobat

setiap bulannya dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp.100.000/bulan. Untuk Fasilitas kesehatan sebesar 76,92 persen atau sebanyak 10 orang responden telah memiliki KIS, dan sisanya 3 responden tidak memiliki KIS atau asuransi kesehatan. Kondisi menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang belum sadar akan pentingnya asuransi kesehatan baik itu asuransi kesehatan mandiri maupun KIS sebagai bentuk kemudahan dalam memperoleh akses fasilitas kesehatan.

4.2.7. Tempat Tinggal

Responden di Kecamatan Gabek paling banyak memiliki rumah dengan status kepemilikan rumah sendiri yaitu sebesar 69,23 persen atau sebanyak 9 responden, dan sisanya merupakan rumah dengan status sewa dan menempati rumah orang tua. Dengan lama tinggal hingga 20 tahun, hampir sebagian besar rumah responden yaitu sebesar 76,92 persen atau sebanyak 10 orang merupakan bangunan permanen dengan atap rumah seng dan lantai rumah berupa semen, sisanya merupakan bangunan semi permanen. Luas rumah responden paling kecil berukuran 24m² dan paling luas 150m², dengan jumlah responden terbanyak memiliki luas rumah sebesar 42m².

4.2.8. Kendaraan

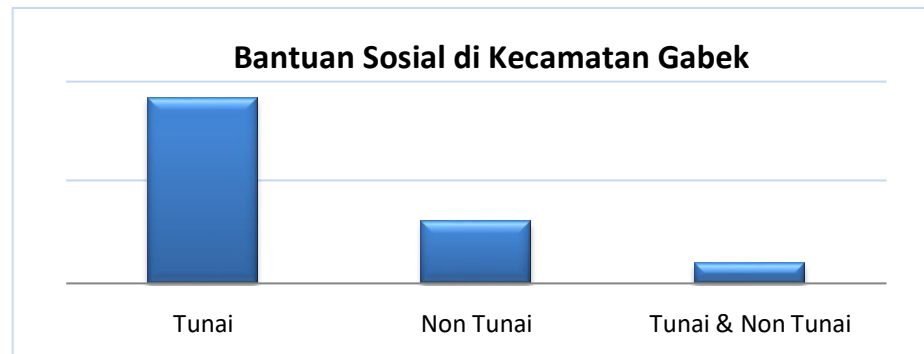
Responden terbanyak di Kecamatan Gabek memiliki kendaraan pribadi berupa motor yaitu sebesar 84,62 persen atau sebanyak 11 responden. Sedangkan sisanya sebanyak 15,38 persen atau 2 orang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa responden yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 sebanyak 27,27 persen, dengan nilai kisaran harga motor 6-9 juta.

4.2.9. Bantuan Sosial

Tabel 4.11. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Gabek

Jenik Bantuan Sosial	Nominal	Jumlah
BST	Rp. 3.600.000	6
Sembako	Rp. 2.400.000	3
PKH	Rp.2.850.000	1
BST	Rp. 600.000	1
Bantuan Rumah Swadaya	Rp. 17.000.000	2
Total		13

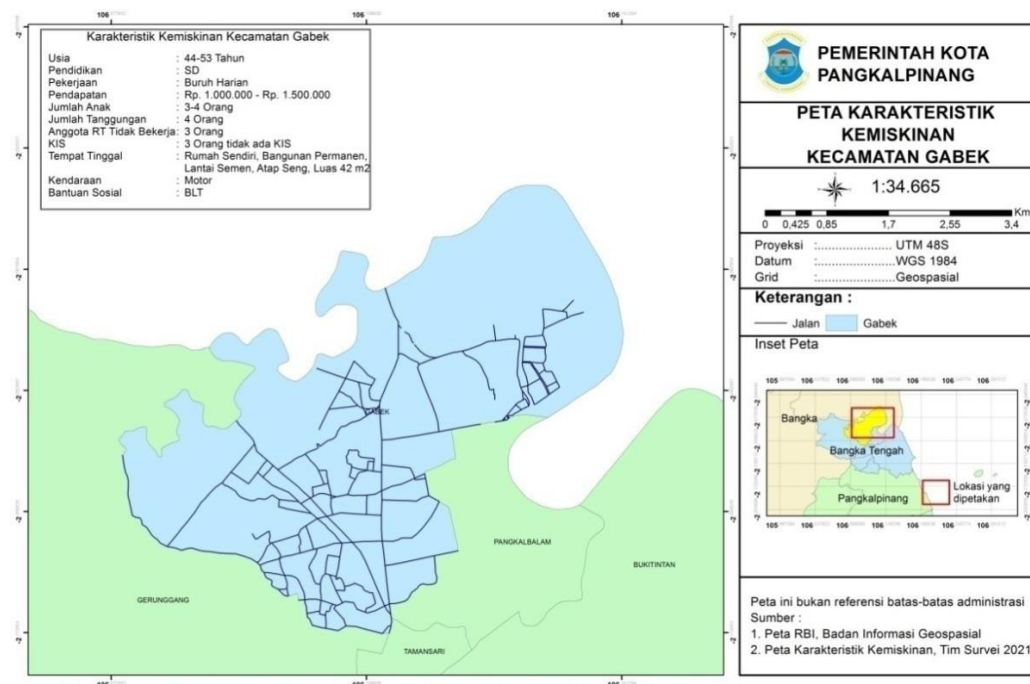
Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.12. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Gabek

Sumber: Survei, 2021

Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai jenis bantuan. Berdasarkan hasil survei, responden yang berada Kecamatan Gabek mendapat empat jenis bantuan yaitu BST, PKH, BST dan Bantuan Rumah Swadaya. Sebanyak 6 responden memperoleh BST dan 3 responden lainnya mendapat Sembako berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 orang dan PKH, 1 responden mendapat BST dan 2 responden mendapatkan bantuan rumah swadaya. Bagi responden yang mendapatkan bantuan rumah swadaya maka tidak akan mendapatkan bantuan sosial lainnya. Semua responden menyatakan bahwa bantuan yang diperoleh sangat bermanfaat bagi keluarga dan diharapkan bantuan ini agar dapat terus diberikan dari pemerintah kepada masyarakat.



Gambar 4.13. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Gabek

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan Peta Karakteristik Kecamatan Gabek, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berada pada range Usia 44-53 tahun, tingkat pendidikan terbanyak yaitu SD, pekerjaan terbanyak adalah buruh harian, pendapatan terbanyak berkisar Rp 1.000.000- Rp 1.500.000. Dengan jumlah anak per-KK terbanyak yaitu 3-4 orang dan jumlah tanggungan terbanyak yaitu 4 orang serta Anggota RT tidak bekerja terbanyak yaitu 3 orang, dan terdapat 3 orang yang tidak memiliki KIS. Para responden juga banyak memiliki rumah sendiri dengan bangunan permanen, lantaisemen, atap seng dan luas 42 M². Kendaraan yang banyak dimiliki yaitu motor serta bantuan sosial yang banyak didapatkan adalah BST.

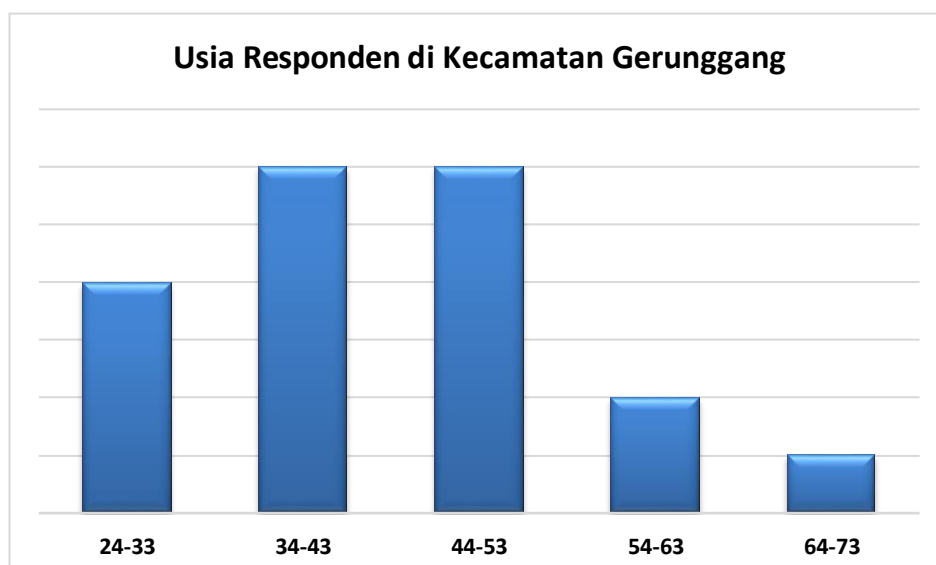
4.3. KECAMATAN GERUNGANG

4.3.1. Usia

Tabel 4.12. Usia Responden di Kecamatan Gerunggang

Range Usia	Jumlah	Persentase
24-33	4	21,05%
34-43	6	31,58%
44-53	6	31,58%
54-63	2	10,53%
64-73	1	5,26%
Total	19	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.14. Usia Responden di Kecamatan Gerunggang

Sumber: Survei, 2021

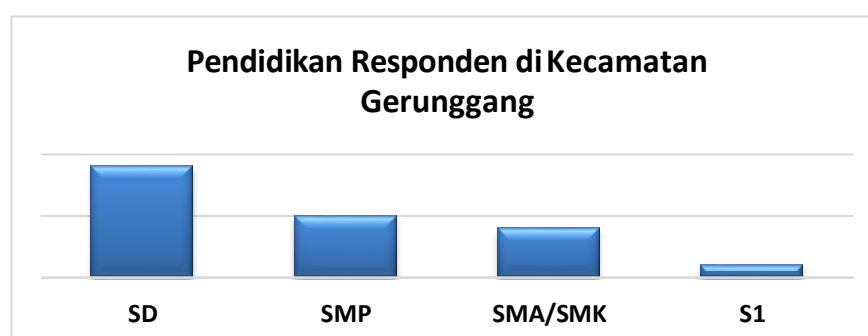
Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa Usia responden yang berada di Kecamatan Gerunggang terbanyak sebesar 31,58 persen berada pada range 44-53 tahun dan range 44-53 tahun sebanyak masing-masing 6 responden.

4.3.2. Pendidikan

Tabel 4.13. Pendidikan Responden di Kecamatan Gerunggang

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	9	47,37%
SMP	5	26,32%
SMA/SMK	4	21,05%
S1	1	5,26%
Total	19	100%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.15. Pendidikan Responden di Kecamatan Gerunggang

Sumber: Survei, 2021

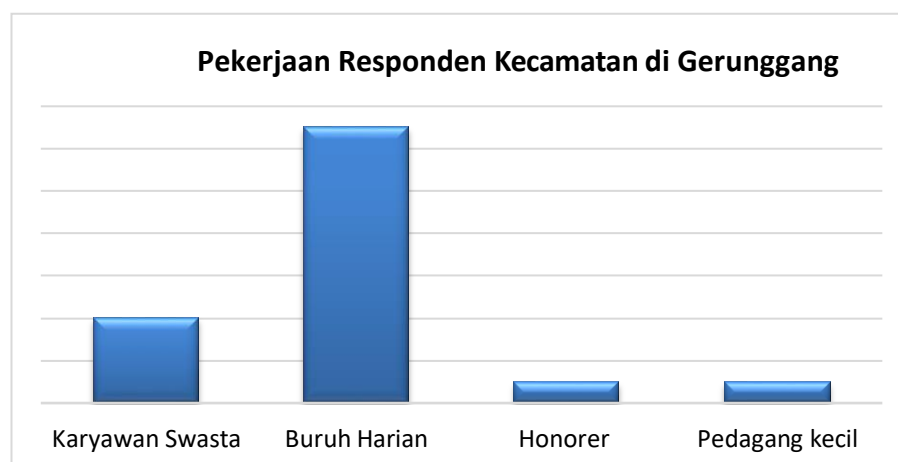
Pendidikan responden di Kecamatan Gabek terbanyak merupakan tamatan Sekolah (SD) yaitu sebesar 47,37 persen atau sebanyak 9 orang. Sisanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2 orang, Sekolah Menengah Atas sebanyak 4 orang, dan terdapat 1 orang yang berpendidikan Sarjana (S1).

4.3.3. Pekerjaan

Tabel 4.14. Pekerjaan Responden di Kecamatan Gerunggang

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Karyawan Swasta	4	21,05%
Buruh Harian	13	68,42%
Honorer	1	5,26%
Pedagang kecil	1	5,26%
Total	19	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.16. Pekerjaan Responden di Kecamatan Gerunggang

Sumber: Survei, 2021

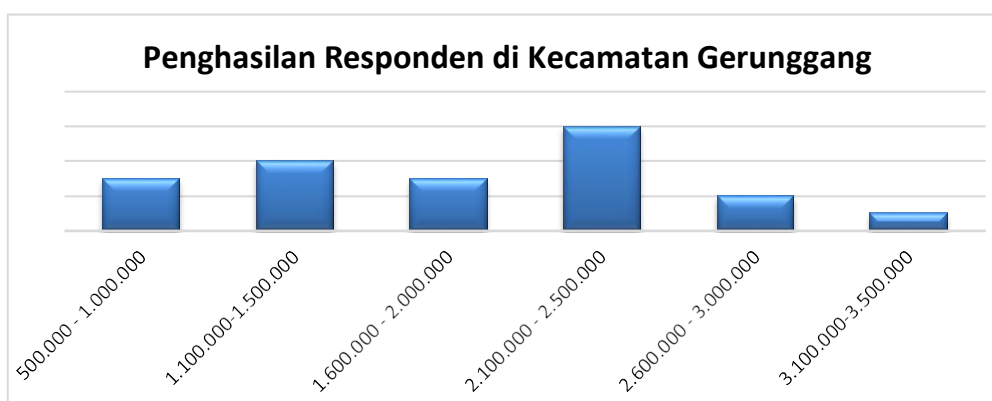
Hasil survei menunjukkan bahwa pekerjaan responden yang berada di Kecamatan Gabek terbanyak sebesar 68,42 persen atau sebanyak 13 responden bekerja sebagai buruh harian, kemudian 21,05 persen sebagai karyawan swasta dan masing-masing 5,26 persen sisanya sebagai honorer dan pedagang kecil. Kondisi ini menunjukkan hampir keseluruhan responden bekerja pada sektor informal. Semua responden tidak memiliki penghasilan tambahan dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga mereka hanya mengandalkan dari hasil pekerjaan utama atau dari hasil tambahan pendapatan anggota rumah tangga lainnya yang bekerja.

4.3.4. Pendapatan

Tabel 4.15. Pendapatan Responden di Kecamatan Gerunggang

Penghasilan	Jumlah	Persentase
Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	3	15,79%
Rp. 1.100.000- Rp. 1.500.000	4	21,05%
Rp. 1.600.000 - Rp. 2.000.000	3	15,79%
Rp. 2.100.000 - Rp. 2.500.000	6	31,58%
Rp. 2.600.000 - Rp. 3.000.000	2	10,53%
Rp. 3.100.000 - Rp. 3.500.000	1	5,26%
Total	19	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.17. Pendapatan Responden di Kecamatan Gerunggang

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan survei dari 19 responden di Kecamatan Gerunggang penghasilan responden terbanyak adalah kisaran Rp 2.100.000- Rp. 2.500.000 dengan jumlah responden sebanyak 6 responden. Dengan penghasilan terendah sebesar Rp. 500.000 dan tertinggi Rp. 3.500.000.

4.3.5. Jumlah Tanggungan

Berdasarkan hasil survei di lapangan, responden terbanyak yang berada di Kecamatan Gerunggang memiliki 3 anak dengan persentase sebesar 50 persen atau sebanyak 9 responden. Kemudian untuk jumlah setiap penghuni rumah terbanyak adalah 5 jiwa dengan jumlah sebanyak 7 responden. Dengan tingkat jumlah penghuni terbanyak yang tidak bekerja sejumlah 4 orang dari 6 responden, sehingga dengan pendapatannya yang tidak terlalu besar tingkat tanggungannya pun tinggi.

4.3.6. Kesehatan

Hasil survei menunjukkan bahwa hampir semua anggota rumah tangga dari responden berada dalam kondisi yang sehat sehingga tidak memerlukan pengeluaran pengobatan perbulannya. Untuk Fasilitas kesehatan seluruh responden yaitu sebanyak 19 orang telah memiliki KIS. Kondisi menunjukkan bahwa seluruh responden dapat memperoleh kemudahan dalam memperoleh akses fasilitas kesehatan.

4.3.7. Tempat Tinggal

Hampir keseluruhan responden di Kecamatan Gerunggang memiliki rumah dengan status kepemilikan rumah sendiri yaitu sebesar 94,74 persen atau sebanyak 18 responden, dan sisanya sebanyak 1 responden memiliki rumah dengan status sewa. Dengan lama tinggal sampai dengan 20 tahun, hampir sebagian besar rumah responden yaitu sebesar 63,16 persen atau sebanyak 12 orang merupakan bangunan permanen dengan atap rumah seng dan lantai rumah berupa semen, sisanya 7 responden memiliki rumah dengan bangunan semi permanen. Luas rumah responden paling kecil berukuran 24m² dan paling luas 126 m², dengan jumlah responden terbanyak memiliki luas rumah sebesar 42 m² dan 48 m².

4.3.8. Kendaraan

Responden terbanyak di Kecamatan Gerunggang memiliki kendaraan pribadi berupa motor yaitu sebesar 94,74 persen atau sebanyak 18 responden dan hanya 1 orang responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa responden yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 sebanyak 44,44 persen atau sebanyak 8 responden, dengan nilai kisaran harga motor 5 juta.

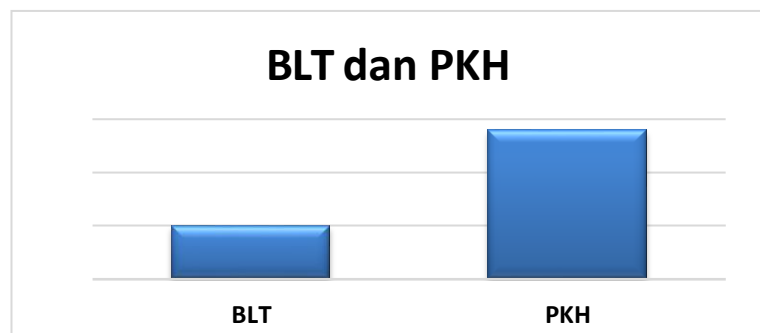
4.3.9. Bantuan Sosial

Tabel 4.16. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Gerunggang

Jenik Bantuan Sosial	Nominal/ Tahun	Jumlah
BST	Rp. 3.600.000	5
	Rp. 1.680.000	1
	Rp. 2.400.000	3
	Rp. 3.200.000	2
	Rp. 3.300.000	1
	Rp. 4.400.000	1
	Rp. 4.800.000	1
	Rp. 5.680.000	1
PKH	Rp. 6.000.000	2

Rp. 6.300.000	1
Rp. 7.800.000	1
Total	19

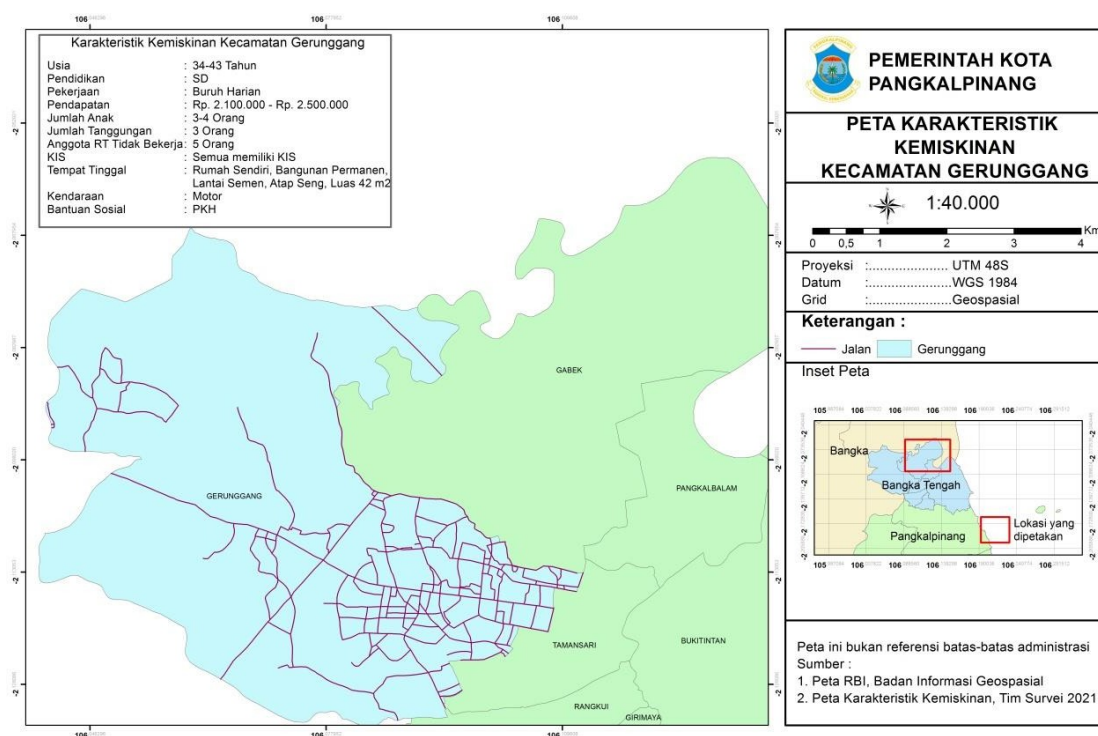
Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.18. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Gerunggang

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan hasil survei, responden yang berada Kecamatan Gerunggang mendapatkan dua jenis bantuan sosial yaitu BST dan PKH. Sebanyak 5 responden memperoleh BST dan 14 responden lainnya mendapat PKH dengan variasi nominal yang berbeda. Semua responden menyatakan bahwa bantuan yang diterima memberikan manfaat bagi perekonomian keluarga dan diharapkan agar bantuan dapat diterima secara berkelanjutan.



Gambar 4.19. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Gerunggang

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan Peta Karakteristik Kecamatan Gerunggang, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berada pada range Usia 34-43 tahun, tingkat pendidikan terbanyak yaitu SD, pekerjaan terbanyak adalah buruh harian, pendapatan terbanyak berkisar Rp 2.100.000- Rp 2.500.000. Dengan jumlah anak per-KK terbanyak yaitu 3-4 orang dan jumlah tanggungan terbanyak yaitu 3 orang serta Anggota RT tidak bekerja terbanyak yaitu 5 orang, dan semua orang memiliki KIS. Para responden juga banyak memiliki rumah sendiri dengan bangunan permanen, lantai semen, atap seng, dan luas 42 m². Kendaraan yang banyak dimiliki yaitu motor serta bantuan sosial yang banyak didapatkan adalah PKH.

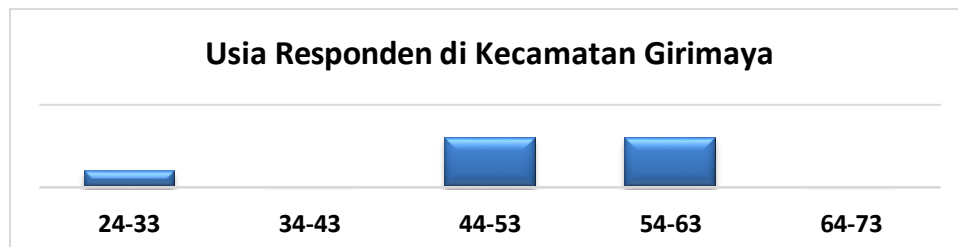
4.4. KECAMATAN GIRIMAYA

4.4.1. Usia

Tabel 4.17. Usia Responden di Kecamatan Girimaya

Range Usia	Jumlah	Persentase
24-33	1	14,28%
34-43	0	31,58%
44-53	3	42,86%
54-63	3	42,86%
64-73	0	0%
Total	7	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.20. Usia Responden di Kecamatan Girimaya

Sumber: Diolah, 2021

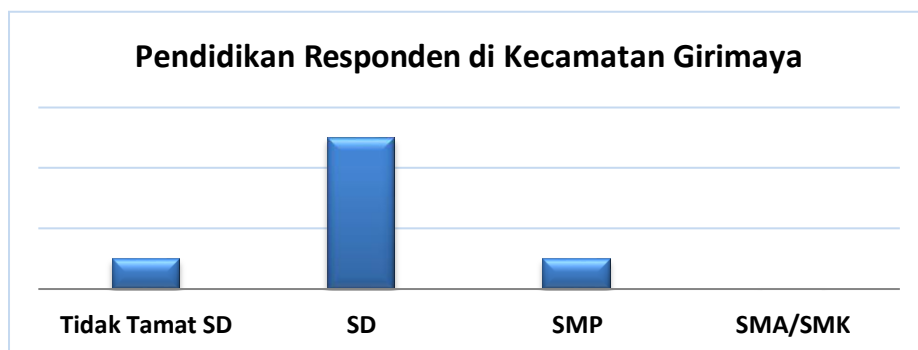
Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa Usia responden yang berada di Kecamatan Girimaya terbanyak sebesar 42,86 persen berada pada range 44-53 tahun dan range 54-63 tahun sebanyak masing-masing 3 responden.

4.4.2. Pendidikan

Tabel 4.18. Pendidikan Responden di Kecamatan Girimaya

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak Tamat SD	1	14.29%
SD	5	71.43%
SMP	1	14.29%
SMA/SMK	0	0.00%
Total	7	100%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.21. Pendidikan Responden di Kecamatan Girimaya

Sumber: Survei, 2021

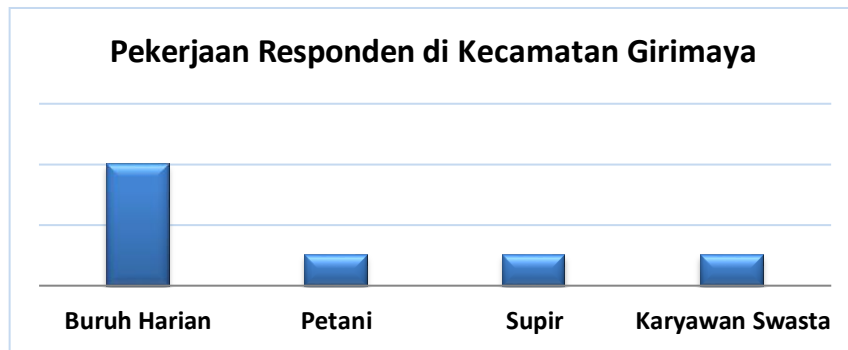
Pendidikan responden di Kecamatan Girimaya terbanyak merupakan tamatan Sekolah (SD) yaitu sebesar 71,43 persen atau sebanyak 5 orang. Sisanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 orang dan terdapat 1 orang yang bahkan tidak tamat SD.

4.3.3. Pekerjaan

Tabel 4.19. Pekerjaan Responden di Kecamatan Girimaya

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Buruh Harian	4	40.00%
Petani	1	20.00%
Supir	1	20.00%
Karyawan Swasta	1	20.00%
Total	7	100,00%

Survei, 2021



Gambar 4.22. Pekerjaan Responden di Kecamatan Girimaya

Sumber: Survei, 2021

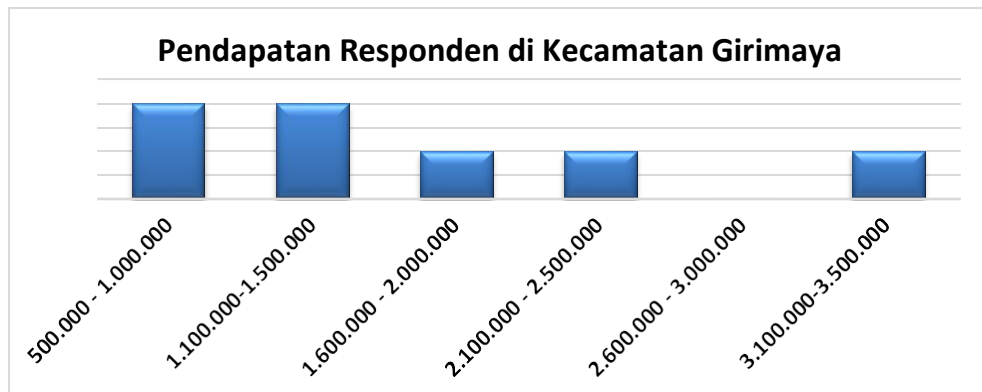
Hasil survei menunjukkan bahwa pekerjaan responden yang berada di Kecamatan Girimaya terbanyak sebesar 40 persen atau sebanyak 4 responden bekerja sebagai buruh harian, kemudian sisanya masing-masing sebesar 20 persen sebagai petani, supir, karyawan swasta. Kondisi ini menunjukkan hampir keseluruhan responden bekerja pada sektor informal. Hanya satu responden saja yang bekerja di sektor formal sebagai karyawan swasta, namun untuk posisinya juga hanya sebagai pegawai tidak tetap. Semua responden tidak memiliki penghasilan tambahan dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga mereka hanya mengandalkan dari hasil pekerjaan utama atau dari hasil tambahan pendapatan anggota rumah tangga lainnya yang bekerja.

4.3.4. Pendapatan

Tabel 4.20. Pendapatan Responden di Kecamatan Girimaya

Penghasilan	Jumlah	Persentase
Rp. 500.000 –Rp. 1.000.000	2	28,57%
Rp. 1.100.000- Rp. 1.500.000	2	28,57%
Rp. 1.600.000 –Rp. 2.000.000	1	14,28%
Rp. 2.100.000 –Rp. 2.500.000	1	14,28%
Rp. 2.600.000 –Rp. 3.000.000	0	0%
Rp. 3.100.000- Rp. 3.500.000	1	14,28%
Total	7	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.23. Pendapatan Responden di Kecamatan Girimaya

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan survei dari 19 responden di Kecamatan Girimaya penghasilan responden terbanyak adalah kisaran Rp.500.000 – Rp.1.000.000 dan kisaran Rp 1.100.000-1.500.000 dengan jumlah responden masing- masing sebanyak 2 responden. Dengan penghasilan terendah sebesar Rp. 500.000 dan tertinggi Rp. 3.500.000.

4.3.5. Jumlah Tanggungan

Berdasarkan hasil survei dilapangan, responden terbanyak yang berada di Kecamatan Girimaya memiliki 2 anak dengan persentase sebesar 42,86 persen atau sebanyak 3 responden. Kemudian untuk jumlah setiap penghuni rumah terbanyak adalah 3 jiwa dengan jumlah sebanyak 3 responden. Dengan tingkat jumlah penghuni terbanyak yang tidak bekerja sejumlah 2 orang dari 3 responden, sehingga tingkat tanggungannya pun terkategori cukup tinggi.

4.3.6. Kesehatan

Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat satu responden yang anggota rumah tangganya yang harus rutin mendapatkan perawatan kesehatan setiap bulan dikarenakan menderita penyakit kronis. Responden tersebut terdaftar memiliki KIS sehingga tidak kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Namun tidak semua responden yang berada di Kecamatan Girimaya mempunyai KIS, sebagian besar responden yaitu sebesar 71,43 persen atau sebanyak 5 dari 7 responden belum memiliki KIS, sehingga mereka mengeluarkan biaya kesehatan sampai dengan Rp.100.000/ bulan. Alasan responden belum memiliki KIS dikarenakan administrasi pendaftaran yang dianggap responden yang menyulitkan.

4.3.7. Tempat Tinggal

Hampir keseluruhan responden di Kecamatan Girimaya memiliki rumah dengan status kepemilikan rumah sendiri yaitu sebesar 71,43 persen atau sebanyak 5 dari 7 responden, dan sisanya sebanyak 2 responden memiliki rumah dengan status sewa dan menempati rumah milik orang tua. Dengan lama tinggal responden paling banyak yaitu sampai dengan 20 tahun, bahkan terdapat responden yang tinggal sampai dengan 40 tahun. Semua rumah responden merupakan bangunan permanen dengan atap rumah seng dan lantai rumah berupa semen dan keramik. Luas rumah responden paling kecil berukuran 27 m² dan paling luas 300 m², dengan jumlah responden terbanyak memiliki luas rumah sebesar 36 m².

4.3.8. Kendaraan

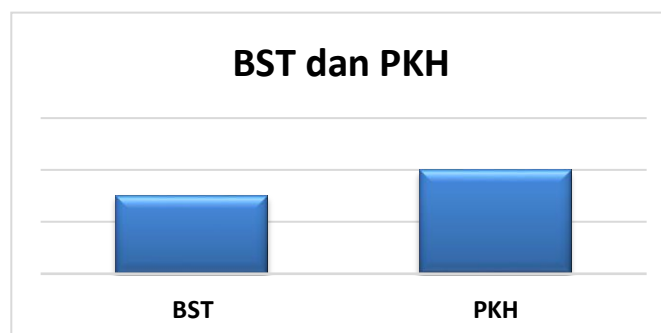
Responden terbanyak di Kecamatan Girimaya memiliki kendaraan pribadi berupa motor yaitu sebesar 71,43 persen atau sebanyak 5 responden dan hanya 2 orang responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa responden yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 hanya sejumlah 1 responden, dengan nilai kisaran harga motor 6 juta.

4.3.9. Bantuan Sosial

Tabel 4.21. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Girimaya

Jenis Bantuan Sosial	Nominal/ Tahun	Jumlah
BST	Rp. 3.600.000	3
PKH	Rp. 2.400.000	4
Total		7

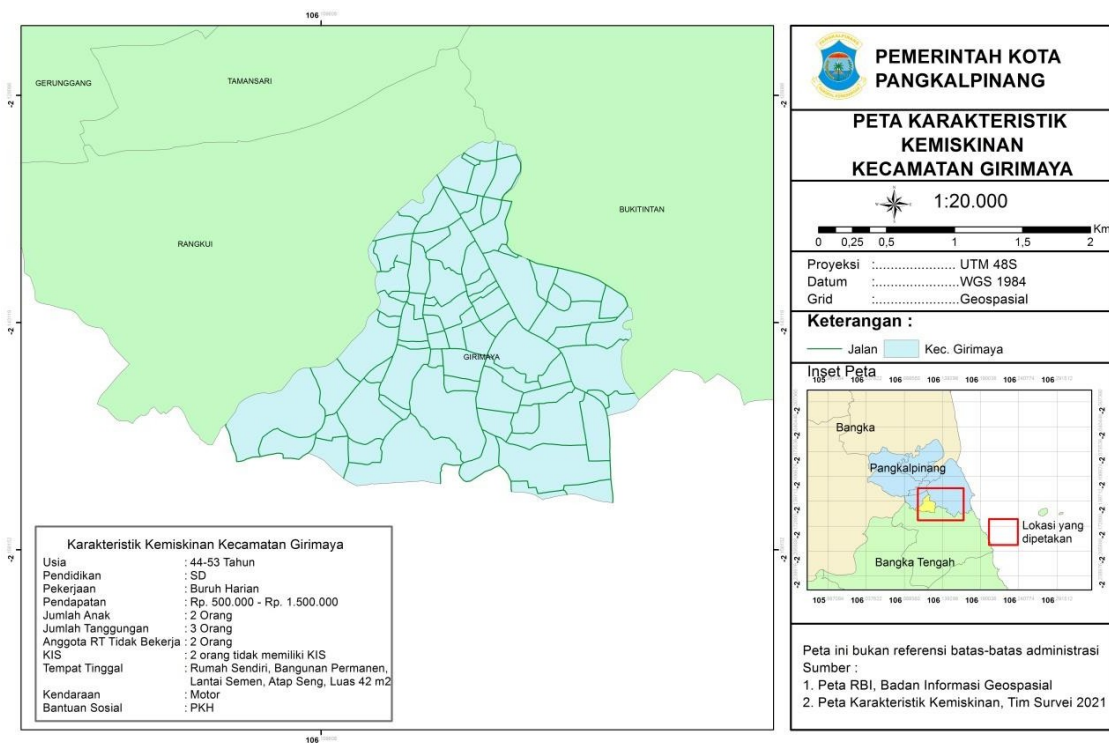
Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.24. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Girimaya

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan hasil survei, responden yang berada di Kecamatan Girimaya mendapatkan dua jenis bantuan sosial yaitu BST dan PKH. Sebanyak 3 responden memperoleh BST dan 4 responden lainnya mendapat PKH. Semua responden menyatakan bahwa bantuan yang diterima memberikan manfaat bagi perekonomian keluarga dan bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Responden mengharapkan agar bantuan dapat diterima secara berkelanjutan.



Gambar 4.25. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Girimaya

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan Peta Karakteristik Kecamatan Girimaya, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berada pada range Usia 44-53 tahun, tingkat pendidikan terbanyak yaitu SD, pekerjaan terbanyak adalah buruh harian, pendapatan terbanyak berkisar Rp 500.000- Rp 1.500.000. Dengan jumlah anak per-KK terbanyak yaitu 2 orang dan jumlah tanggungan terbanyak yaitu 3 orang serta Anggota RT tidak bekerja terbanyak yaitu 2 orang, dan terdapat 2 orang yang tidak memiliki KIS. Para responden juga banyak memiliki rumah sendiri dengan bangunan permanen, lantai semen, atap seng, dan luas 42 m². Kendaraan yang banyak dimiliki yaitu motor serta bantuan sosial yang banyak didapatkan adalah PKH.

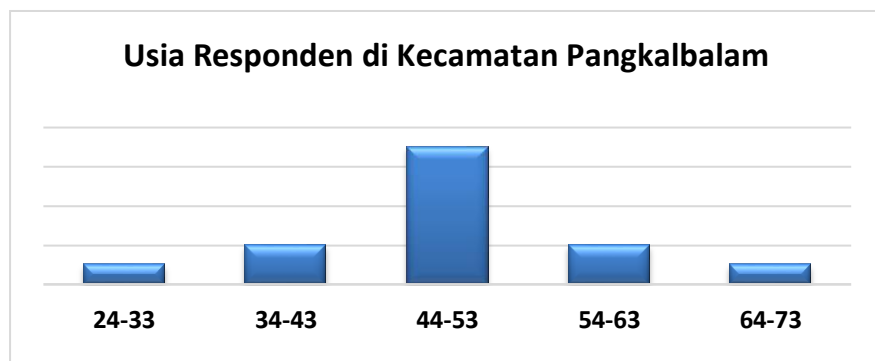
4.5. KECAMATAN PANGKALBALAM

4.5.1. Usia

Tabel 4.22. Usia Responden di Kecamatan Pangkalbalam

Range Usia	Jumlah	Persentase
24-33	1	7,69%
34-43	2	15,38%
44-53	7	53,85%
54-63	2	15,38%
64-73	1	7,69%
Total	13	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.26. Usia Responden di Kecamatan Pangkalbalam

Sumber: Survei, 2021

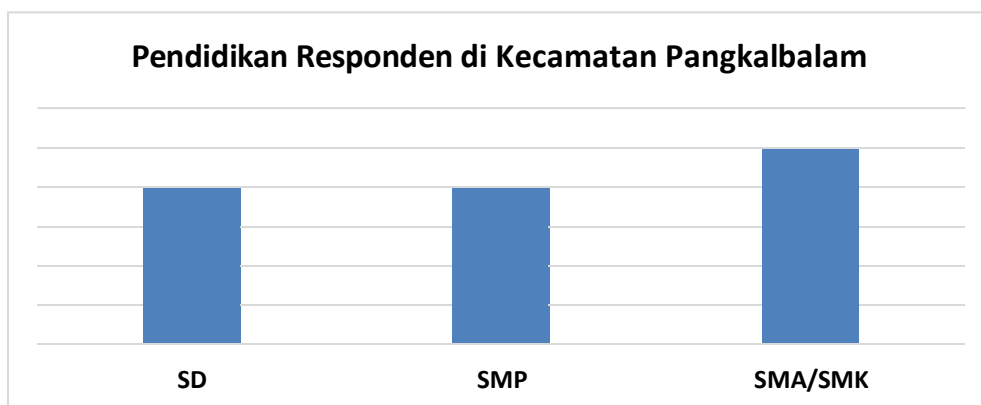
Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa Usia responden yang berada di Kecamatan Pangkal Balam terbanyak sebesar 53,85 persen berada pada range 44-53 tahun atau sebanyak 7 responden.

4.5.2. Pendidikan

Tabel 4.23. Pendidikan Responden di Kecamatan Pangkalbalam

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	4	30,77%
SMP	4	30,77%
SMA/SMK	5	38,46%
Total	13	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.27. Pendidikan Responden di Kecamatan Pangkalbalam

Sumber: Survei, 2021

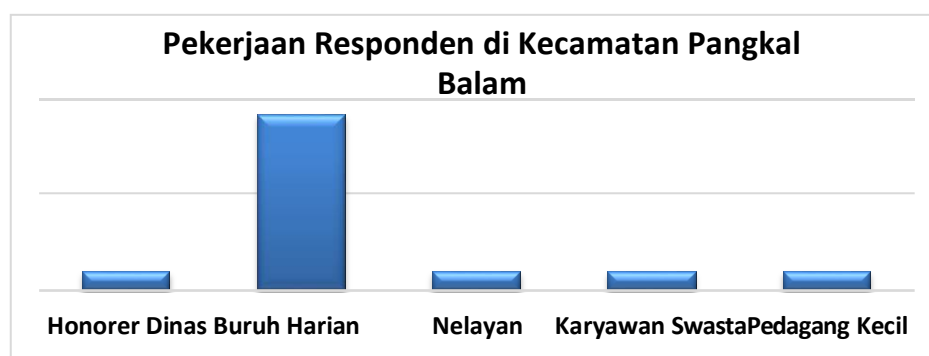
Pendidikan responden di Kecamatan Pangkal Balam terbanyak merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebesar 38,46 persen atau sebanyak 5 orang. Sisanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) masing-masing sebanyak 4 orang.

4.5.3. Pekerjaan

Tabel 4.24. Pekerjaan Responden di Kecamatan Pangkal Balam

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Honorar Dinas	1	7,69%
Buruh Harian	9	69,23%
Nelayan	1	7,69%
Karyawan Swasta	1	7,69%
Pedagang Kecil	1	7,69%
Total	13	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.28. Pekerjaan Responden di Kecamatan Pangkal Balam

Sumber: Survei, 2021

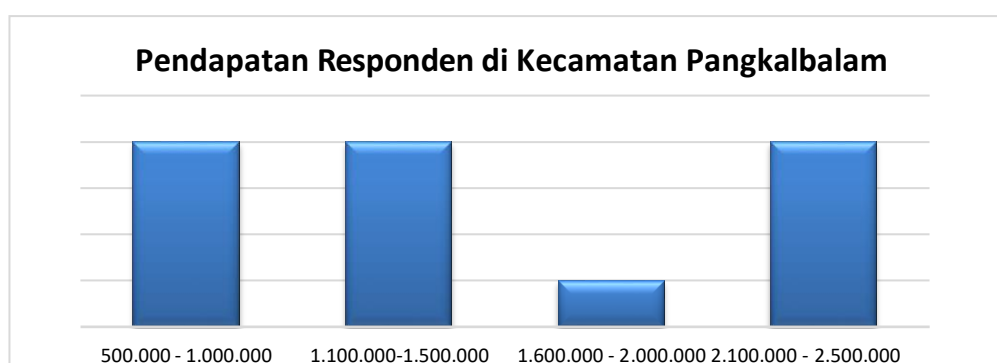
Hasil survei menunjukkan bahwa pekerjaan responden yang berada di Kecamatan Pangkal Balam terbanyak sebesar 69,23 persen atau sebanyak 9 responden bekerja sebagai buruh harian, kemudian sisanya masing-masing sebesar 7,69 persen sebagai honorar, nelayan, karyawan swasta, dan pedagang kecil. Kondisi ini menunjukkan hampir sebagian besar responden bekerja pada sektor informal. Hanya dua responden saja yang bekerja di sektor formal sebagai honorar dan karyawan swasta, namun untuk posisinya juga hanya sebagai pegawai tidak tetap. Semua responden tidak memiliki penghasilan tambahan dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga mereka hanya mengandalkan dari hasil pekerjaan utama atau dari hasil tambahan pendapatan anggota rumah tangga lainnya yang bekerja.

4.5.4. Pendapatan

Tabel 4.25. Pendapatan Responden di Kecamatan Pangkal Balam

Pendapatan	Jumlah	Persentase
Rp. 500.000 -Rp. 1.000.000	4	30,77%
Rp. 1.100.000- Rp. 1.500.000	4	30,77%
Rp. 1.600.000 -Rp. 2.000.000	1	7,69%
Rp. 2.100.000 -Rp. 2.500.000	4	30,77%
Total	13	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.29. Pendapatan Responden di Kecamatan Pangkal Balam

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan survei dari 19 responden di Kecamatan Pangkal Balam penghasilan responden terbanyak adalah kisaran Rp.500.000 – Rp. 1.000.000, kisaran Rp 1.100.000-1.500.000 dan kisaran Rp. 2.100.000 –Rp. 2.500.000 dengan jumlah responden masing- masing sebanyak 4 responden.

4.5.5. Jumlah Tanggungan

Berdasarkan hasil survei di lapangan, responden terbanyak yang berada di Kecamatan Pangkal Balam memiliki 3 anak dengan persentase sebesar 53,85 persen atau sebanyak 7 responden dari total 13 responden. Kemudian untuk jumlah setiap penghuni rumah terbanyak adalah 5 jiwa dengan jumlah sebanyak 4 responden. Dengan tingkat jumlah penghuni terbanyak yang tidak bekerja sebanyak 3 dan 4 orang dari masing-masing 4 responden, sehingga tingkat tanggungannya pun terkategori cukup tinggi.

4.5.6. Kesehatan

Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh anggota keluarga dari responden yang disurvei dalam kondisi sehat, sehingga tidak ada yang memerlukan perawatan rutin. Dari 13 responden yang diwawancarai, sebanyak 92,31 persen atau sebanyak 12 responden yang telah memiliki fasilitas kesehatan berupa KIS, dan hanya terdapat 1 responden yang memiliki asuransi kesehatan mandiri dengan biaya Rp 175.000 perbulan.

4.5.7. Tempat Tinggal

Keseluruhan responden di Kecamatan Pangkal Balam itu sebanyak 13 responden memiliki rumah dengan status kepemilikan rumah sendiri dengan responden dengan jumlah terbanyak tinggal selama 21-40 tahun. Dengan atap rumah berupa seng dan lantai rumah berupa semen dan keramik. Luas rumah responden paling kecil berukuran 30m² dan paling luas 108 m².

4.5.8. Kendaraan

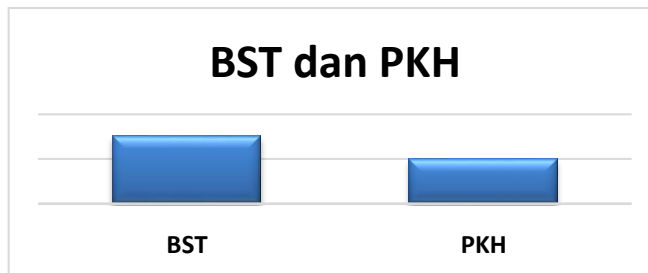
Responden terbanyak di Kecamatan Pangkal Balam memiliki kendaraan pribadi berupa motor yaitu sebesar 92,31 persen atau sebanyak 12 responden dan hanya 1 orang responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa responden yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 hanya sejumlah 6responden, dengan nilai kisaran harga motor Rp.5.000.000 –Rp. 10.000.000.

4.5.9. Bantuan Sosial

Tabel 4.26. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Pangkal Balam

Jenik Bantuan Sosial	Nominal/ Tahun	Jumlah
BST	Rp. 3.600.000	7
	Rp. 1.200.000	1
	Rp. 2.400.000	4
	Rp. 3.200.000	1
Total		13

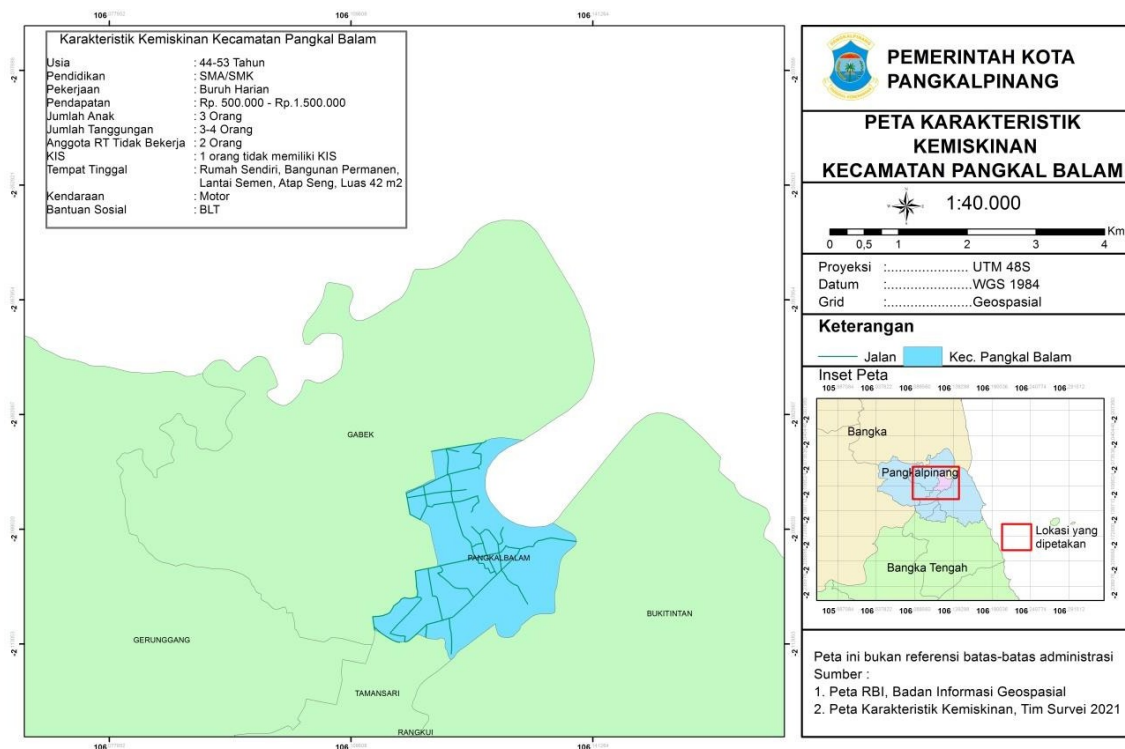
Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.30. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Pangkal Balam

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan hasil survei, responden yang berada di Kecamatan Pangkal Balam mendapatkan dua jenis bantuan sosial yaitu BST dan PKH. Sebanyak 7 responden memperoleh BST dan 6 responden lainnya mendapat PKH. Semua responden menyatakan bahwa bantuan yang diterima memberikan manfaat bagi perekonomian keluarga dan bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Responden mengharapkan agar bantuan dapat diterima secara berkelanjutan.



Gambar 4.31. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Pangkal Balam

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan Peta Karakteristik Kecamatan Pangkal Balam, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berada pada range Usia 44-53 tahun, tingkat pendidikan terbanyak yaitu SMA/SMK, pekerjaan terbanyak adalah buruh harian, pendapatan terbanyak berkisar Rp

500.000- Rp 1.500.000. Dengan jumlah anak per-KK terbanyak yaitu 3 orang dan jumlah tanggungan terbanyak yaitu 3-4 orang serta Anggota RT tidak bekerja terbanyak yaitu 2 orang, dan terdapat 1 orang yang tidak memiliki KIS. Para responden juga banyak memiliki rumah sendiri dengan bangunan permanen, lantai semen, atap seng dan luas 42 m². Kendaraan yang banyak dimiliki yaitu motor serta bantuan sosial yang banyak didapatkan adalah BST.

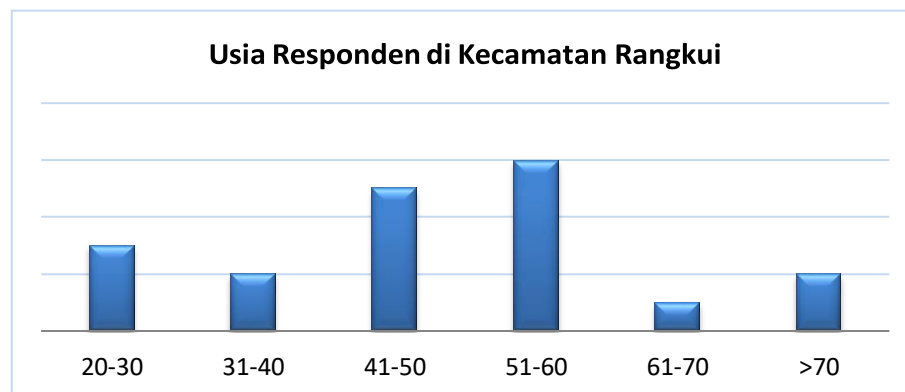
4.6. KECAMATAN RANGKUI

4.6.1. Usia

Tabel 4.27. Usia Responden di Kecamatan Rangkui

Range Usia	Jumlah	Persentase
20-30	3	15,79%
31-40	2	10,53%
41-50	5	26,32%
51-60	6	31,58%
61-70	1	5,26%
>70	2	10,53%
Total	19	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.32. Usia Responden di Kecamatan Rangkui

Sumber: Survei, 2021

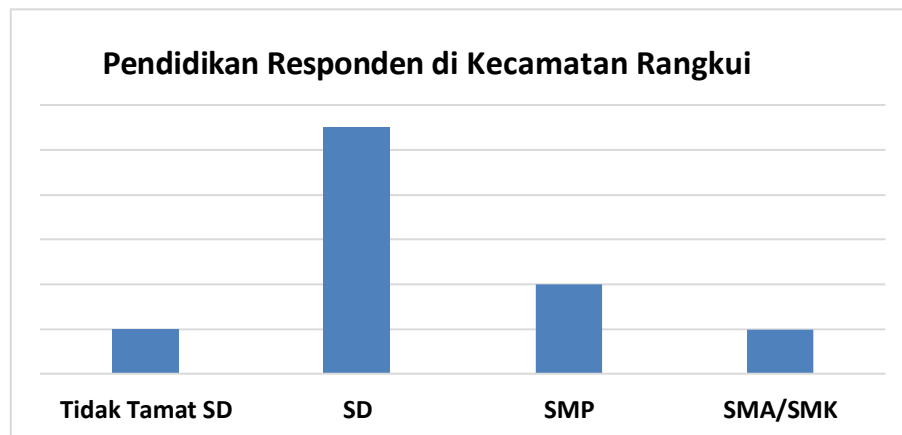
Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa Usia responden yang berada di Kecamatan Rangkui terbanyak sebesar 31,58 persen berada pada range 51-60 tahun atau sebanyak 6 responden. Dengan Usia responden termuda yaitu 22 tahun dan yang tertua 70 tahun.

4.6.2. Pendidikan

Tabel 4.28. Pendidikan Responden di Kecamatan Rangkui

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak Tamat SD	2	10,53%
SD	11	57,89%
SMP	4	21,05%
SMA/SMK	2	10,53%
Total	19	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.33. Pendidikan Responden di Kecamatan Rangkui

Sumber: Survei, 2021

Pendidikan responden di Kecamatan Rangkui terbanyak merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 57,89 persen atau sebanyak 11 orang. Sisanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 4 responden, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2 responden dan bahkan terdapat 2 responden yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD).

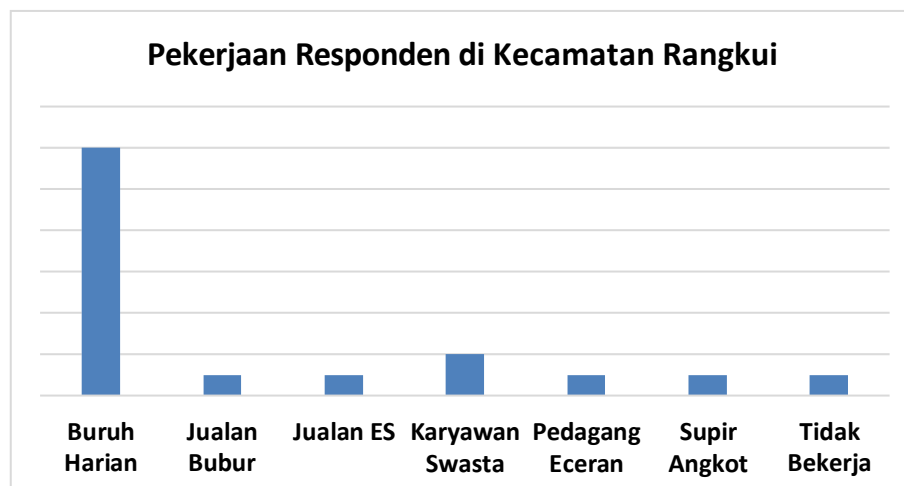
4.6.3. Pekerjaan

Tabel 4.29. Pekerjaan Responden di Kecamatan Rangkui

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Buruh Harian	12	63,16%
Jualan Bubur	1	5,26%
Jualan ES	1	5,26%
Karyawan Swasta	2	10,53%
Pedagang Eceran	1	5,26%

Supir Angkot	1	5,26%
Tidak Bekerja	1	5,26%
Total	19	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.34. Pekerjaan Responden di Kecamatan Rangkui

Sumber: Survei, 2021

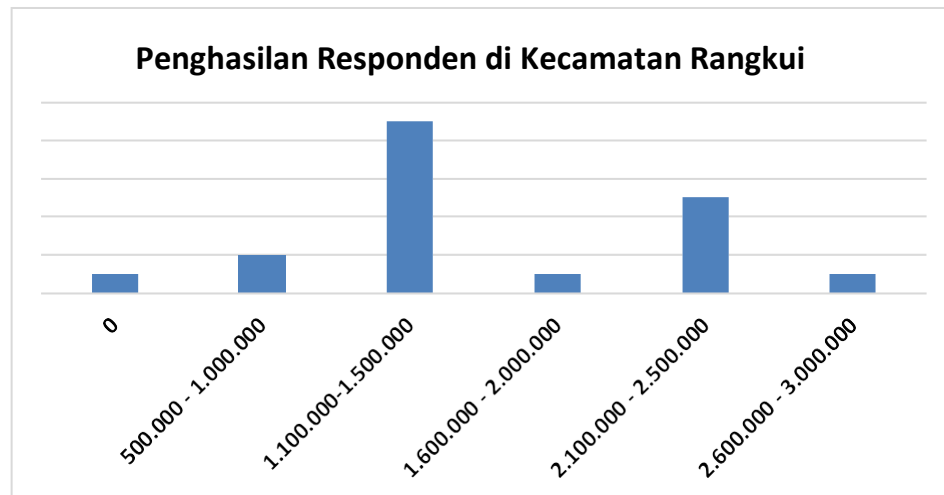
Hasil survei menunjukkan bahwa pekerjaan responden yang berada di Kecamatan Rangkui terbanyak sebesar 63,16 persen atau sebanyak 12 responden bekerja sebagai buruh harian, kemudian sisanya masing-masing sebagai pedagang bubur dan es, pedagang eceran, karyawan swasta, supir angkot dan terdapat 1 responden yang tidak bekerja. Untuk responden yang tidak bekerja saat ini hanya mengandalkan dari anggota keluarga lainnya yang bekerja hanya sebagai buruh lepas yang jumlah penghasilannya juga tidak tetap.

4.6.4. Pendapatan

Tabel 4.30. Pendapatan Responden di Kecamatan Rangkui

Penghasilan	Jumlah	Persentase
Tidak berpenghasilan	1	5,26%
Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	2	10,53%
Rp. 1.100.000- Rp. 1.500.000	9	47,37%
Rp. 1.600.000 -Rp. 2.000.000	1	5,26%
Rp. 2.100.000 -Rp. 2.500.000	5	26,32%
Rp. 2.600.000 -Rp. 3.000.000	1	5,26%
Total	19	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.35. Pendapatan Responden di Kecamatan Rangkui

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan survei dari 19 responden di Kecamatan Rangkui penghasilan responden terbanyak adalah kisaran Rp.1.100.000 –Rp. 1.500.000 dengan jumlah responden sebanyak 9 orang atau sebesar 47,37 persen. Pendapatan tertinggi responden berada pada kisaran Rp. 2.600.000 – Rp. 3.000.000 dan terdapat satu responden yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Responden yang tidak memiliki pendapatan dikarenakan baru saja diberhentikan dari pekerjaannya sebelumnya, sehingga saat ini sedang dalam upaya untuk mencari pekerjaan baru.

4.6.5. Jumlah Tanggungan

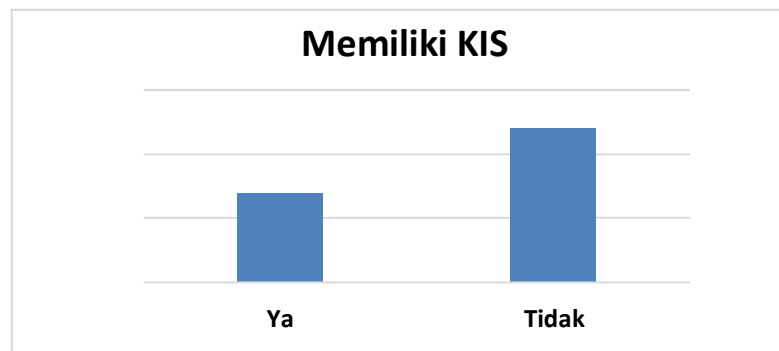
Berdasarkan hasil survei dilapangan, responden terbanyak yang berada di Kecamatan Rangkui memiliki 1 anak dan 2 anak dengan persentase masing-masing sebesar 26,32 persen atau sebanyak 5 responden dari total 19 responden. Untuk jumlah setiap penghuni rumah terbanyak adalah 8 jiwa dengan jumlah sebanyak 1 responden. Dengan tingkat jumlah penghuni terbanyak yang tidak bekerja sebanyak 6 orang dari 1 responden, sehingga tingkat tanggungannya pun terkategori cukup tinggi.

4.6.6. Kesehatan

Tabel 4.31. Kesehatan Responden di Kecamatan Rangkui

Memiliki KIS	Jumlah	Persentase
Ya	7	36,84%
Tidak	12	63,16%
Total	19	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.36. Kesehatan Responden di Kecamatan Rangkui

Sumber: Survei, 2021

Dari 19 responden yang diwawancarai, sebanyak 63,16 persen atau sebanyak 12 responden yang tidak memiliki fasilitas kesehatan KIS, sedangkan sisanya hanya sebanyak 7 responden atau sebesar 36,84 persen yang memiliki KIS.

4.6.7. Tempat Tinggal

Responden di Kecamatan Rangkui yaitu sebanyak 9 responden memiliki rumah dengan status kepemilikan rumah sendiri, 4 responden dengan status sewa dan 6 responden menempati rumah orang tua. Kondisi rumah dari responden terbanyak merupakan permanen sebanyak 12 responden, sisanya 6 responden semi permanen dan 1 responden tidak permanen. Responden terbanyak tinggal dengan lama tinggal selama sampai dengan 40 tahun dengan atap rumah berupa seng dan lantai rumah berupa semen dan keramik. Luas rumah paling kecil berukuran 15 m² dan paling luas 300 m².

4.6.8. Kendaraan

Responden terbanyak di Kecamatan Rangkui memiliki kendaraan pribadi berupa motor yaitu sebesar 89,47 persen atau sebanyak 17 responden, 1 orang responden memiliki mobil berupa mobil angkot dikarenakan responden tersebut bekerja sebagai supir angkot dan

terdapat 2 orang responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi menggunakan transportasi umum untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa responden yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 sejumlah 5 responden, dengan nilai kisaran harga motor 4juta sedangkan untuk kendaraan berupa mobil angkot kisaran harga sekitar 20 juta.

4.6.9. Bantuan Sosial

Tabel 4.32. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Rangkui

Jenik Bantuan Sosial	Nominal	Jumlah
BST	Rp. 3.600.000	9
PKH	Rp. 1.560.000	1
	Rp. 2.400.000	6
	Rp. 4.200.000	1
	Rp. 6.900.000	1
KUBE	Rp. 2.000.000	1
Total		19

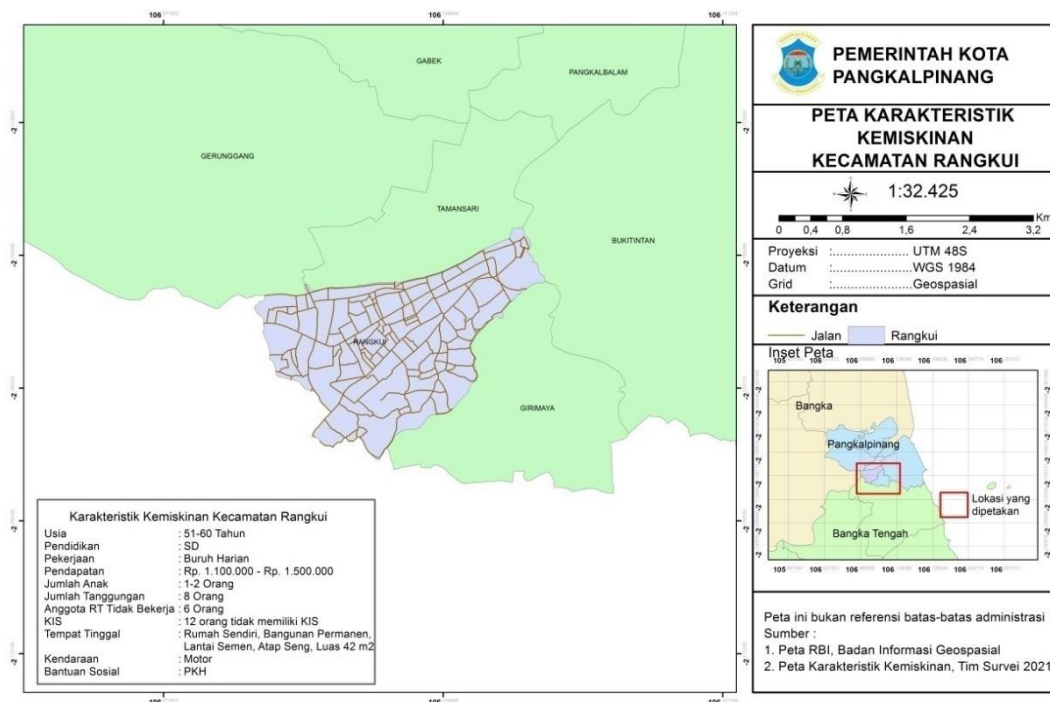
Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.37. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Rangkui

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan hasil survei, responden yang berada Kecamatan Rangkuimendapatkan tiga jenis bantuan sosial yaitu BST, PKH dan KUBE. Sebanyak 9 responden memperoleh BST dan 9 responden lainnya mendapat PKH. Selain BST dan PKH terdapat satu jenis bantuan sosial lainnya yaitu Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diperoleh 1 orang responden. Semua responden menyatakan bantuan yang diterima sangat bermanfaat terutama bagi perekonomian keluarga yangdigunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak dan pengembangan usaha. Responden mengharapkan agar bantuan dapat diterima secara kontinu dan berkelanjutan.



Gambar 4.38. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Rangkui

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan Peta Karakteristik Kecamatan Rangkui, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berada pada range Usia 51-60 tahun, tingkat pendidikan terbanyak yaitu SD, pekerjaan terbanyak adalah buruh harian, pendapatan terbanyak berkisar Rp 1.100.000- Rp 1.500.000. Dengan jumlah anak per-KK terbanyak yaitu 1-2 orang dan jumlah tanggungan terbanyak yaitu 8 orang serta Anggota RT tidak bekerja terbanyak yaitu 6 orang dan terdapat 12 orang yang tidak memiliki KIS. Para responden juga banyak memiliki rumah sendiri dengan bangunan permanen, lantai semen, atap seng dan luas 42 m². Kendaraan yang banyak dimiliki yaitu motor serta bantuan sosial yang banyak didapatkan adalah PKH.

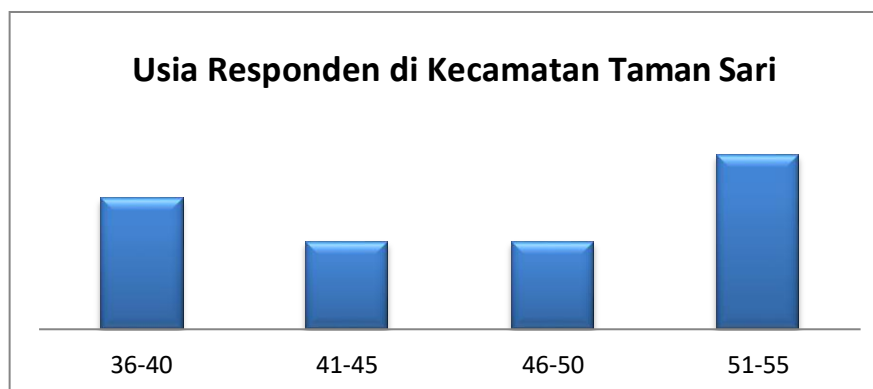
4.7. KECAMATAN TAMAN SARI

4.7.1. Usia

Tabel 4.33. Usia Responden di Kecamatan Taman Sari

Range Usia	Jumlah	Persentase
36-40	3	27,27%
41-45	2	18,18%
46-50	2	18,18%
51-55	4	36,36%
Total	11	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.39. Usia Responden di Kecamatan Taman Sari

Sumber: Survei, 2021

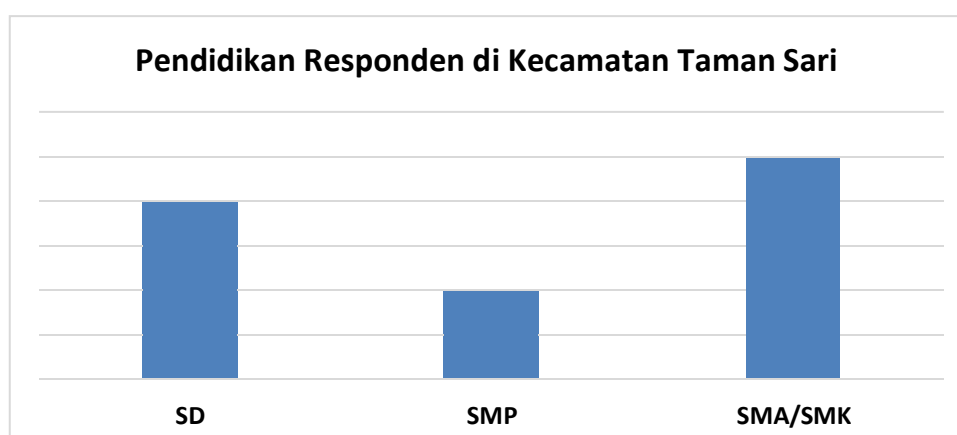
Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa usia responden yang berada di Kecamatan Taman Sari terbanyak sebesar 36,36 persen berada pada range 51-55 tahun atau sebanyak 4 responden. Dengan Usia responden termuda yaitu 36 tahun dan yang tertua 54 tahun.

4.7.2. Pendidikan

Tabel 4.34. Pendidikan Responden di Kecamatan Taman Sari

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	4	36,36%
SMP	2	18,18%
SMA/SMK	5	45,45%
Total	11	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.40. Pendidikan Responden di Kecamatan Taman Sari

Sumber: Survei, 2021

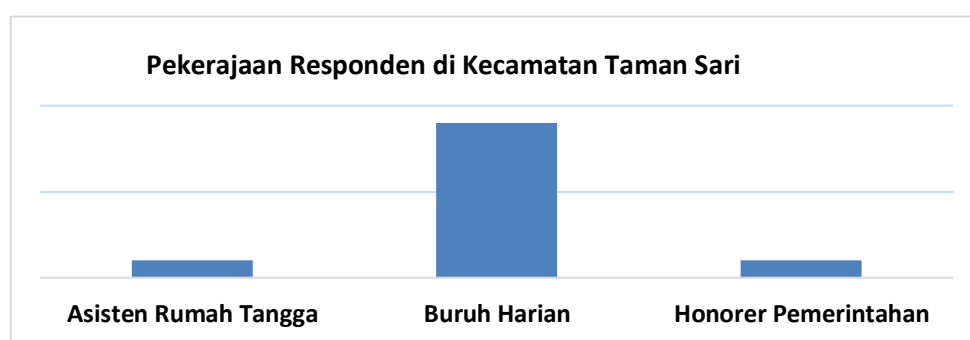
Pendidikan responden di Kecamatan Taman Sari terbanyak merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 45,45 persen atau sebanyak 5 responden, sisanya merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 orang dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2 responden.

4.7.3. Pekerjaan

Tabel 4.35. Pekerjaan Responden di Kecamatan Taman Sari

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Asisten Rumah Tangga	1	9,09%
Buruh Harian	9	81,82%
Honoror Pemerintahan	1	9,09%
Total	11	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.41. Pekerjaan Responden di Kecamatan Taman Sari

Sumber: Survei, 2021

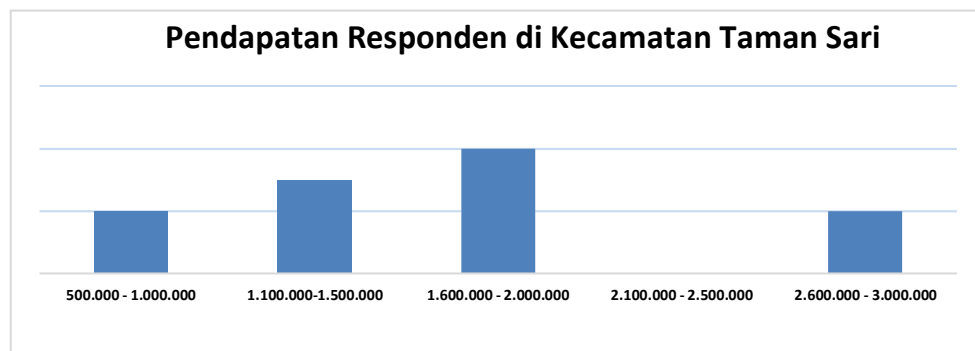
Hasil survei menunjukkan bahwa pekerjaan responden yang berada di Kecamatan Taman Sari terbanyak sebesar 81,82 persen atau sebanyak 9 responden bekerja sebagai buruh harian, kemudian sisanya masing-masing sebagai asisten rumah tangga dan honoror.

4.7.4. Pendapatan

Tabel 4.36. Pendapatan Responden di Kecamatan Taman Sari

Pendapatan	Jumlah	Persentase
Rp. 500.000 –Rp.1.000.000	2	18,18%
Rp. 1.100.000- Rp. 1.500.000	3	27,27%
Rp.1.600.000 –Rp. 2.000.000	4	36,36%
Rp. 2.100.000 –Rp. 2.500.000	0	00,00%
Rp. 2.600.000 –Rp.3.000.000	2	18,18%
Total	11	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.42. Pendapatan Responden di Kecamatan Taman Sari

Sumber: Suvei, 2021

Berdasarkan survei dari 4 responden di Kecamatan Taman Sari penghasilan responden terbanyak adalah kisaran Rp.1.600.000 – Rp. 2.000.000 dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau sebesar 36,36 persen. Pendapatan tertinggi responden berada pada kisaran Rp. 2.600.000 – Rp. 3.000.000 dan pendapatan terendah pada kisaran Rp. 2.600.000 – Rp. 3.000.000.

4.7.5. Jumlah Tanggungan

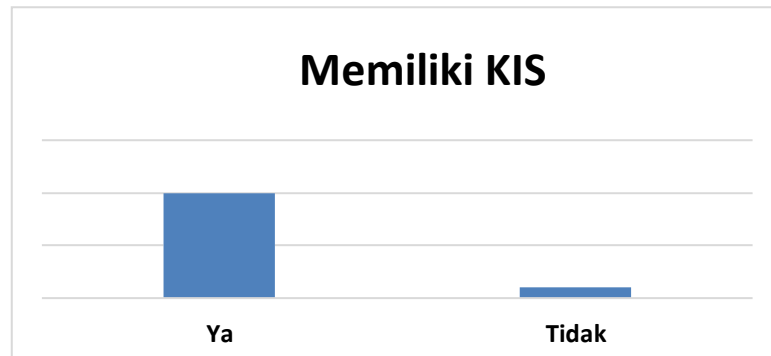
Berdasarkan hasil survei lapangan, responden terbanyak yang berada di Kecamatan Taman Sari memiliki 3 anak dengan persentase sebesar 45,45 persen atau sebanyak 5 responden dari total 11 responden. Untuk jumlah penghuni rumah terbanyak adalah 6 jiwa dengan jumlah sebanyak 2 responden. Dengan tingkat jumlah penghuni terbanyak yang tidak bekerja sebanyak 5 orang dari 1 responden dan jumlah penghuni tidak bekerja sebanyak 4 orang dari 5 responden.

4.7.6. Kesehatan

Tabel 4.37. Kesehatan Responden di Kecamatan Taman Sari

Memiliki KIS	Jumlah	Persentase
Ya	10	90,91%
Tidak	1	9,09%
Total	11	100,00%

Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.43. Kesehatan Responden di Kecamatan Taman Sari

Sumber: Survei, 2021

Dari 11 responden yang diwawancarai, sebanyak 90,91 persen atau sebanyak 10 responden yang memiliki fasilitas kesehatan KIS, sedangkan sisanya 1 responden atau sebesar 9,09 persen yang tidak memiliki KIS.

4.7.7. Tempat Tinggal

Responden di Kecamatan Taman Sari yaitu sebanyak 5 responden memiliki rumah dengan status kepemilikan rumah sendiri, 1 responden dengan status sewa dan 5 responden lainnya menempati rumah orang tua, dengan responden terbanyak tinggal dengan lama tinggal sampai dengan 20 tahun. Kondisi rumah dari responden terbanyak merupakan semi permanen sebanyak 8 responden, sisanya 3 responden permanendengan atap rumah berupa seng sebanyak 10 rumah dan 1 rumah beratapkan genteng dan lantai rumah berupa semen. Luas rumah paling kecil berukuran 20 m² dan paling luas 200 m².

4.7.8. Kendaraan

Keseluruhan responden di Kecamatan Taman Sari memiliki kendaraan pribadi berupamotor sebagai alat transportasi sehari-hari. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa

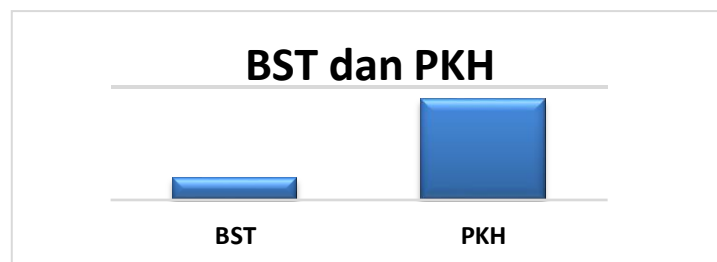
responden yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 sejumlah 3 responden, dengan nilai kisaran harga motor 4-8juta.

4.7.9. Bantuan Sosial

Tabel 4.38. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Taman Sari

Jenik Bantuan Sosial	Nominal	Jumlah
BST	Rp. 3.600.000	2
PKH	Rp. 2.400.000	4
	Rp. 3.000.000	1
	Rp. 3.100.000	1
	Rp. 5.200.000	1
	Rp. 6.000.000	1
	Rp. 8.400.000	1
Total		11

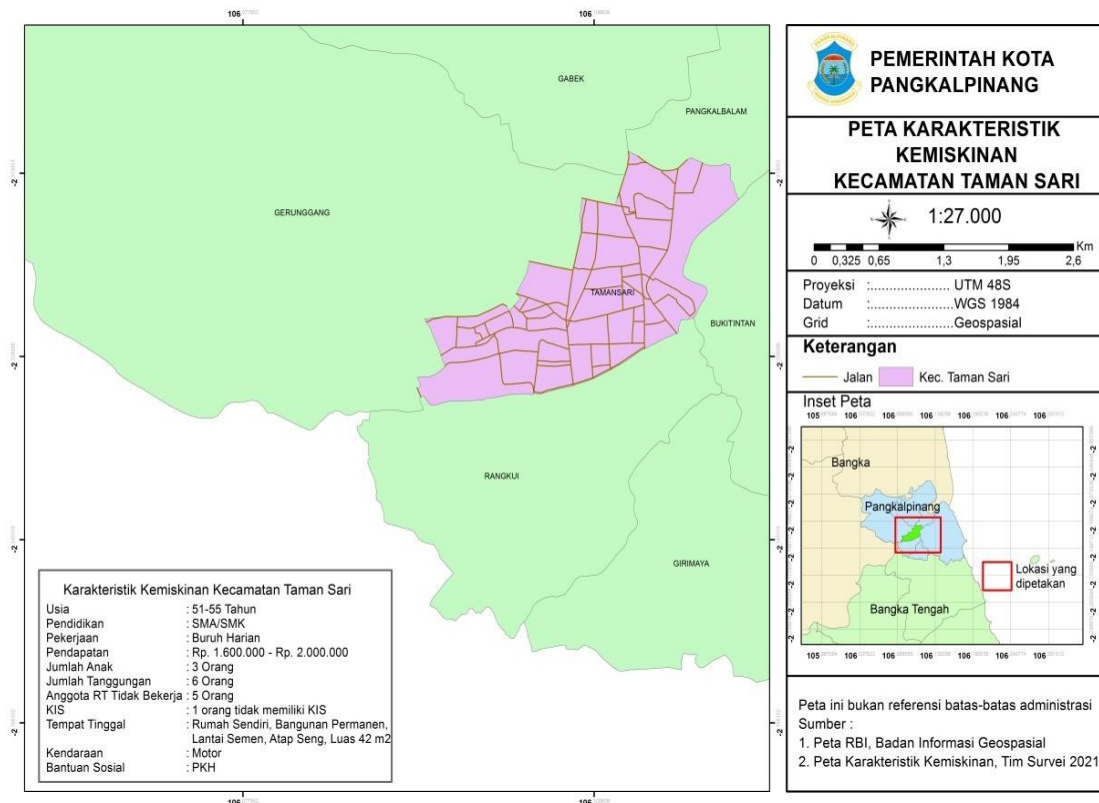
Sumber: Survei, 2021



Gambar 4.44. Bantuan Sosial Responden di Kecamatan Taman Sari

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan hasil survei, responden yang berada di Kecamatan Taman Sari mendapatkan dua jenis bantuan sosial yaitu BST dan PKH. Sebanyak 2 responden memperoleh BST dan 9 responden lainnya mendapat PKH. Semua responden Kecamatan Taman Sari menyatakan bantuan yang diterima sangat bermanfaat terutama bagi perekonomian keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak. Responden mengharapkan agar bantuan dapat diterima secara kontinu dan berkelanjutan.



Gambar 4.45. Peta Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Taman Sari

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan Peta Karakteristik Kecamatan Taman Sari, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berada pada range Usia 51-55 tahun, tingkat pendidikan terbanyak yaitu SMA/SMK, pekerjaan terbanyak adalah buruh harian, pendapatan terbanyak berkisar Rp 1.600.000- Rp 2.000.000. Dengan jumlah anak per-KK terbanyak yaitu 3 orang dan jumlah tanggungan terbanyak yaitu 6 orang serta Anggota RT tidak bekerja terbanyak yaitu 5 orang, dan terdapat 1 orang yang tidak memiliki KIS. Para responden juga banyak memiliki rumah sendiri dengan bangunan permanen, lantai semen, atap seng, dan luas 42 m². Kendaraan yang banyak dimiliki yaitu motor serta bantuan sosial yang banyak didapatkan adalah PKH.

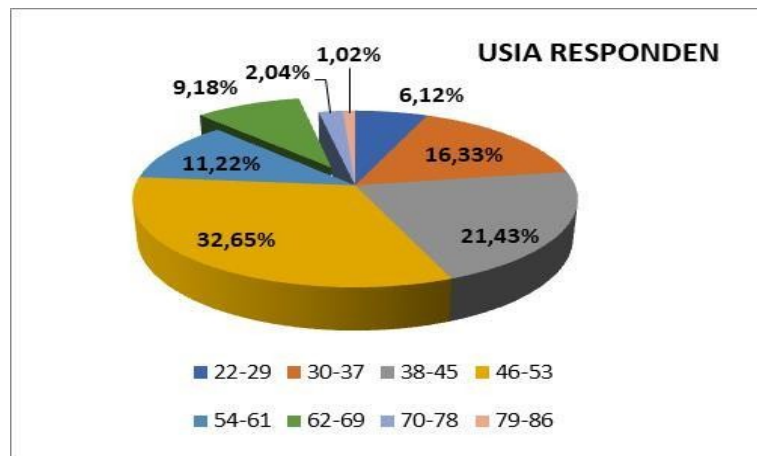
2. KARAKTERISTIK KEMISKINAN KOTA PANGKALPINANG

Berdasarkan hasil survei lapangan diperoleh data bahwa karakteristik Kemiskinan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1) USIA

Range usia responden di Kota Pangkalpinang terbanyak berada pada usia 46-53 tahun yaitu sebesar 32,65 persen atau sebanyak 32 orang dari total responden sebanyak 98 orang. Usia responden termuda adalah 22 tahun dan yang tertua adalah 79 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden penduduk miskin di Kota Pangkalpinang didominasi usia yang

tidak muda lagi, sehingga dengan tingkat pendidikan yang juga rendah kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik sangat kecil dan memperkecil juga kesempatan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

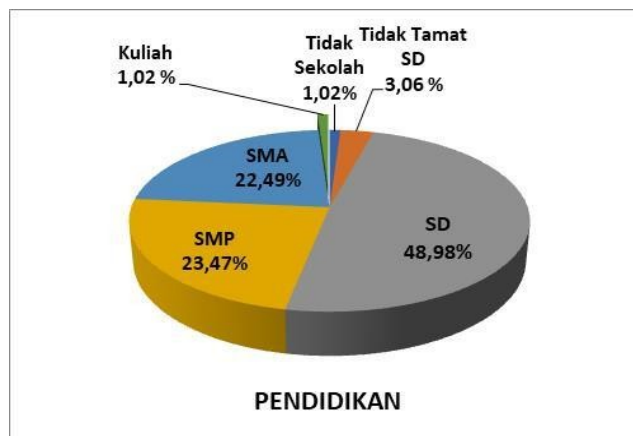


Gambar 4.46. Usia Responden Kota Pangkalpinang

Sumber: Survei, 2021

2) PENDIDIKAN

Pendidikan responden didominasi tamatan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 48,98 persen atau sebanyak 48 orang dari total 98 responden. Berdasarkan hasil survei ditemukan fakta bahwa masih terdapat responden yang tidak tamat SD sebesar 3,06 persen atau sebanyak 3 orang, dan bahkan 1 orang responden yang tidak bersekolah sama sekali.



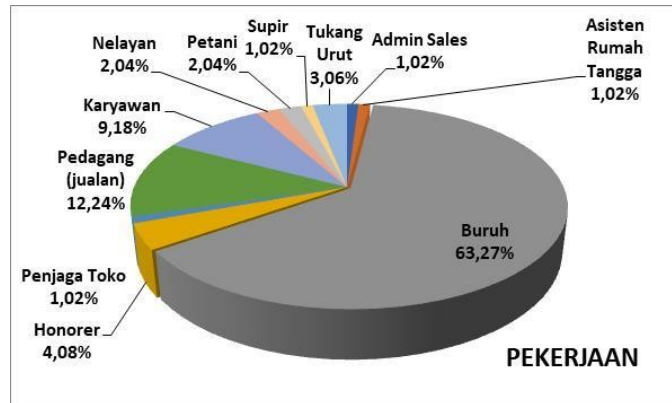
Gambar 4.47. Pendidikan Responden Kota Pangkalpinang

Sumber: Survei, 2021

3) PEKERJAAN

Jika dilihat berdasarkan jenis pekerjaan secara formal dan informal, sebesar 85,71 persen atau sebanyak 84 responden bekerja di sektor informal, sedangkan sisanya 14,29 persen atau sebanyak 14 orang bekerja di sektor formal sebagai karyawan tidak tetap/honorir. Dari total 98 responden yang disurvei diperoleh variasi jenis pekerjaan yaitu sebanyak 13 jenis antara lain sebagai buruh, admin sales, asisten rumah tangga, honorir, karyawan swasta, penjaga

toko, pedagang, supir, tukang urut, nelayan dan petani. Sebagian besar responden yaitu sebesar 63,27 persen atau sebanyak 62 orang bekerja sebagai buruh, kemudian terbanyak kedua responden bekerja sebagai pedagang kecil/berjualan yaitu sebesar 12,24 persen atau sebanyak 12 orang.



Gambar 4.48. Pekerjaan Responden Kota Pangkalpinang

Sumber: Survei, 2021

4) PENDAPATAN

Pendapatan responden bervariasi, mulai dari yang terendah sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan yang tertinggi sebesar Rp. 3.500.000,-. Range pendapatan terbanyak berada di antara Rp. 1.100.000 –Rp. 2.000.000 yaitu sebanyak 45,92 persen atau sebanyak 45 orang.



Gambar 4.49. Pendapatan Responden Kota Pangkalpinang

Sumber: Survei, 2021

5) JUMLAH TANGGUNGAN

Jumlah tanggungan merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu rumah tangga. Semakin banyak jumlah keluarga (jumlah tanggungan) dan apabila tidak didukung dengan tingkat pendapatan yang tinggi maka akan memperburuk kondisi perekonomian rumah tangga. Hasil survei memproksi jumlah tanggungan dari jumlah

anak di setiap rumah tangga. Responden terbanyak memiliki anak sejumlah 3 orang yaitu 37 responden, terbesar berikutnya memiliki anak sebanyak 2 dan 3 anak. Jumlah anak terbanyak yang dimiliki responden yaitu sebanyak 8 orang dengan jumlah responden 3 orang dari 98 responden. Selain dilihat dari jumlah anak, dapat juga dilihat dari berapa jumlah anggota keluarga yang tidak bekerja. Hasil survei menunjukkan bahwa responden terbanyak memiliki anggota keluarga yang tidak bekerja sejumlah 2 orang. Untuk jumlah anggota yang tidak bekerja terbanyak yaitu 6 orang/keluarga yaitu sebanyak 4 responden.

6) KESEHATAN

Responden di Kota Pangkalpinang sebagian besar yaitu 76,53 persen atau sebanyak 75 orang telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai bentuk fasilitas kesehatannya. Sisanya 23,47 persen atau sebanyak 23 orang masih belum memiliki fasilitas kesehatan KIS. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya fasilitas kesehatan KIS sebagai bentuk asuransi kesehatan. Alasan terbanyak dari responden adalah kepengurusan administrasi pembuatan KIS yang dianggap sulit, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana proses pembuatan kartu KIS.



Gambar 4.50. Jumlah KIS Responden Kota Pangkalpinang

Sumber: Survei, 2021

7) TEMPAT TINGGAL

Responden di Kota Pangkalpinang sebesar 70,41 persen atau sebanyak 69 responden memiliki tempat tinggal dengan status rumah sendiri. Selain itu rumah responden didominasi oleh bangunan permanen beratap seng dan lantai semen. Dengan luas rumah paling kecil yaitu 15 m² dan terbesar 300m², sebagian besar responden memiliki rumah berukuran 42m²

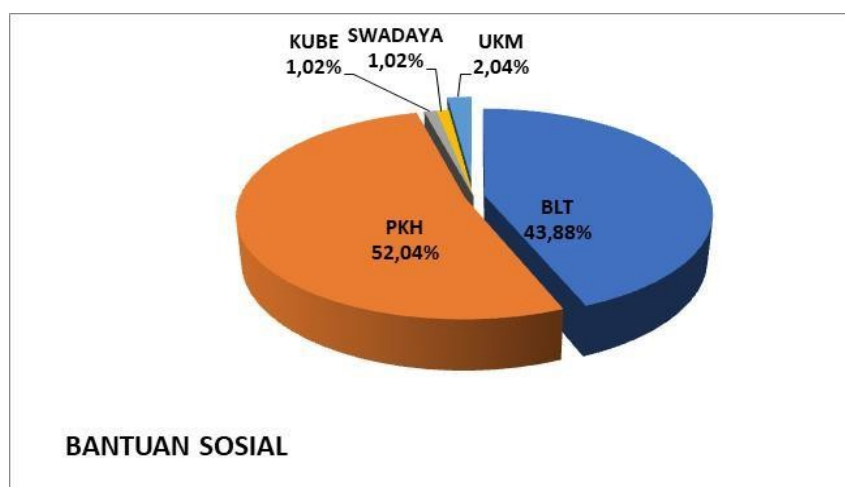
8) KENDARAAN

Sebesar 88,78 persen atau sebanyak 87 responden memiliki kendaraan pribadi sebagai alat transportasi yang digunakan sehari-hari, sisanya sebesar 11,22 persen atau sebanyak 11 orang tidak memiliki kendaraan dan menggunakan kendaraan umum seperti angkot sebagai alat

transportasi sehari-hari. Jenis kendaraan yang dimiliki responden sebanyak 86 responden adalah motor dan 1 responden adalah mobil berupa mobil angkot yang dijadikan sumber pendapatannya. Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 30 responden memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 motor dengan kisaran harga 3-6 juta.

9) BANTUAN SOSIAL

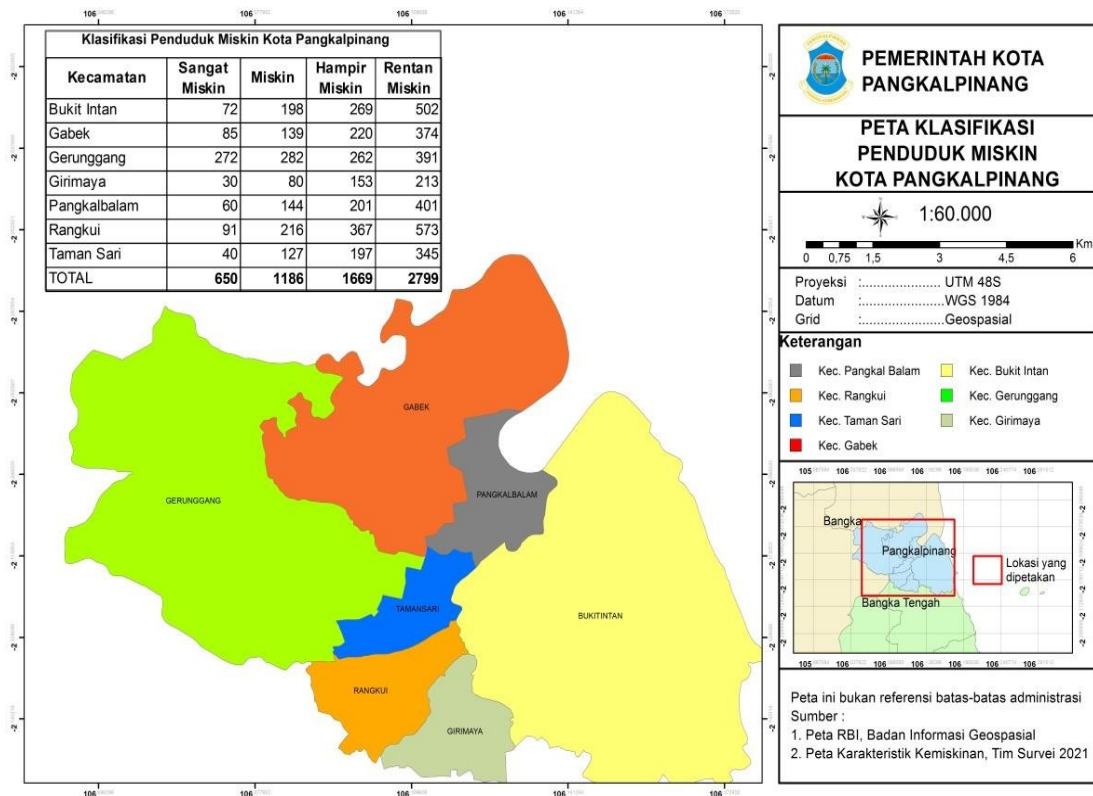
Semua responden di Kota Pangkalpinang memperoleh bantuan sosial yang disalurkan pemerintah. Terdapat 5 jenis bantuan sosial yang diterima responden yaitu, Bantuan Langsung Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Rumah Swadaya. Bantuan yang diterima responden di Kota Pangkalpinang terdiri dari bantuan PKH yaitu sebesar 52,04 persen atau sebanyak 51 orang, bantuan BST sebesar 43,88 persen atau sebanyak 43 orang, bantuan rumah swadaya sebesar 2,04 persen atau sebanyak 2 orang dan sisanya bantuan KUBE dan BST masing-masing sebesar 1,02 persen atau sebanyak 1 orang. Hasil wawancara menyatakan bahwa bantuan yang diberikan ini sangat bermanfaat bagi tambahan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari responden, dan mereka mengharapkan bantuan ini dapat diterima secara berkelanjutan.



Gambar 4.51. Bantuan Sosial Responden Kota Pangkalpinang

Sumber: Survei, 2021

3. PETA KARAKTERISTIK KEMISKINAN KOTA PANGKALPINANG



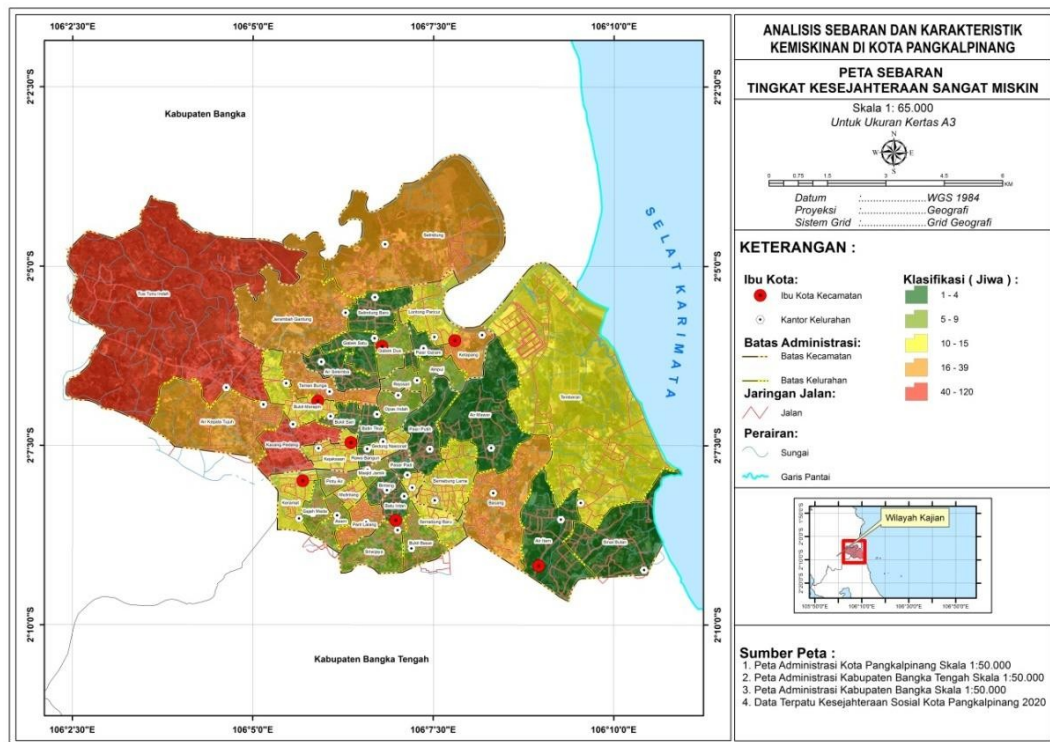
Gambar 4.52. Peta Klasifikasi Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan analisis data diatas, maka klasifikasi penduduk miskin di Kota Pangkalpinang dapat dijelaskan bahwa, jumlah penduduk sangat miskin terbanyak berada di Kecamatan Gerunggang sebanyak 272 KK, begitu juga dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kecamatan Gerunggang dengan jumlah 282 KK, disusul oleh Kecamatan Rangkui dengan jumlah penduduk hampir miskin terbanyak yaitu 367 KK dan 573 KK yang termasuk ke dalam penduduk rentan miskin terbanyak yang berada di Kecamatan Rangkui.

4. ANALISIS SEBARAN KEMISKINAN KOTA PANGKALPINANG

Berikut merupakan peta sebaran tingkat kesejahteraan di Kota Pangkalpinang yang terbagi menjadi ; sangat miskin, miskin, rentan miskin, hampir miskin, serta kelas menengah. Gambar ini merupakan peta sebaran tingkat kesejahteraan sangat miskin di Kota Pangkalpinang, dapat dilihat dibawah ini:

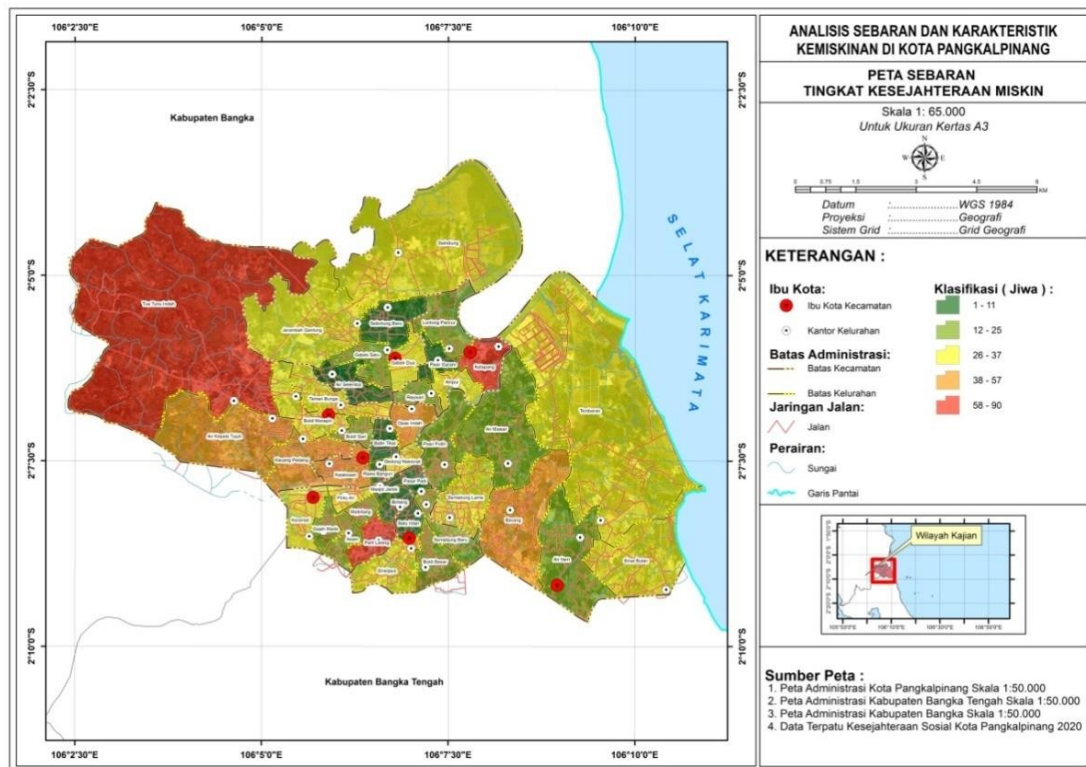


Gambar 4.53. Peta Sebaran Tingkat Kesejahteraan Sangat Miskin

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan sangat miskin yaitu Tuatunu Indah dan Kacang Pedang dengan jumlah klasifikasi 40-120 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Air Kepala Tujuh, Jerambah Gantung, Selindung, Taman Bunga, Ketapang, Parit Lalang, dan Bacang dengan jumlah klasifikasi 16-39 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Bukit Merapin, Lontong Pancur, Kejaksan, Keramat, Melintang, Gedung Nasional, Semabung Lama, Semabung Baru, dan Temberan dengan jumlah klasifikasi 10-15 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Gabek Dua, Rejosari, Ampui, Opas Indah, Pintu Air, Gajah Mada, Asam, Masjid Jamik, Sriwijaya dan Bukit Besar dengan jumlah klasifikasi 5-9 jiwa. Dan yang terakhir yaitu Kelurahan Selindung Baru, Gabek Satu, Air Salemba, Bukit Sari, Batin Tikal, Rawa Bangun, Bintang, Batu Intan, Pasar Padi, Pasir Putih, Air Mawar, Pasir Garam, Air Itam, dan Sinar Bulan dengan jumlah klasifikasi 1-4 jiwa.

Gambar ini merupakan peta sebaran tingkat kesejahteraan miskin di Kota Pangkalpinang, dapat dilihat dibawah ini:

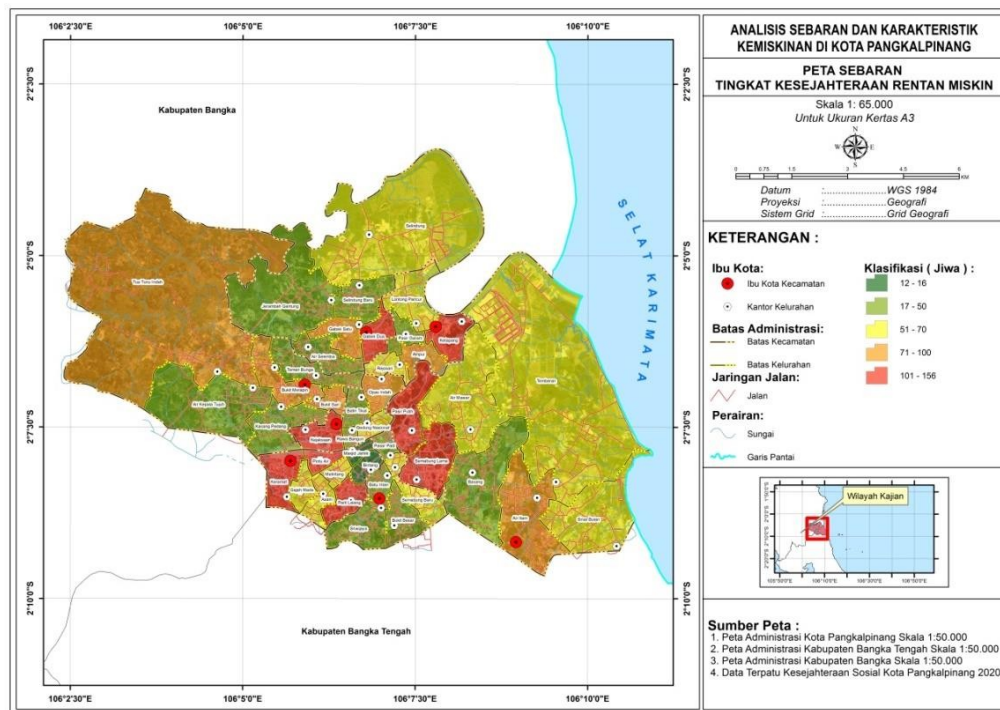


Gambar 4.54. Peta Sebaran Tingkat Kesejahteraan Miskin

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan miskin yaitu Tua Tunu Indah, Ketapang dan Parit Lalang dengan jumlah klasifikasi 58-90 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kacang Pedang, Opas Indah, Kejaksan, dan Bacang dengan jumlah klasifikasi 38-57 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Temberan, Sinar Bulan, Semabung Lama, Ampui, Jerambah Gantung, Keramat, Pintu Air, Selindung, Taman Bunga, Bukit Merapin, Gabek Dua, Sriwijaya, dan Gedung Nasional dengan jumlah klasifikasi 26-37 jiwa. Kemudian disusul oleh Lontong Pancur, Gabek Satu, Rejosari, Air Mawar, Pasir Putih, Bukit Sari, Gajah Mada, Asam, Semabung Baru, Bukit Besar, dan Melintang dengan jumlah klasifikasi 12-25 jiwa. Dan yang terakhir yaitu Selindung Baru, Pasir Garam, Air Selemba, Batin Tikal, Rawa Bangun, Pasir Padi, Masjid Jamik, dan Bintang dengan jumlah klasifikasi 1-11 jiwa.

Gambar ini merupakan peta sebaran tingkat kesejahteraan rentan miskin di Kota Pangkalpinang, dapat dilihat dibawah ini:

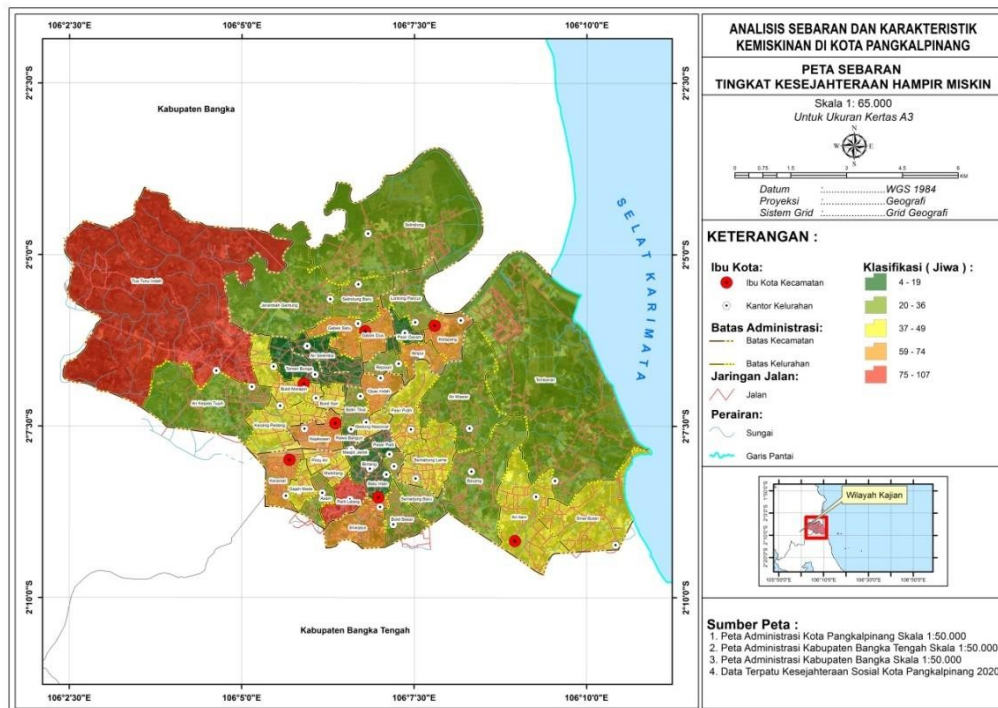


Gambar 4.55. Peta Sebaran Tingkat Kesejahteraan Rentan Miskin

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan rentan miskin yaitu Ketapang, Gabek Dua, Pasir Putih, Semabung Lama, Kejaksaan, Pintu Air, Keramat dan Parit Lalang dengan jumlah klasifikasi 101-156. Kemudian disusul oleh Kelurahan Tua Tunu indah, Gabek Satu, Bukit Merapin, Bukit Sari, Opas Indah dan Air Itam dengan jumlah klasifikasi 71-100 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Selindung, Lontong Pancur, Temberan, Air Mawar, Sinar Bulan, Rejosari, Gedung Nasional, Melintang, Gajah Mada, Asam dan Semabung Baru dengan jumlah klasifikasi 51-70 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Jerambah Gantung, Selindung Baru, Taman Bunga, Air Selemba, Batin Tikal, Rawa Bangun, Pasir Garam, Pasar Padi, Bacang, Batu Intan, Bukit Besar, Sriwijaya, Kacang Pedang, dan Air Kepala Tujuh dengan jumlah klasifikasi 17-50 jiwa. Dan yang terakhir yaitu Masjid Jamik dan Bintang dengan jumlah klasifikasi 12-16 jiwa.

Gambar ini merupakan peta sebaran tingkat kesejahteraan hampir miskin di Kota Pangkalpinang, dapat dilihat dibawah ini:

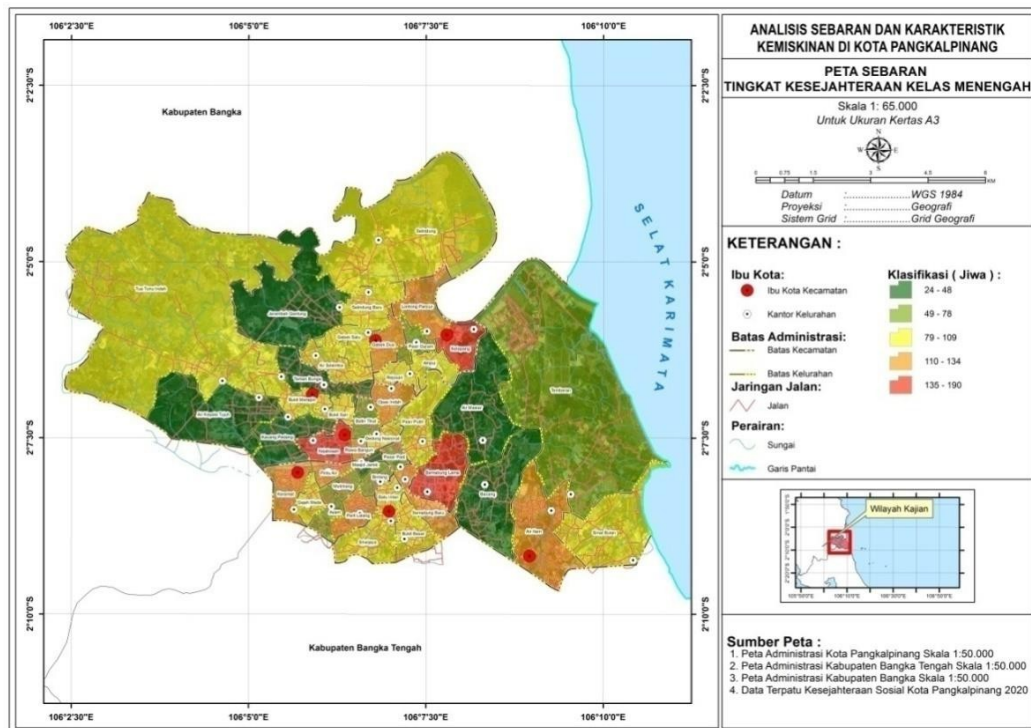


Gambar 4.56. Peta Sebaran Tingkat Kesejahteraan Hampir Miskin

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa Kelurahan yang hampir miskin yaitu Tua Tunu Indah dan Parit Lalangdengan jumlah klasifikasi 75-107 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Gabek Satu, Gabek Dua, Ketapang, Ampui, Opas Indah, Kejaksaan, Keramat, dan Sriwijaya dengan jumlah klasifikasi 59-74 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Bukit Merapin, Bukit Sari, Kacang Pedang, Gajah Mada, Pintu Air, Melintang, Gedung Nasional, Pasir Putih, Semabung Lama, Air Itam, dan Sinar Bulandengan jumlah klasifikasi 37-49 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Air Kepala Tujuh, Selindung, Jerambah Gantung, Selindung Baru, Lontong Pancur, Rejosari, Batin Tikal, Asam, Bukit Besar, Semabung Baru, Bacang, Air Mawar dan Temberan dengan jumlah klasifikasi 20-36 jiwa. Dan yang terakhir yaitu Kelurahan Taman Bunga, Air Selemba, Pasir Garam, Rawa Bangun, Masjid Jamik, Pasar Padi, Bintang, Batu Intandengan jumlah klasifikasi 4-29 jiwa.

Gambar ini merupakan peta sebaran tingkat kesejahteraan kelas menengah di Kota Pangkalpinang, dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 4.57. Peta Sebaran Tingkat Kesejahteraan Kelas Menengah

Sumber: Survei, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan kelas menengahyaitu Kejaksaan, Ketapang, dan Semabung Lama dengan jumlah klasifikasi 135-190 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Lontong Pancur, Gabek Dua, Opas Indah, Keramat, Pintu Air, Parit Lalang, Semabung Baru, dan Air Itam dengan jumlah klasifikasi 110-134 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Tuatunu Indah, Selindung, Selindung Baru, Gabek Satu, Air Selemba, Rejosari, Ampui, Pasir Putih, Gedung Nasional, Gajah Mada, Bukit Merapin, Bukit Sari, Bukit Intan, Sriwijaya, Bukit Besar, dan Sinar Bulan dengan jumlah klasifikasi 79-109 jiwa. Kemudian disusul oleh Kelurahan Pasir Garam, Pasar Padi, Bintang, Melintang, Asam, Batin Tikal, dan Temberan dengan jumlah klasifikasi 49-78 jiwa. Dan yang terakhir yaitu Kelurahan Jerambah Gantung, Taman Bunga, Air Kepala Tujuh, Kacang Pedang, Air Mawar, dan Bacang dengan jumlah klasifikasi 24-48 jiwa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

KECAMATAN BUKIT INTAN

- Karakteristik penduduk miskin di Kecamatan Bukit Intan didominasi oleh penduduk usia 44-53 tahun dengan rata-rata pendidikan terbanyak Sekolah Dasar (SD) dan pekerjaan sebagai buruh dengan pendapatan kisaran Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 dan jumlah tanggungan 3-4 orang dengan jumlah anggota RT yang tidak bekerja paling banyak sebanyak 3 orang. Untuk jaminan kesehatan, terdapat 3 orang yang tidak memiliki KIS. Hampir semua responden di Kecamatan Bukit Intan memiliki rumah dengan status rumah sendiri dengan kondisi bangunan permanen, lantai semen, atap seng dan rata-rata luas 42 m². Kendaraan yang dimiliki adalah motor dan terdapat juga responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga menggunakan transportasi umum. Bantuan sosial yang paling banyak diterima responden adalah BST.

KECAMATAN GABEK

- Karakteristik penduduk miskin di Kecamatan Bukit Intan didominasi oleh penduduk usia 44-53 tahun dengan rata-rata pendidikan terbanyak Sekolah Dasar (SD) dan pekerjaan sebagai buruh dengan pendapatan kisaran Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 dan jumlah tanggungan 3-4 orang dengan jumlah anggota RT yang tidak bekerja paling banyak sebanyak 4 orang. Untuk jaminan kesehatan, terdapat 3 orang yang tidak memiliki KIS. Hampir semua responden di Kecamatan Bukit Intan memiliki rumah dengan status rumah sendiri dengan kondisi bangunan permanen, lantai semen, atap seng dan rata-rata luas 42m². Kendaraan yang dimiliki adalah motor dan terdapat juga responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga menggunakan transportasi umum. Bantuan sosial yang paling banyak diterima responden adalah BST.

KECAMATAN GERUNGGANG

- Karakteristik penduduk miskin di Kecamatan Bukit Intan didominasi oleh penduduk usia 34-43 tahun dengan rata-rata pendidikan terbanyak Sekolah Dasar (SD) dan pekerjaan sebagai buruh dengan pendapatan kisaran Rp. 2.100.000 - Rp. 2.500.000 dan terbanyak memiliki jumlah tanggungan 3-4 orang dengan jumlah anggota RT yang tidak bekerja paling banyak sebanyak 5 orang. Untuk jaminan kesehatan, semua responden memiliki KIS. Sedangkan untuk perumahan, responden memiliki rumah dengan status rumah sendiri dengan kondisi bangunan permanen, lantai semen, atap seng dan rata-rata luas 42 m². Kendaraan yang dimiliki adalah motor dan

terdapat juga responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga menggunakan transportasi umum. Bantuan sosial yang paling banyak diterima responden adalah PKH.

KECAMATAN GIRIMAYA

- Karakteristik penduduk miskin di Kecamatan Bukit Intan didominasi oleh penduduk usia 44-53 tahun dengan rata-rata pendidikan terbanyak Sekolah Dasar (SD) dan pekerjaan sebagai buruh dengan pendapatan kisaran Rp. 500.000 - Rp. 1.500.000 dan jumlah tanggungan 3 orang dengan jumlah anggota RT yang tidak bekerja paling banyak sebanyak 3 orang. Untuk jaminan kesehatan, terdapat 2 orang yang tidak memiliki KIS. Hampir semua responden di Kecamatan Bukit Intan memiliki rumah dengan status rumah sendiri dengan kondisi bangunan permanen, lantai semen, atap seng dan rata-rata luas 42m². Kendaraan yang dimiliki adalah motor dan terdapat juga responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga menggunakan transportasi umum. Bantuan sosial yang paling banyak diterima responden adalah PKH.

KECAMATAN PANGKALBALAM

- Karakteristik penduduk miskin di Kecamatan Bukit Intan didominasi oleh penduduk usia 44-53 tahun dengan rata-rata pendidikan terbanyak Sekolah Dasar (SD) dan pekerjaan sebagai buruh dengan pendapatan kisaran Rp. 500.000 - Rp. 1.500.000 dan terbanyak memiliki jumlah tanggungan 3-4 orang dengan jumlah anggota RT yang tidak bekerja paling banyak sebanyak 2 orang. Untuk jaminan kesehatan, terdapat 1 responden yang tidak memiliki KIS. Sedangkan untuk perumahan, responden memiliki rumah dengan status rumah sendiri dengan kondisi bangunan permanen, lantai semen, atap seng dan rata-rata luas 42 m². Kendaraan yang dimiliki adalah motor dan terdapat juga responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga menggunakan transportasi umum. Bantuan sosial yang paling banyak diterima responden adalah BST.

KECAMATAN RANGKUI

- Karakteristik penduduk miskin di Kecamatan Bukit Intan didominasi oleh penduduk usia 51-60 tahun dengan rata-rata pendidikan terbanyak Sekolah Dasar (SD) dan pekerjaan sebagai buruh dengan pendapatan kisaran Rp. 1.100.000 - Rp. 1.500.000 dan jumlah tanggungan 8 orang dengan jumlah anggota RT yang tidak bekerja paling banyak sebanyak 6 orang. Untuk jaminan kesehatan, terdapat 12 orang yang tidak memiliki KIS. Hampir semua responden di Kecamatan Bukit Intan memiliki rumah dengan status rumah sendiri dengan kondisi bangunan permanen, lantai semen, atap seng dan rata-rata luas 42m². Kendaraan yang dimiliki adalah motor dan terdapat juga responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga menggunakan transportasi umum. Bantuan sosial yang paling banyak diterima responden adalah PKH.

KECAMATAN TAMAN SARI

- Karakteristik penduduk miskin di Kecamatan Bukit Intan didominasi oleh penduduk usia 51-55 tahun dengan rata-rata pendidikan terbanyak SMA/SMK dan pekerjaan sebagai buruh dengan pendapatan kisaran Rp. 1.600.000 - Rp. 2.000.000 dan terbanyak memiliki jumlah tanggungan 6 orang dengan jumlah anggota RT yang tidak bekerja paling banyak sebanyak 5 orang. Untuk jaminan kesehatan, terdapat 1 responden yang tidak memiliki KIS. Sedangkan untuk perumahan, responden memiliki rumah dengan status rumah sendiri dengan kondisi bangunan permanen, lantai semen, atap seng dan rata-rata luas 42 m². Kendaraan yang dimiliki adalah motor dan terdapat juga responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga menggunakan transportasi umum. Bantuan sosial yang paling banyak diterima responden adalah BST.

KOTA PANGKALPINANG

- Range usia responden di Kota Pangkalpinang terbanyak berada pada usia 46-53 dengan pendidikan terbanyak adalah tamatan Sekolah Dasar (SD). Pendapatan responden bervariasi, mulai dari yang terendah sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan yang tertinggi sebesar Rp. 3.500.000,-. Range pendapatan terbanyak berada di antara Rp. 1.100.000 –Rp. 2.000.000. Responden terbanyak memiliki anak sejumlah 3 orang yaitu 37 responden, terbesar berikutnya memiliki anak sebanyak 2 dan 3 anak. Jumlah anak terbanyak yang dimiliki responden yaitu sebanyak 8 orang. Untuk jumlah RT yang tidak bekerja terbanyak di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 2 orang, Sedangkan jumlah anggota RT yang tidak bekerja terbanyak yaitu 6 orang/keluarga. Sebanyak 23 orang masih belum memiliki fasilitas kesehatan KIS. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya fasilitas kesehatan KIS sebagai bentuk asuransi kesehatan. Sebanyak 69 responden memiliki tempat tinggal dengan status rumah sendiri. Selain itu rumah responden didominasi oleh bangunan permanen beratap seng dan lantai semen. Dengan luas rumah paling kecil yaitu 15 m² dan terbesar 300m², sebagian besar responden memiliki rumah berukuran 42m². Responden sebagian besar memiliki kendaraan pribadi berupa motor kisaran harga 3-6 juta.
- Semua responden di Kota Pangkalpinang memperoleh bantuan sosial yang disalurkan pemerintah. Terdapat 5 jenis bantuan sosial yang diterima responden yaitu, Bantuan Langsung Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Rumah Swadaya. Bantuan sosial terbanyak yang diterima oleh responden adalah PKH.

5.2. SARAN

1. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan dengan harapan anggota rumah tangga usia produktif yang tidak bekerja dapat berwirausaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
2. Fungsi program pemerintah pada sektor pendidikan seperti akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, wajib belajar serta pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan perlu ditingkatkan kembali agar anak dan generasi berikutnya dapat memperoleh penghidupan lebih baik dengan adanya peningkatan pendidikan.
3. Meningkatkan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat miskin guna memperlambat laju pertumbuhan penduduk yang berdampak pada dependency ratio dan mengambil kebijakan dalam pembinaan penduduk lanjut usia.
4. Mengintegrasikan penyaluran bantu sosial dan terus melakukan pemutakhiran data penerimaan bantuan sosial.

5.3. REKOMENDASI

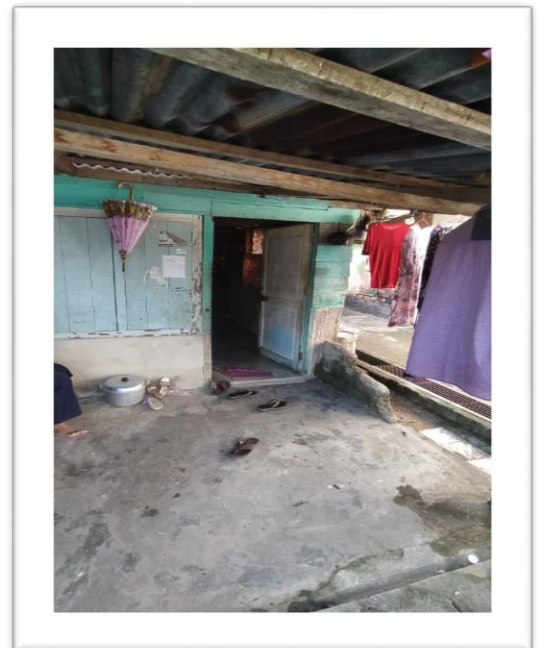
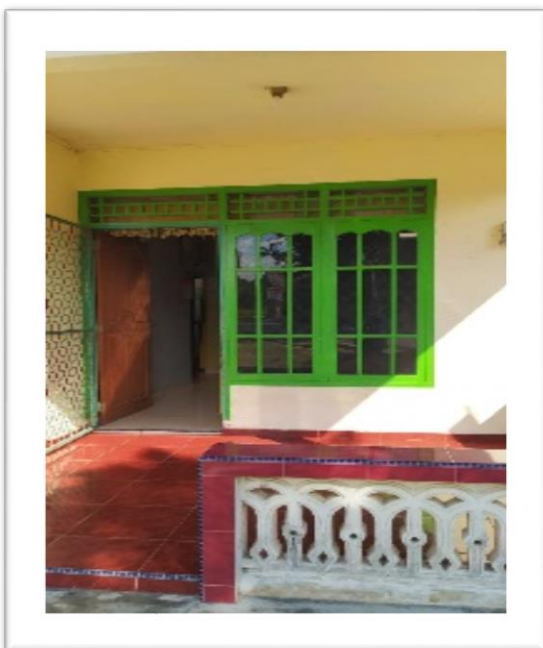
1. Penanganan fakir miskin di kota Pangkalpinang sifatnya tidak hanya mendukung program dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah kota untuk memberikan program bantuan langsung untuk penanganan fakir miskin dan lebih kepada selain dalam bentuk langsung juga bentuk pemberdayaan masyarakat.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan program bantuan tersebut 6 T (tepat sasaran, waktu, jumlah, kualitas, harga, dan administrasi).
3. Untuk sisi pendataan fakir miskin agar mendukung sistem pendataan/verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi, dimulai dari tingkat Kelurahan, kecamatan, dinas sosial baru kemudian masuk ke ranah Kementerian Sosial.
4. Untuk pemerintah pusat agar membuka jalur koordinasi yang seluas-luasnya kepada daerah, untuk dapat berkoordinasi, berkonsultasi, memberikan sumbang saran terkait dengan pelaksanaan proses pendataan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat miskin, maka harus ada kebijakan terkait Peningkatan komitmen anggota kelompok, peningkatan modal, peningkatan keterampilan, dan Peningkatan akses pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

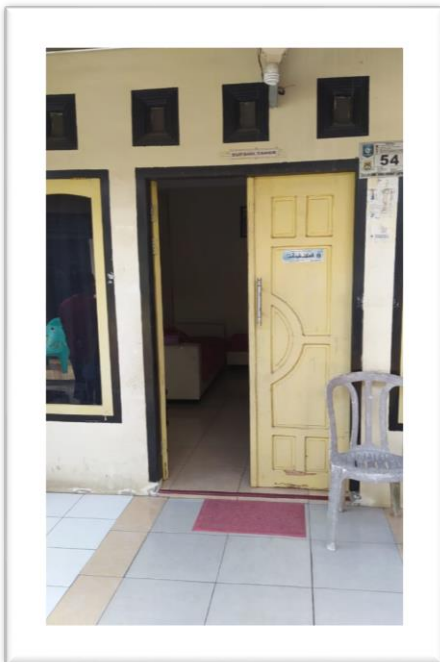
- Ali, K. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*. Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2017.
- Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2018.
- Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2021.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Erlangga.
- Maipita, I. and F. (2014). *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. UPP STIM YKPN.
<http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/19488>
- Mok, T. Y., Gan, C., & Sanyal, A. (2007). The determinants of urban household poverty in Malaysia. *MODSIM07 - Land, Water and Environmental Management: Integrated Systems for Sustainability, Proceedings, September 2014*, 1124–1130. <https://doi.org/10.3844/jssp.2007.190.196>
- Nazara, S. (2010). Informal Economy in Indonesia: Size, Composition, dan Evolution. In *International Labour Organization*.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_145402.pdf
- Noeraini, A. A. (2013). Ekonomi Informal Di Indonesia, Suatu Tinjauan Pustaka. *Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran*.
- Ravallion, M. (2007). Urban poverty. *Finance and Development*, 44(3), 15–17.
<https://doi.org/10.4324/9781849772006-8>
- Saenong, Z. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kota Kendari Tahun 2014. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, I*.
- Stephen, T. M. P. & S. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Erlangga.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (III). PT Raja Grafindo Persada.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekon, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Induk Provinsi Papua*. CV Budi Utama.
- Zhukof, Y. (2010). *Spatial Autocorrelation, IQQS*. Harvard University.

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI SURVEI LAPANGAN



DOKUMENTASI SURVEI LAPANGAN



DOKUMENTASI SURVEI LAPANGAN



LAMPIRAN II

KUISIONER PENELITIAN KERJASAMA BAPEDDA KOTA PANGKALPINANG DAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

1. Angket ini terdiri atas serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah dilengkapi dengan tempat untuk menjawab maupun alternatif jawaban yang disediakan.
2. Pengisian jawaban dilakukan dengan melingkari pada pilihan yang dianggap paling mendekati, memberi tanda (\surd) pada pilihan jawaban yang tersedia atau menuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan.
3. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya dalam pengisian angket penelitian ini

Nama	
Tempat Tanggal Lahir	
Umur saat ini	
Alamat Tempat Tinggal	
Asal	
Status di dalam Rumah Tangga	
Pekerjaan	
Pendidikan Terakhir	
Status Pernikahan	
Jumlah Anak	
Jumlah Seluruh Penghuni Rumah Tangga	
Jumlah Penghuni Bekerja	
Jumlah Penghuni Tidak Bekerja	

DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK

A. Dimensi Tempat Tinggal

1. Apa status rumah tinggal saat ini?
 - a. Milik Sendiri
 - b. Sewa
 - c. Menempati

<p>2. Status Kondisi Rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permanen b. Semi Permanen c. Tidak Permanen
<p>3. Bahan Atap Rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Genteng b. Seng c. Daun Kelapa/Sejenisnya
<p>4. Bahan Lantai Rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanah b. Papan/Kayu c. Semen d. Keramik/Ubin/Marmer
<p>5. Luas Lantai Rumah</p> <p>..... m²</p>
<p>6. Berapa lama tinggal di rumah sekarang</p> <p>..... Tahun</p>
<p>7. Status Rumah tinggal sekarang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membeli/ Membangun sendiri b. Warisan c. Sewa

B. Dimensi Kendaraan

<p>Apakah RT ini Memiliki Kendaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. YA b. TIDAK <p>Jika YA jenisnya apa</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Motor b. Mobil
--

Jumlah kendaraan yang dimiliki
..... Unit

Nilai Kisaran

Motor 1		Jelaskan merk dan tahun	
Motor 2		Jelaskan merk dan tahun	
Motor 3		Jelaskan merk dan tahun	
Motor 4		Jelaskan merk dan tahun	

Nilai Kisaran

Mobil 1		Jelaskan merk dan tahun	
Mobil 2		Jelaskan merk dan tahun	
Mobil 3		Jelaskan merk dan tahun	
Mobil 4		Jelaskan merk dan tahun	

DIMENSI PEKERJAAN

A. Pertanyaan Pertanian

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Ibu/Bapak/Sdr atau Anggota Rumah Tangga yang lain memiliki lahan pertanian?		
Berapa luas lahan pertanian yang dimiliki rumah tangga Ibu/Bapak/Sdr?		
Berapa luas tanah milik sendiri yang diusahakan/digarap?		

- Apa Jenis Tanaman yang di Budidayakan di Lahan Pertanian Bapak/Ibu?

	Lada
	Karet
	Sawit
	Sayur Sayuran
	Buah Buahan
	Lainnya

- Kira-kira berapa rupiah jumlah seluruh nilai hasil usaha tani yang diterima oleh rumah tangga ini (termasuk hasil usaha tani yang dikonsumsi sendiri, diberikan kepada orang lain) dalam 12 bulan terakhir? Rp
- Kira-kira berapa rupiah jumlah seluruh pengeluaran Ibu/Bapak/Sdr dan anggota rumah tangga Ibu/Bapak/Sdr untuk usaha tani dalam 12 bulan terakhir? Rp
- Kira-kira berapa rupiah jumlah penerimaan bersih (keuntungan) dari hasil usaha tani dalam 12 bulan terakhir? Rp
- Dalam 12 bulan terakhir, apakah Rumah Tangga Ibu/Bapak/Saudara pernah mengalami gagal panen?

	Kekeringan/kekurangan air
	Banjir
	Hama (tikus, wereng, babi, kera, belalang, dll)
	Wabah penyakit tanaman
	Sebab Lainnya

B. Pertanyaan Peternakan

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Ibu/Bapak/Sdr atau Anggota Rumah Tangga yang lain memiliki lahan Peternakan?		
Berapa luas lahan Peternakan yang dimiliki rumah tangga Ibu/Bapak/Sdr?		
Berapa luas tanah milik sendiri yang diusahakan/digarap?		

- Apa Jenis Ternak yang di Budidayakan di Lahan Peternakan Bapak/Ibu

	Ayam
	Bebek
	Kambing
	Sapi
	Lainnya sebutkan

- Kira-kira berapa rupiah jumlah seluruh pengeluaran Ibu/Bapak/Sdr dan anggota rumah tangga Ibu/Bapak/Sdr untuk usaha tani dalam 12 bulan terakhir? Rp

- Kira-kira berapa rupiah jumlah penerimaan bersih (keuntungan) dari hasil usaha tani dalam 12 bulan terakhir?Rp

C. Dimensi Pekerjaan

Berapa Jumlah Anggota Rumah tangga yang bekerja di rumah ini Orang
--	-------------

Apa Pendidikan dan Pekerjaan anggota rumah tangga dirumah ini?

Anggota 1 :

	Petani
	Karyawan Swasta
	PNS/Polri
	Honoror Pemerintah
	Institusi lainnya sebutkan

Sebutkan Penghasilan anda :

Sebutkan Penghasilan anda Perbulan	Rp.....
Sebutkan Pendidikan Terakhir anda	Rp.....

Anggota 2 :

	Petani
	Karyawan Swasta
	PNS/Polri
	Honoror Pemerintah
	Institusi lainnya sebutkan

Sebutkan Penghasilan anda :

Sebutkan Penghasilan anda Perbulan	Rp.....
Sebutkan Pendidikan Terakhir anda	Rp.....

Anggota 3 :

	Petani
	Karyawan Swasta
	PNS/Polri
	Honoror Pemerintah
	Institusi lainnya sebutkan

Sebutkan Penghasilan anda :

Sebutkan Penghasilan anda Perbulan	Rp.....
Sebutkan Pendidikan Terakhir anda	Rp.....

Anggota 4 :

	Petani
	Karyawan Swasta
	PNS/Polri
	Honoror Pemerintah
	Institusi lainnya sebutkan

Sebutkan Penghasilan anda :

Sebutkan Penghasilan anda Perbulan	Rp.....
Sebutkan Pendidikan Terakhir anda	Rp.....

Anggota 5 :

	Petani
	Karyawan Swasta
	PNS/Polri
	Honoror Pemerintah
	Institusi lainnya sebutkan

Sebutkan Penghasilan anda :

Sebutkan Penghasilan anda Perbulan	Rp.....
Sebutkan Pendidikan Terakhir anda	Rp.....

D. Dimensi Usaha

Apakah Anda Memiliki Usaha	Ya	Tidak

Usaha Anda Bergerak di Bidang Apa :

	Toko Eceran
	Kuliner
	Jasa (penjahit, pertukangan dll)

	Konsultan
	Ruko
	Sewa Rumah, Kamar dll
	Sewa Lahan
	Sewa Perahu
	Lainnya sebutkan

Berapa Nilai Aset Usaha Anda	Rp
Berapa Omzet Usaha Anda Saat ini	Rp
Berapa Nilai Keuntungan Bersih Bulanan Usaha anda	Rp
Berapa orang yang anda pekerjakan di usaha tersebut	Rp
Apakah usaha di bantu oleh salah satu anggota	Rp
Berapa Gaji pekerja yang anda pekerjakan	Rp

E. Dimensi Anak :

Sebutkan Jumlah Anak Berusia dibawah 17 dirumah ini:

Anak 1 :

UmurTahun
Pendidikan yang sedang ditempuh	
Biaya Sekolah	Rp.....
Pekerjaan	Rp.....
Penghasilan	Rp.....

Anak 2

UmurTahun
Pendidikan yang sedang ditempuh	
Biaya Sekolah	Rp.....
Pekerjaan	Rp.....
Penghasilan	Rp.....

Anak 3 :

UmurTahun
Pendidikan yang sedang ditempuh	
Biaya Sekolah	Rp.....
Pekerjaan	Rp.....
Penghasilan	Rp.....

Anak 4

UmurTahun
Pendidikan yang sedang ditempuh	
Biaya Sekolah	Rp.....
Pekerjaan	Rp.....
Penghasilan	Rp.....

Anak 5

UmurTahun
Pendidikan yang sedang ditempuh	
Biaya Sekolah	Rp.....
Pekerjaan	Rp.....
Penghasilan	Rp.....

F. Dimensi Pengeluaran

Jelaskan Pengeluaran di Rumah Anda

Kebutuhan Makanan Bulanan	Rp.....
Kebutuhan Listrik Bulanan	Rp.....
Kebutuhan Bahan Bakar Mingguan	Rp.....
Kebutuhan Hari Raya tahunan	Rp.....
Kebutuhan Kesehatan Bulanan	Rp.....
Kebutuhan Rokok harian	Rp.....
Kebutuhan Pendidikan Bulanan	Rp.....
Kebutuhan Pakaian Tahunan	Rp.....
Kebutuhan Perbaikan Rumah (Tahunan)	Rp.....

G. Dimensi Bantuan Pemerintah

Apakah Rumah ini pernah menerima bantuan sosial pemerintah	Ya	Tidak

Bila ya, sebutkan jenis bantuannya	Tunai	Non Tunai

Apakah Rumah Tangga ini Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu?	Ya	Tidak

Jelaskan jenis bantuan yang sudah pernah anda dapatkan

BST Tahun	Rp.....
PKH Tahun	Rp.....
Prakerja Tahun	Rp.....
KUBE Tahun	Rp.....
KUR Tahun	Rp.....
BANTUAN UMKM Tahun	Rp.....

DIMENSI PENDIDIKAN

Pertanyaan	Jarak	Waktu
Berapa Jarak SD terdekat dengan Rumah Anda km Menit
Berapa Jarak SMP terdekat dengan Rumah Anda km Menit
Berapa Jarak SMA terdekat dengan Rumah Andakm Menit
Apakah Anda mengetahui tersedianya perguruan tinggi di wilayah anda	Ya	Tidak
Apabila ya, berapa jarak perguruan tinggi dengan rumah anda km Menit

Apakah ada anggota rumah tangga yang putus sekolah	Ya	Tidak

Jika Ya, Sebutkan alasannya		Biaya
		Bekerja
		Kesehatan
		Tidak Mampu mengikuti pelajaran
		Jarak Sekolah terlalu Jauh

Apakah ada Anggota rumah tangga anda yang tamat SD namun tidak melanjutkan ke SMP	Ya	Tidak

Jika Ya, Sebutkan alasannya		Biaya
		Bekerja
		Kesehatan
		Tidak Mampu mengikuti pelajaran
		Jarak Sekolah terlalu Jauh
		Tidak diterima disekolah yang dituju

Apakah ada Anggota rumah tangga anda yang tamat SMP namun tidak melanjutkan ke SMA	Ya	Tidak

Jika Ya, Sebutkan alasannya		Biaya
		Bekerja
		Kesehatan
		Tidak Mampu mengikuti pelajaran
		Jarak Sekolah terlalu Jauh
		Tidak diterima disekolah yang dituju

DIMENSI KESEHATAN

Apakah ada Anggota rumah tangga anda dalam kondisi sakit dan membutuhkan perawatan medis secara berkelanjutan	Ya	Tidak

Jika YA berapa jumlah anggota keluarga anda yang daam kondisi sakit Orang
--

Berapa besar rata-rata pengeluaran untuk berobat dalam perbulan
Rp

DIMENSI DAMPAK PEREKONOMIAN RUMAH TANGGA
TERHADAP PADEMI COVID

Bagaimana pandangan anda terkait bantuan sosial yang sudah diberikan oleh pemerintah

Seberapa penting dan manfaat bantuan sosial yang anda peroleh dari pemerintah

- a. Sangat Penting dan Sangat Bermanfaat
- b. Penting dan Bermanfaat
- c. Biasa saja
- d. Tidak penting dan Tidak Bermanfaat
- e. Sangat Tidak Penting dan Sangat Tidak Bermanfaat

Digunakan untuk apa bantuan sosial yang anda peroleh dari pemerintah

Bagaimana pendapat anda terhadap bantuan sosial yang tidak tepat sasaran



AHALISIS SEBARAH DAH KARAKTERISTIK KEMISKIHAN
DI KOTA PANGKALPINAHG